BALAIRUNG

EDISI NO.27/TH. XIII/1998

HITAM PUTIH
PASCA SOEHARTO

Polling *Balairung*:
Kepemimpinan Soeharto Berhasil?

ISSN : 0215 - 076X

Rp. 4.900

DAPUR

Pembaca untuk menggapai obsesi edisi 27 sebagai terbaik bagi pembaca, Laporan Utama kami awali dengan menghadirkan Sdr Sutopo Sasmito Edy, S.IP., seorang staf IRE (*Institute Research Empowerment*) Yogyakarta ke kantor redaksi, untuk mengasah ketajaman analisa persoalan bagi pengurus *Balairung*. Kemudian untuk melengkapi Laporan utama kali ini kami juga mencoba menampilkan *polling* untuk menjajaki sikap dan tanggapan mahasiswa UGM terhadap kepemimpinan Soeharto. *Polling* ini kami kerjakan dibantu konsultan, sebuah lembaga riset di Yogyakarta.

Untuk soal *polling* ini *Balairung* tidak mau main-main, karena dari banyak *polling* sejenis yang telah dilakukan oleh kawan-kawan lain (baik lembaga penerbitan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan) sering digugat oleh pakar peneliti mengenai metodologinya, pengambilan *sample*, hingga *Sampling Error*-nya. Hal ini patut disadari karena sangat berkaitan dengan validitas hasil dan rekomendasi yang mungkin diajukan.

DOK. BALAIRUNG

Mahasiswa UGM *tidak semua punya telepon*

Pekerjaan itupun dimulai. Masalah metodologi benar-benar kami prioritaskan. Prosedur penyebaran kuesioner pun tidak semudah yang dibayangkan. Untuk melihat kondisi populasi yang jumlahnya 32.383 mahasiswa, paling tidak perlu *sample* 600 orang. Dengan demikian *sampling error* yang kami ambil 4%. Cukup besar memang. Kami terpaksa melakukannya mengingat kami harus realistis dengan SDM yang dimiliki *Balairung*.

Kami tidak bisa memakai fasilitas telepon seperti layaknya dilakukan oleh lembaga *polling* profesional. Selain tidak mencerminkan mahasiswa UGM --karena tidak semua mahasiswa UGM punya telepon--, *polling* per telepon juga memerlukan biaya yang amat besar.

Akhirnya diputuskan untuk mendatangi responden yang sudah dipilih dengan *systematic sampling* satu-persatu. Ya, satu persatu. Lagi-lagi ini kerja yang tidak main-main. Selain dicari di fakultas masing-masing, kami juga mendatangi alamat masing-masing responden. Di sinilah dihadapi kerumitan teknis luar biasa. Responden yang tak dapat ditemui cukup banyak. Alasannya bisa bermacam-macam. Responden yang sudah lulus, responden yang KKN, dan, terutama, alamat yang tak lengkap --sehingga tak bisa dihubungi-- adalah sederetan hambatan yang dihadapi. Akibatnya, *sample* berkurang. Dan *sampling error* pun menjadi 4,9%.

Dengan melibatkan beberapa staf redaksi dan seluruh magang calon pengurus, akhirnya pekerjaan itu bisa diselesaikan dan hasilnya dapat pembaca lihat pada Laporan utama edisi 27 ini. Inilah salah satu pembelajaran bagi calon pegiat-pegiat *Balairung* 'masa depan'.

Tak lupa, atas nama tim *polling Balairung*, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua responden atas segala bantuannya. Sementara itu dengan hasil jerih payahnya, kami dedikasikan *polling* ini buat pengurus baru.

Pembaca, ketika jurnalisme *presisi* di Indonesia belum kondusif untuk menjadi salah satu wahana pengembangan demokrasi, kami mencoba mendobrak kebekuan itu.

Krisis moneter 1997-1998 -- hingga melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS sampai ke tingkat terendah dan tidak adanya jaminan kepastian kurs rupiah -- betul-betul membuat dunia penerbitan, termasuk pers mahasiswa macam *Balairung* hidup dalam keprihatinan. Alhasil jika pembaca menemui *Balairung* dengan kondisi sangat beda dengan biasanya, seperti minimnya halaman warna dan menghilangnya beberapa rubrik, sampai terlambatnya jadwal terbit, itu tentunya kompromi maksimal bagian perusahaan kami. Semoga pembaca maklum adanya.•••

Penjaga Dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❑**Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ❑ **Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/82/7789/UM/01/37, *International Standard Series Number* (ISSN): 0215-076X ❑**Pelindung:** Prof. Dr. Soekanto Reksohadiprodjo, M.Com.(Rektor UGM)❑ **Penasehat:** Ir. Bambang Kartika(Pembantu Rektor III UGM), Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❑**Pemimpin Umum:** Aris Purnomo ❑ **Pjs. Sekretaris Umum:** Irma Hidayana ❑**Pemimpin Redaksi:** Khoirul Rosyadi ❑**Sekretaris Redaksi:** Nur Hidayati ❑**Ka. Litbang:** Mashudi ❑**Staf Litbang:** Hary Prabowo, Agus Riyanto, Farah Adibah, ❑**Pemimpin Perusahaan:** A. Kun Anggoro EY ❑**Sekretaris Perusahaan:** Setiati ❑**Kabag. Keuangan:** Daryanti ❑**Kabag. Iklan:** F.Ika Yuniarti ❑**Kabag. Distribusi/Publikasi:** Priyo Sudarmo ❑**Kabag. Promosi:** Ristiana Kadarsih ❑**Staf Perusahaan:** Tri Rahayu Susanti, Sri Wahyuni, Solihah, Yuki Susanti, Houtmand Parulian, Rima Rahmania, Uki Hernuning, Agoeng Widyatmoko, Anastasia Maya, Yusuf Waluyo J, Arina Jaya Putireni ❑ **Redaktur Bahasa:** Among K Ebo ❑ **Redaktur Pelaksana:** Dirmawan Hatta, Asep Mulyana ❑**Penjaga Rubrik:** Melanie Wahyu W, Ajianto Dwi N, Imam Risdiyanto, Wuwun Widiawati, Irfan Muktiono, M. Arifin ❑**Staf redaksi:** M.A Fitrianto, Aprilina Prastari, Sholahuddin Ghozali, Hery Trianto, Radyah Maharastri, M. Ugoran P, Monica Enandaru, M. Bustom, Dedy Sushandoyo, M. Mushthafa, Rofika Nora A., Didik Mas'adi, Aris Mustofa, Hertasning Ichlas, Barlian Kahuripan, Ibrahim Z. F, Iwan Hermanto, Agung Christianto, Lisa R. Rahmad, Lukman Hakim, Eka Rinanda Rhiska ❑ **Pjs. Redaktur Artistik:** M.Gandhi A, ❑**Staf Artistik:** Agung Arief Budiman, Andy Seno A, Riza Afifi, Zuhrotun Muniroh, Widi Pristiono, Afiaty Dian Irfanti, Titik Puji Lestari, Lalu Rizki R ❑**Redaktur Foto:** Fernando Bestral❑**Fotografer:** Destianto, Bambang Pamungkas ❑**Staf Magang:** Bekti DA., Syahrial, Suhartono, Fanny Arif R., Ariana Marastuti, Sohiffullah, Rio BTM Hutagaol, Iman Subhan, Suwardah, Vyara Lestari, Jhon Mbama, Ari Handoko, Dwi Haryanto, ❑**Alamat Redaksi:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901703 Faks. (0274) 566171❑ **E-mail:** balairung.ugm@eudoramail.com ❑**Rekening:** Tabanas Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah) dan TAPLUS BNI, No.Rek. 228.007 816 062.901(atas nama Sholihah) ❑**Percetakan:** Liberty Offset, Jl. Jayengprawiran 21 Yogyakarta, Telp. (0274) 512908. **Isi diluar tanggungjawab percetakan**

Balairung Interaktif, web site: http://members.tripod.com/~balairung

Redaksi menerima tulisan dan foto tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan program pengolah kata microsoft word atau wordstar. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya.

ISI

hasil *polling* BALAIRUNG

70,3% MAHASISWA UGM MENOLAK SOEHARTO

Isu seputar suksesi Indonesia 1998 terus menggelinding bagaikan bola salju. Melebar dan semakin membesar sampai pada titik kulminasinya. Mayoritas rakyat Indonesia tentu berharap-harap cemas pada apa yang bakal terjadi dalam Sidang Umum MPR-DPR bulan Maret 1998. Sebuah agenda besar nasional di tengah krisis ekonomi terburuk. Bagaimana sikap politik mahasiswa UGM terhadap suksesi 1998? Bagaimana apresiasi mereka terhadap kepemimpinsn Suharto? Siapa presiden Indonesia 1998-2003 pilihan mahasiswa UGM? Inilah hasil jajak pendapat yang dilakukan Majalah *Balairung* selama November 1997 hingga Februari 1998.

13

Berita Tema:

Ketidakpastian Pasca Soeharto

25

Iptek:

Molekul Nasional;

Sebuah Anti Inflamasi dalam Kunyit

Ditemukannya struktur 5 buah molekul turunan kurkumin oleh kelompok peneliti Fakultas Farmasi UGM melalui kerjasama dengan Vrije Universiteit Belanda dipercaya telah mengangkat nama UGM baik di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi apa sebenarnya molekul kurkumin itu sendiri?

42

Lingkungan;

Menuju Partai Hijau,

Benarkah obsesi LSM Lingkungan Indonesia?

Tampaknya permasalahan lingkungan pun tak lepas dari problematika politik. Tanpa adanya keterbukan sistem politik, gerak langkah LSM Lingkungan akan tetap tersandung. Untuk terwujudnya politik pembangunan berkesinambungan yang memiliki keseimbangan visi yang tumbuh dalam masyarakat, kita perlu mulai memikirkan adanya multi partai; partai buruh, partai HAM, partai hijau (lingkungan), partai pertanahan atau yang lainnya, yang berangkat dari isu besar dalam masyarakat. Akankah hanya akan menjadi sebuah utopia?

57

BALAIRUNG
NAFAS INTELEKTUALITAS MAHASISWA

Budaya:

Wayang Kontemporer;

Antara Tarikan Pakem dan Selera Pasar

Wayang kontemporer berkembang dengan pembaruan-pembaruan. Dalang dihadapkan pada posisi dilematis. Antara mempertahankan pakem dan mengikuti selera pasar. Inovasi yang mereka lakukan pun tak lepas dari kritikan.

84

Insan Wawasan:

Prof.Dr. loekman Soetrisno

Siapa yang tidak kenal sosok satu ini. Prof. Dr. Loekman Soetrisno di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) dan anggota Dewan Riset Nasional, pria yang berperawakan tinggi besar ini masih menyempatkan diri menjadi pembicara di berbagai forum. Sejarah latar pendidikannya bisa bercerita banyak tentang kedisiplinan dan keuletannya dalam menuntut ilmu. Apalagi jika bicara tentang neraca keadilan yang selalu tidak berpihak kepada nasib rakyat kecil. Bahkan ketika ditanya tentang krisis yang melanda saat ini, dengan keras dia mengatakan " yang berdosa yang atas, yang menikmati utang luar negeri itu adalah orang besar, ketika krisis yang menderita orang kecil."

75

Ralat untuk Balairung

Dear *Balairung*

Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM yang beberapa saat terakhir menulis untuk rubrik Kesehatan *Balairung*. Saya mempunyai usulan mengenai hak cipta sebuah artikel, yang ingin saya sampaikan.

Maksud saya demikian. Menurut saya, nama seseorang yang tercantum di bawah artikel adalah sangat penting. Sebab, hal itu menunjukkan kepemilikan artikel tersebut. Saya lihat di *Balairung* beberapa rubrik telah mencantumkan identitas pengarang, bahkan fotonya. Namun pada rubrik-rubrik tertentu masih belum jelas.

Mohon diperjelas mengenai penulis artikel, penanggung jawab rubrik, ataupun redaktur yang masih magang.

Untuk diketahui saja bahwa cetakan tebal atau tipis nama seseorang tetap belum merupakan sebuah keterangan.

Sekedar contoh saja, misalnya di majalah *Reader Digest* (*Asian Edition*) sangat jelas mencantumkan identitas penulis apakah ia penulis (..... by......),pemberi artikel (*contributed by*.....), atau sumber artikel (*taken from*.....). Hal ini penting dalam menilai keprofesionalan sebuah majalah.

Sejauh yang saya ketahui, majalah-majalah yang pernah saya baca, dan majalah-majalah sekolah yang saya ikuti, nama penanggung jawab rubrik (jabrik) jarang, bahkan tidak pernah dicantumkan dalam sebuah artikel. Kecuali bila ia jelas ikut terlibat dalam penulisan. Dan itupun tanpa perbedaan cetak tebal atau tipis tanpa keterangan yang memadai. Lagi pula, bukankah nama jabrik telah tercantum dalam pengurus dan mengumpulkan artikel adalah tugasnya?!

Bagi seorang penulis, nama dibawah artikelnya adalah nyawanya. Nyawa tidak bisa dibagi-bagi dengan orang lain, bukan. Lebih-lebih untuk sebuah artikel dalam "box" ... (Saya ingin memberitahukan bahwa terdapat kesalahan cetak di artikel Kesehatan *Balairung* NO 26/TH XII/1997, pada boks : **Scor Depresi Marcal**, ditulis bukan oleh Wuwun Widiawati, melainkan oleh saya sendiri.(Mohon diralat).

Dari pengalaman saya bergabung dengan berbagai majalah sekolah, soal nama identik dengan "salah cetak". Namun saya benar-benar tidak mengharapkan itu terjadi di *Balairung*, mengingat *Balairung* yang mewakili seluruh mahasiswa UGM diharapkan jauh lebih profesional.

Well, anyway sangat senang bergabung dengan *Balairung* beberapa tahun terakhir ini, semoga selalu sukses dan lebih berperan aktif mengembangkan minat baca mahasiswa Indonesia. *Have good days*, salam, *'n' thank's!*

Mora Claramita
Fakultas Kedokteran UGM

Mohon Penjelasan Untuk Berlangganan Satu Tahun

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1997 kami telah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) melalui Wesel Pos Dalam Negri, untuk membayar uang langganan Majalah *Balairung* edisi 27, 28, dan 29 Tahun 1997. Untuk jelasnya terlampir kami sampaikan copy Bukti Setor Uang Wesel Pos Dalam Negeri sebesar Rp. 10. 000,- untuk diketahui.

Dalam kesempatan ini kami ingin memperoleh penjelasan dari Redaksi, apakah ada kemungkinan bagi kami untuk menjadi pelanggan *Balairung*

YUNITA/ (UKM)UNIT FOTO UGM
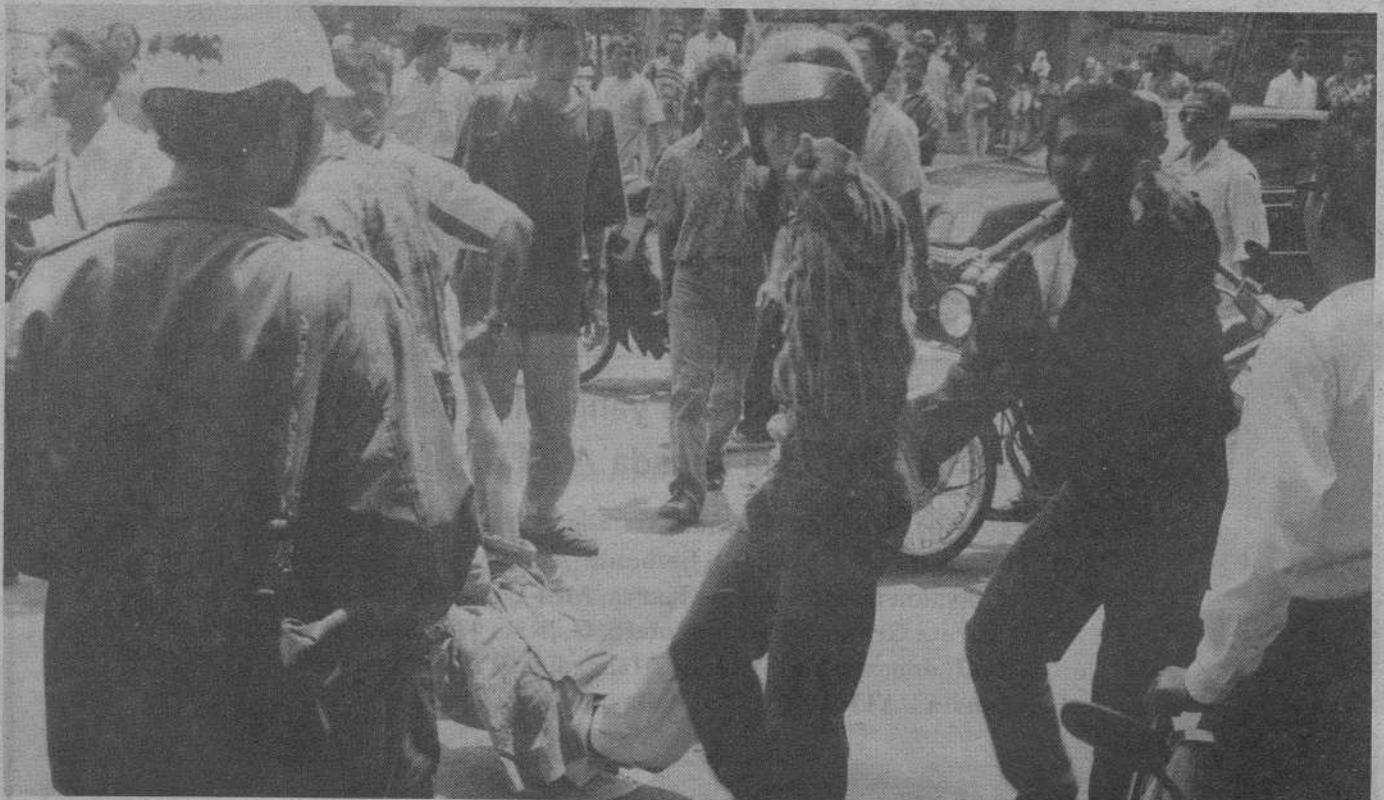
Yaa, . . . ketauan!

selama 1 (satu) tahun, dan berapa yang harus kami bayar untuk langganan sebanyak 12 (Duabelas) edisi. Hal ini akan meringankan kami, karena tidak setiap tiga bulan harus mengirimkan wesel pos ke Yogyakarta.

Demikianlah atas penjelasan redaksi kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

H. Kaboel Hadiwasito, SE
Kompleks ARCO Sawangan
Jl. Apel no. 6 - C49
SAWANGAN 16511

Dana Mitra Lingkungan, mohon langganan

Mohon Dana Mitra Lingkungan (DML) dicatat sebagai pelanggan Majalah *Balairung* mulai edisi 27 selama 1 (satu) tahun.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

hormat kami
Anik Sumartini
Staf administrasi
Dana Mitra Lingkungan (DML)
Jl Mampang Prapatan VI/41 Jakarta
12790, Kotak Pos 3785 Jakarta 10037
Telp. (021) 7945104 Faks (021) 7945116

Bantulah Kami

Diberitahukan dengan hormat, bahwa keberadaan fisik Musholla **Sabilul Muhtadin** pada saat ini dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan perbaikan. Dengan demikian kami bersama jamaah Majelis Taklim ingin merenovasi dan memperluas dengan ukuran 10 x 6 meter. Sedangkan biaya yang dibutuhkan kurang lebih Rp21.135.000,00(dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tetapi karena para jamaah adalah rata-rata berusia lanjut dari ekonomi yang pas-pasan, maka sampai saat ini masih belum terlaksana mengingat dana yang ada sangat minim sekali dan sangat jauh dari mencukupi. Bantuan tenaga dan sebagian bahan bangunan dari jamaah sudah ada.

Dengan melalui rubrik pembaca(kontak) ini kiranya ada diantara para pembaca yang ingin beramal jariyah atau bershodaqoh/ zakat, baik berupa uang ataupun alat-alat bangunan. Kami sangat senang bilamana diantarkan sendiri. Sedangkan rute perjalanan akan diberitahukan kemudian.

Atas amal bantuannya kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT.

K. Zainuddin, pimpinan
d.a. Jalan Kapolsek Kecamatan Pragaan
Sumenep Pos Prenduan Madura 69465

Naskah Pidato Pengukuhan, bisakah diterbitkan masal?

Di UGM sebagai universitas terbesar, tertua dan paling dinamis aktivitas akademiknya di Indonesia, frekuensi upacara pengukuhan guru besar atau promosi doktor amatlah sering. Setahu saya di UGM naskah pengukuhan guru besar, ringkasan disertasi doktor, atau pidato seorang guru besar dalam upacara dies atau saat pemberian penghargaan ilmiah(HB IX *award* atau alumni berprestasi) hanya dicetak terbatas memenuhi undangan yang hadir saja. Setelah itu habis, kita sulit menemukannya lagi, di perpustakaan sekalipun. Nah bisakah kiranya naskah-naskah itu diterbitkan secara masal, dengan hak cipta dipegang UGM? Setahu saya Penerbit

Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM)
Universitas Gadjah Mada
ikut berbelasungkawa atas meninggalnya:

Bapak H. Salim
di Solo
ayahnda rekan kami **Nur Hidayati**
sekretaris redaksi Majalah *Balairung*

Bapak Nasjah Jamin
sastrawan, pelukis
4 September 1997 di Yogyakarta
ayahnda rekan kami **Yenny Mainita**
mantan staf sekum SKM *Bulaksumur*

BPPM UGM

❐Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ❐Ketua Presidium, merangkap anggota:Aris Purnomo(Pemimpin Umum MM *Balairung*)**❐Anggota presidium**: Hidayatullah (Pemimpin Umum SKM *Bulaksumur*), Ahmad Nasir (Sekretaris Umum SKM *Bulaksumur*), Irma Hidayana (Pejabat Sekretaris Umum Majalah *Balairung*)

...kuberjanji memenuhi panggilan bangsaku...

(Suthasoma, Mars Gadjah Mada)

IKUT BERBAHAGIA ATAS WISUDA

rekan-rekan kami:

Kurniawan, S.S.
Mantan Ketua Umum BPPM UGM, Pimred. MM *Balairung*/SKM *Bulaksumur*
Poppy Sulistyaning, W, S.IP.
Mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Suluh Pratitasari, S.S
mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
A. Wisnuhardana,S.Si.
mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Seno Joko Suyono,S.S.
mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Tri Wasono Sunu,S.IP.
mantan fotografer Majalah *Balairung*
Widarso, S.S.
mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Frans Surdiasis,S.IP.
mantan Pemimpin redaksi Majalah *Balairung*
Rahmi Lestarini, S.Sos.
mantan Sekretaris Umum BPPM UGM dan Pemimpin Perusahaan Majalah *Balairung*
Amir Fattah Sofyan,S.T.
Mantan redaktur artistik Majalah *Balairung*
M. Mustajab, S.E.
Mantan staf redaksi Majalah *Balairung*
Moh. Holili Bustomi,S.S.
Mantan ketua Dept. PP BPPM UGM
Karyani Laksmi Dewi, S.E.
Mantan staf perusahaan Majalah *Balairung*
R. Daryanti, A.Md.
Mantan Kabag. Keuangan Majalah *Balairung*
Setyana Dewi Luh, A.Md.
Mantan staf perusahaan SKM *Bulaksumur*
Iswadi, A.Md.
Mantan fotografer SKM *Bulaksumur*
Shita Rahmawati, A.Md.
Mantan staf redaksi SKM *Bulaksumur*
Retno Inderawati, A.Md.
staf Litbang SKM *Bulaksumur*
Sri Budyartati, S.S.
mantan staf Litbang SKM *Bulaksumur*
Hurry Anggoro Saputro, S.E.
mantan redaktur artistik SKM *Bulaksumur*
F.X. Ari Lesmana, S.IP.
Mantan redaktur artistik SKM *Bulaksumur*
Linda Yanti, A.Md.
mantan staf redaksi SKM *Bulaksumur*
Kelik Supriyanto,S.Si.
mantan fotografer MM *Balairung*
beserta wisudawan/wati UGM

semangat, ilmu, pengalaman, dan pengabdian semoga untuk prestasi-prestasi yang lebih baik lagi...

keluarga besar BPPM UGM

ITB sudah melakukan hal serupa dengan kebijakan tanpa diedit. Bila UGM atau Gama Press hendak melakukanya, saya kira masyarakat terutama sivitas akademika banyak yang dapat memanfaatkannya.

Seorang mahasiswa fakultas eksakta UGM

Salam dari SIGMA

Assalamu 'alaikum wr.wb

Hallo *Balairung*! Pa khabar ?

Selamat, ya sudah terbit lagi. Semoga *Balairung* yang sekarang lebih bagus dari yang kemarin. Amien.

Terima kasih, *Balairung* edisi perkenalannya. Nanti kalau SIGMA sudah terbit kita kirim juga, sebagai bentuk kerjasama.

Sebenarnya kami ingin pengurus *Balairung* pada berkunjung ke SIGMA sekedar berbagi pengalaman. Masak anak SIGMA terus yang harus melakukannya? 'Kan nggak seru tuh!

Oh ya, *Balairung* yang kemarin menurut penilaian kami yang masih pelajar SMU sudah bagus kok. Wujud kepedulian sama nasib orang lain. Ternyata anak-anak *Balairung* tinggi juga kepekaan sosialnya.

Yang terakhir. Kami segenap kru Majalah SIGMA SMU I Yogyakarta mengucapkan terima kasih berat, atas bantuannya pada diklat jurnalistik *intern* SIGMA beberapa saat yang lalu.

Salam buat pembaca *Balairung* dari SIGMA.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ika
Pemred Majalah SIGMA XIX
SMU I (Teladan) Yogyakarta

Tak Sampai Hati

Terdorong oleh rasa ikut serta dalam rangka Lii'la'i kalimatillah khususnya dalam bidang pendidikan, maka sejak tahun 1990 kami Pengurus Yayasan Pondok Pesantern At-Thohiriyah mengangkat anak asuh dari anak yatim/fakir miskin yang banyak terlantar di dusun-dusun kami. Namun akhir-akhir ini kami terpaksa menolak bila ada anak yatim/fakir miskin yang medaftarkan diri sebagai anak asuh kami walaupun sebenarnya kami tidak sampai hati, sebab kami sudah kekurangan dana untuk menyantuni mereka. Kerena masalah ini merupakan masalah umat kitapun ikut merasakanya.

Untuk itu kiranya ada diantara para pembaca yang terketuk hatinya ikut membantu kami membiayai pendidikan mereka, baik berupa zakat atau *shodaqah*. Dan kami juga menerima pakaian bekas yang layak untuk anak didik kami dan guru pembimbing. Karena kami yakin tanpa bantuan para dermawan niscaya pendidikan mereka akan terlantar.

Bantuan bisa diantar sendiri atau dikirim melalui Bank BRI Capem Prenduan Sumenep Madura nomor rekening: 2767-0-905 atau ke Bank BCA Cabang Pamekasan Madura Jatim nomor rekening: 1920057345 atas nama Hamidi Zainuddin.

Atas bantuanya kami mengucapkan banyak terima kasih semoga mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Amin....

K. Rohmatullah Rija'ie (pimpinan)
Yayasan Pondok Pesantern At-Thohiriyah
Aengpanas Pos Prenduan Sumenep Madura
Jatim 69465

Sejarah kembali terulang...

Sudah menjadi kebiasaan kami barangkali, kalau kebetulan reportase ke Yogya, maka kami "pasti" akan merepotkan kawan-kawan B-21 (markas BPPM UGM). Kalau mau jujur ini sebenarnya *sih* persoalan sejarah. "Nenek moyang" kami menanamkan sebuah tanggung jawab moral pada kami tentang "*duduluran ieu*" (persaudaraan ini). Dan ini tertanam cukup baik di pikiran kami. *Insya Allah* tradisi ini akan bertahan selamanya. Kutunggu kehadiran kawan-kawan (pegiat pers Mahasiswa UGM) di markas kami di Bandung kapanpun juga.

Salam, dan sekali lagi terimakasih.

U. Wawan
Pimred Tabloid 'JUMPA' UNPAS Bandung
Jl.Taman sari 6-8 tlp 426 1259,420 1677,Fax (022) 436 182

Saya tidak melihat informasi jangka terbit majalah ini...

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa kiriman majalah *Balairung* Edisi No 26/Th. XII/1997 telah kami terima sampai dua eksemplar dengan surat penyampaian dan kesediaan sebagai donatur. Untuk itu kami ucapkan banyak terimah kasih.

karena kami agak lambat membalasnya, ya hanya karena kesibukan tugas-tugas di Universitas dan tugas organisasi, khususnya baru saja kami kembali dari mengikuti pertemuan se-Asia-Pasifik Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (HIPPRADA) di Malasyia, kemudian diteruskan ke Bangkok dan Brunei Darussalam, yang kesemuanya makan 12 hari.

Selanjutnya tentang Majalah *Balairung* ini, kami telah menerima: edisi no. 23/Th.X/1996 - 2 eksemplar. Edisi 24/Th. X/1996 - 2 eksemplar. Edisi Khusus/Th. X/1996 - 1 eksemplar. Edisi No. 26/Th. XII/1997- 2 eksemplar dengan catatan harga Rp. 2.500, Rp. 3.000, dan kemudian Rp. 3.500.

Pada prinsipnya kami bersedia menjadi donatur, hanya kami tidak melihat informasi, majalah ini terbit setiap berapa bulan sekali. Sebab kalau per bulan, berarti kalau untuk satu tahun kami harus kirimkan 12 kali. Untuk waktu yang lalu kami juga lupa apakah kami pernah mengirimkan bantuan dana. Lain halnya kalau *Berita Kagama* itu kalau kita mengirim sedikitnya Rp 100.000, sudah tercatat sebagai pelanggan abadi.

Selain itu bersama ini terkirim satu berkas tentang penganugrahan kami sebagai Generasi Pelopor Pembangunan Indonesia '97 bulan September yang baru lalu, barang kali ada kemungkinannya untuk dimuat.(*terlampir-red*)

Pertama, bersama ini terkirim uang Rp. 15.000 untuk terbitan majalah *Balairung* s/d Desember 1997. Semoga dapat diterima dengan baik.

Prof. Dr. Hj. Soetinah Soewondo
Rektor Universitas Satria Makassar
Ujung Pandang Sul-Sel
(Alumni UGM)

terima kasih bantuannya. Semoga segala 'kepedulian' ibu menjadi amal baik yang tidak ada putus-putusnya.Dan bagi kami semoga itu menjadi motivasi bagi usaha peningkatan dinamika kegiatan kemahasiswaan di almamater tercinta UGM.-red

Executive Club telah dibuka, Silahkan bergabung

Lewat kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara baik sarjana, pelajar, masyarakat umum. Baik yang sudah bekerja maupun yang masih pengangguran untuk bergabung bersama kami dalam wadah **"Executive Club"**.

Banyak sekali manfaat yang dapat Saudara peroleh seperti informasi bisnis/kerja untuk sambilan/tetap, kesehatan, fasilitas tour dalam dan luar negeri, asuransi, fasilitas *Discount Card* untuk seluruh super market di Indoensia, seminar-seminar, dan lain-lain.

Bagi Anda yang berminat hubungi saya dan jangan lupa sertakan prangko balasan. Informasi gratis saya berikan berikut formulir pendaftaranya.

Suwandi N. Prayitno
Executive Club
Tromol Pos 01 NYS
Karanganyar-Surakarta
Jawa Tengah
57793

Ingin informasi terbit

Saya sangat tertarik pada iklan Majalah *Balairung* UGM di harian *Bisnis Indonesia* dan berminat untuk berlangganan majalah *Balairung*. Mohon kiranya saya diinformasikan lebih rinci mengenai majalah tersebut dan cara berlangganannya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Ivan Gunawan
Villa Bintaro Indah E 12/20
Jombang-Tangerang 15414

Surat dari Medika

Membaca iklan di harian *Republika* perihal Majalah *Balairung* kami tertarik.Untuk itu bersama surat ini kami ingin memperoleh informasi tentang periode terbit & harga berlangganan. Jika berkenan mohon kami dapat dikirim majalah tersebut sebagai majalah perkenalan.

Kami juga menerbitkan Jurnal Kedokteran dan Farmasi *Medika*. Apabila ada relasi/mahasiswa yang berminat dengan Majalah *Medika*, kami menawarkan Majalah *Medika* dengan harga khusus.

Demikian permohonan dan penawaran kerjasama kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ujar Muryanto, S.E.
Bagian Umum
Majalah Medika

Ralat

Pada rubrik kesehatan *Balairung* edisi 26/Th.XII/1997 terdapat kesalahan yang sangat mengganggu.

Halaman 70 kolom 3 paragraf 4 dibawah sub judul *Kasus Udin-Marsiyem, untuk mengetahui ...dst.* sampai halaman 71 kolom 1 paragraf 4, *...dan lebih kúat di pengadilan.* dianggap tidak ada.

Boks tulisan halaman 70 pengampu tulisan tertulis *Wuwun Widiawati Pr.* seharusnya *Mora Claramita*. Dengan demikian kesalahan telah dibetulkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.

litbang-redaksi Majalah *Balairung* UGM

adalah sekedar mengingatkan pada kita...*)

.............,

"Sila perikemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan; hak azasi manusia hampir-hampir lenyap, sebab semuanya ditentukan oleh kemauan penguasa. Jaminan dan perlindungan hukum hampir tidak ada, pengamalan Pancasila hanya sekedar sebagai alat untuk kemudian merebut kekuasaan secara mutlak . . ."

"Sila kedaulatan rakyat menjadi kabur; yang ada adalah kedaulatan pemimpin. Sila keadilan sosial makin jauh; sebab kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk proyek-proyek mercusuar yang merusak ekonomi rakyat dan negara."

"Sistem ekonomi, dalam praktek menjadi sistem lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan penguasa."

Hal ini terjadi, karena "Penyelewengan serius terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi dengan memusatnya kekuasaan secara mutlak pada satu tangan, yaitu pada kepala negara. Azas dan sendi negara hukum lambat laun ditinggalkan, sehingga akhirnya menjadi negara yang berdasarkan kekuasaan. Azas dan sendi sistem konstitusi, dalam praktek berubah sehingga bersifat absolutisme...Presiden bukannya tunduk kepada MPR; bahkan sebaliknya MPR yang ditundukkan di bawah presiden."

"Apabila kami dalam kesempatan ini mengemukakan secara terperinci bentuk-bentuk penyelewengan Orde Lama, itu adalah sekedar mengingatkan pada kita, bahwa Orde Baru yang bertekad mengadakan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh, mengadakan penertiban dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak akan mengulangi, tidak terjerumus lagi ke dalam keadaan praktek-praktek yang demikian buruknya itu."

**) bagian dari pidato kenegaraan pertama Presiden Soeharto, 16 Agustus 1967 lalu, dikutip dari X-pos No. 07/I Februari 1998*

Kini,... masih relevankah menghembus-hembuskan dialektika tentang orde lama dan orde baru kepada generasi sekarang dan esok?

iklan layanan ini dipersembahkan oleh Majalah *Balairung* UGM, dalam rangka memperingati 32 tahun kelahiran orde baru

Terima Kasih

kepada:

Prof. Dr. Soekanto Reksohadiprodjo, M.Com.
Dr. A.R. Karseno

A. Budi Purnomo, M.A.
Dr. Ainun Na'im

Dr. Anggito Abimanyu
Hari Sandjojo, S.E.
Tebyan A'maari

atas bantuan yang diberikan pada penerbitan edisi 27 Majalah Mahasiswa *Balairung* UGM

Selamat wisuda kepada:

Fahmi Husein, A.Md.
Mantan Staf artistik SKM *Bulaksumur*

Mora Claramita, S.Ked.
Mantan redaktur tamu Majalah *Balairung*

Amril Buamona, S.IP.
Mantan staf pengkajian dept. PP BPPM UGM

Tatak Prapti Ujiati, S.H.
Mantan reporter *SKM Bulaksumur*

Masduki, S.H.
Mantan sekretaris redaksi SKM *Bulaksumur*

Nugroho Trisnu Brata, S.Sos.
Mantan staf redaksi Majalah *Balairung*

keluarga besar BPPM UGM

...Harga Sembilan bahan pokok naik, situasi politik tidak menentu, ledakan pengangguran, kerusuhan semakin berkembang...

ANDY SENO AJI

Lho katanya rakyat mengharapken adanya sebuah perubahan. Ini kan juga merupaken salah satu daripada perubahan*

*Perubahan ala Soeharto

Umwertung aller Werte:

Melukis Mozaik Indonesia Pasca Soeharto

Krisis panjang yang tidak tahu kapan bertepinya -- mulai dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan terhadap penguasa -- seolah menjadi saksi sejarah bahwa di negeri ini pernah terjadi suatu peristiwa menyakitkan dan menggusarkan rakyat. Sebuah kegelisahan, kepanikan, serta ketakutan sosial yang begitu besar menembus setiap elemen kehidupan bangsa.

Banyak sebab untuk mengurai akar permasalahan sebenarnya, namun **A.H. Nasution** (1978) dalam tulisan renungannya melihat, krisis yang terjadi dalam bangsa Indonesia disebabkan karena makin merosotnya nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah: krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis *gezag*, serta krisis pimpinan, entah krisis apalagi, lebih dikarenakan tidak terbinanya konsistensi perjuangan dalam kondisi yang berlaku dewesa itu.

Meski apa yang dikatakan Nasution merupakan refleksi yang terjadi beberapa tahun silam, namun ada signifikansi kondisi antara saat itu dengan saat sekarang. Ya, sebuah krisis yang sebenarnya muncul disebabkan oleh rezim yang sudah tidak lagi mau mendengar, mengerti, dan acuh terhadap nurani masyarakat bawah, atau dalam bahasa ekstrim, krisis itu terjadi karena adanya pengingkaran, pendustaan, dan pembusukan tujuan perjuangan yang dicita-citakan.

Jika betul demikian, maka untuk lepas dari kemelut, tiada jalan lain kecuali harus berani melakukan sebuah reformasi besar serta total. Atau dalam bahasa Jerman diistilahkan sebagai *Umwertung aller Werte*, yakni; merevisi nilai-nilai yang telah ditanamkan rezim ini selama 30 puluh tahun yang lalu, dan untuk kemudian mengganti dengan nilai-nilai baru. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang ada selama kurun berlakunya Orde Baru, terutama nilai bidang ekonomi dan politik, harus segera diperbaruhi dengan sebuah tatanan konsep yang sesuai dengan permasalahan sekarang dan mendatang.

Karenanya, solusi awal lagi mendesak adalah pergantian kepemimpinan (presiden). Namun, kita sadar bahwa permasalahan sebenarnya negeri ini bukan saja terletak pada pergantian kepemimpinan semata. Tapi yang terpenting adalah bagaimana nasib Indonesia pasca Soeharto mendatang. Untuk itu, mengerti kelebihan dan kekurangan masa lalu atau generasi kemarin untuk arah ke depan merupakan hal yang diperlukan. Sebab, seperti yang pernah ditulis **Erich Fromm** dalam *The Revolution Hope* yang diterjemahkan dalam versi Indoensia *Revolusi Harapan* (1996), bahwa perkembangan yang paling radikal sekalipun, tidak bisa lepas dari masa lalu; kita tidak bisa maju dengan mencampakkan prestasi-prestasi pemikiran manusia masa lalu -- mengandalkan generasi muda saja tidak cukup.

Dalam kerangka keyakinan itu kami mencoba melakukan penelitian (jajak pendapat) lewat *polling* untuk mengerti seberapa jauh kepemimpinan Soeharto selama ini diterima oleh masyarakat. Dengan harapan kaum muda sekarang mampu merefleksikan untuk kemudian merumuskan masalah, tantangan, serta membawa Indonesia masa depan yang lebih tercerahkan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa jauh kaum muda mampu mengerti serta mengapresiasikan pernik permasalahan serta mengukir mozaik Indonesia pasca kepemimpinan Soeharto? Sukar memang untuk memprediksi sebuah dunia yang kita sendiri belum tahu apa yang terjadi saat-saat mendatang. Namun, dengan melihat peta sejarah masa lalu dan kini diharapkan kaum muda sekarang mampu menciptakan sejarah masa depan Indonesia. Sebuah sejarah yang betul-betul utuh muncul dari kreativitas sadar lagi merdeka dari seorang anak bangsa.

Lantas, apa yang dibutuhkan mereka dalam mengemban beban ke depan? Jawabnya adalah kepercayaan. Sebab, dengan ekspresi kepercayaan dalam akal manusia akan lahir kesanggupan untuk memapankan suatu orde sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, serta persaudaraan. Dan kita yakin, bahwa kekurangan kepercayaan adalah ekspresi kebingungan dan keputusasaan yang dalam. Sungguh, tanpa kepercayaan manusia akan menjadi mandul *(sterile)*, tanpa harapan, hingga kemudian takut kepada inti dari permasalahan. *Dus*, berikan kaum muda secercah kepercayaan untuk melakukan *Umwertung aller Werte*. Dan dengan ketulusan yang sangat dalam, kami berterima kasih kepada Pak Haji Mohammad Soeharto, Bapak Pembangunan, yang telah meletakkan salah satu dasar perjalanan sejarah bangsa ini.***

Khoirul Rosyadi
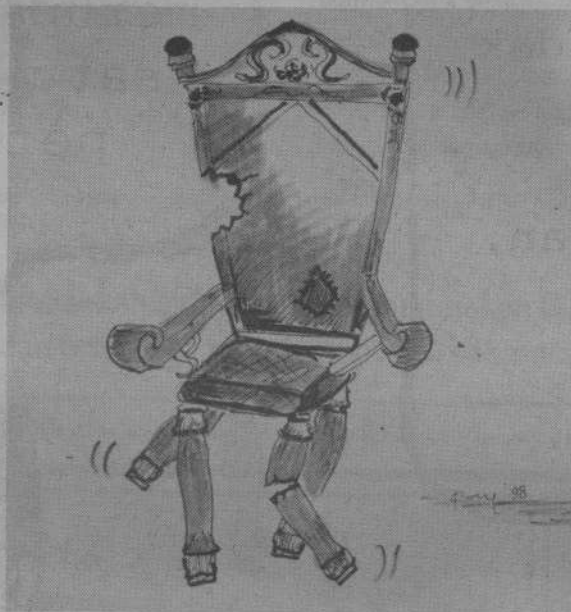
Hasil Jajak Pendapat Balairung:

Mahasiswa UGM Ramai-Ramai Menolak Soeharto

Pengantar Redaksi

Isu seputar suksesi Indonesia 1998 terus menggelinding bagaikan bola salju. Melebar dan semakin membesar sampai pada titik kulminasinya. Mayoritas rakyat Indonesia tentu berharap-harap cemas pada apa yang bakal terjadi dalam Sidang Umum MPR-DPR bulan Maret 1998. Sebuah agenda besar nasional di tengah krisis ekonomi terburuk. Apalagi bursa kursi presiden kali ini tidak hanya "disunyikan" oleh Soeharto seorang, yang notabene jago tua yang dielus-elus oleh semua fraksi, melainkan "diramaikan" oleh 2 calon alternatif pembawa pesan-pesan perubahan yang didukung sebagian arus bawah. Amien Rais dan Megawati Sukarnoputeri. Keduanya menyatakan siap menjadi presiden bila memang dikehendaki rakyat.

Bagaimana sikap politik mahasiswa UGM terhadap suksesi 1998? Bagaimana apresiasi mereka terhadap kepemimpinsn Soeharto? Siapa presiden Indonesia 1998-2003 pilihan mahasiswa UGM? Untuk menjawab persoalan ini Litbang dan redaksi Majalah Balairung melakukan jajak pendapat dengan populasi mahasiswa UGM.

Mengingat banyaknya kritik soal cacat metodologi dari polling yang dilakukan sebelumnya oleh *Balairung* maupun lembaga lain, maka persoalan metodologi benar-benar kami prioritaskan. Hal itu bisa dipahami karena metodologi berkaitan erat dengan validitas hasil dan rekomendasi yang mungkin diajukan.

Pada tingkat kepercayaan 95%, kami mengambil sampel secara *systematic sampling* sebanyak 600 orang dari daftar seluruh mahasiswa UGM berbagai jenjang (setara S1, ekstensi dan D3) yang berjumlah 32.383 orang. Dari sampel sebanyak itu, responden yang bisa dijaring sebanyak 391 orang. Sehingga, *sampling error*-nya 4,9%. Responden terpilih yang tak bisa ditemui lebih disebabkan oleh kesulitan teknis, seperti ketidakjelasan alamat responden.

Heraklaitos boleh berkata Pantarei, Pantarei! Peristiwa mengalir tanpa kendat seperti air. Musim datang silih berganti, sebagaimana peristiwa-peristiwa, generasi datang dan pergi, menteri kabinet, parlemen, lurah, rektor, dsb. Namun postulat "mengalir tanpa kendat" ini untuk sementara tidak berlaku dalam kasus presiden Republik Indonesia kedua. Sebuah jabatan yang nyaris *untouchable* oleh tangan-tangan perubahan. Selama usia Orde Baru Soeharto terpilih menjadi presiden sebanyak 6 kali berturut-turut. Luar biasanya lagi, ia selalu diangkat MPR sebagai calon tunggal. Tanpa rival.

Kenyataan ini tentu berakar demikian dalam di benak kaum muda, mahasiswa UGM sebagai responden. Mereka adalah generasi yang semenjak *orok* sampai besar menjadi mahasiswa hanya mengalami satu orang presiden. Maka tak heran bila *polling* membuktikan bahwa secara emosional Soeharto tetaplah dianggap sebagai pemimpin yang dekat di hati rakyatnya (59,5%).

Mayoritas responden (41,9%) juga menyatakan kebanggaannya memiliki Soeharto sebagai presiden Indonesia, meski 27% di antaranya *abstain*. Kenyataan, bahwa ketiadaan komparasi selain Soeharto tentu menjadi variabel penting. Sebab mereka memang tidak mengalami jaman kepemimpinan Soekarno maupun kepemimpinan post-Soeharto yang memungkinkan perbandingan penilaian.

Namun sejauh mana sikap politik dan apresiasi kritis mahasiswa UGM bisa diukur bilamana mereka disuruh menilai terpilihnya Soeharto sebagai presiden? Apakah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto juga sesuai keinginan rakyat?

Kebanggaan dan kedekatan Soeharto di hati rakyat boleh jadi masalah cita-rasa (emosional) yang terpola sekian lama. Sedang kritisisme atau apresiasi yang tersaring secara kognitif menampilkan fakta lain. Dalam *polling* terbukti bahwa ternyata mahasiswa UGM menilai, sesungguhnya rakyat tidak benar-benar menginginkan terpilihnya Soeharto sebagai presiden (44,4%). *Dus*, sebuah pemerintahan yang tidak aspiratif?.

Ratio ketidakpercayaan pun menjadi wajar kiranya, bila dari turunan angka di atas kemudian melebar pada kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan Soeharto selama ini juga dinilai tidak sesuai dengan keinginan rakyat (47,1%). Hanya 22,5% responden yang menyatakan pemerintahan Soeharto aspiratif. Sementara 18,1 tidak tahu, serta12,3% *abstain*.

Sedangkan menyoroti gaya

Apakah Soeharto pemimpin yang dekat di hati rakyat Indonesia?

59,5%	ya
22,2%	tidak
11,3%	tidak tahu
7,0%	tidak menjawab

N=388

kepemimpinan Soeharto sebagai orang pertama di pucuk eksekutif, lagi-lagi responden menyatakan 42,1% tidak sesuai harapan, 26,7% menyatakan sesuai harapan, 14,9% tidak tahu, serta 16,2% *abstain*.

Sampai di sini, penggalian pendapat dari mahasiswa UGM lewat dua pintu, emosi dan kognisi, terhadap sosok kepemimpinan Soeharto dapat disimpulkan menjadi lebih transparan. *Polling* menunjukkan dua indikasi. *Pertama*, secara emosional mahasiswa UGM berpendapat bahwa Soeharto adalah seorang pemimpin yang dekat di hati rakyatnya dan mereka bangga atas kepemimpinannya. *Kedua*, dalam tataran kognisi, tentang terpilihnya Soeharto sebagai presiden, aspiratif dan tidaknya pemerintahan Soeharto, serta gaya kepemimpinan Soeharto, mayoritas mahasiswa UGM menilai negatif.

Adakah apresiasi ini menjadi satu cerminan sikap politik mahasiswa UGM yang coba mempertanyakan ulang legitimasi kepemimpinan

Apakah rakyat benar-benar menginginkan Soeharto menjadi presiden lagi?

44,4%	tidak
28,6%	tidak tahu
16,8%	ya
10,2%	tidak menjawab

N=381

Soeharto? Bilamana benar demikian, patut kiranya menjadi catatan penting adanya pemaknaan ulang atas lahirnya sebuah legitimasi suatu kekuasaan yang pada dasarnya tidak *legitimated*.

Raport Soeharto Banyak yang Jeblok?

Runtutan pemaparan di atas merupakan apresiasi seputar legitimasi kekuasaan yang sudah berlangsung selama ini. Ada baiknya kita tengok apresiasi mahasiswa UGM terhadap produk nilai, yakni sistem, kondisi dan seputar pencapaian kekinian, dari proyeksi cita-cita proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Bagaimana penilaian mahasiswa UGM terhadap kepemimpinan Soeharto selama kurun waktu kekuasaannya atas Republik Indonesia ini?

Hasil *polling* menunjukkan, prestasi Soeharto mendapat kredit point yang cukup baik dalam empat hal. *Pertama*, Soeharto dinilai berhasil meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia (63,4%). *Kedua*,

Apakah kebijakan pemerintahan Soeharto selama ini dinilai sesuai keinginan rakyat?

47,1%	tidak
22,5%	ya
18,1%	tidak tahu
12,3%	tidak menjawab

N=382

Amien Rais dan Kerinduan itu

Bulan-bulan ini agaknya memang milik Amien Rais. Namanya "naik daun" sejak ditodong Permadi untuk berani mencalonkan diri sebagai presiden RI 1998-2003, pada sebuah dialog di kantor YLBHI Jakarta, akhir tahun silam.

Pencalonannya itu kontan saja telah meluluhlantakkan tradisi *suksesi dua pintu* di mana pembicaraan tentang suksesi selalu dihindari dan dibelokkan pada polemik tentang wakil presiden.

Amien sendiri jauh sebelumnya berada pada barisan kelompok garis lunak dalam peta politik negeri ini. Sehingga, keberaniannya mengalirkan simpati kalangan pro-demokrasi.

Demikianlah, sementara dukungan terus mengalir, popularitas Amien terus menggelembung, terutama di kalangan muda. Setidaknya, ini terlihat pada hasil *polling* Majalah *Balairung*.

Polling menunjukkan, Amien Rais adalah calon presiden yang paling didambakan mahasiswa UGM jika Soeharto tidak "mengangkat diri"nya kembali (47,1%). Di belakangnya, terdapat nama Try Sutrisno (23,0%), Megawati Soekarnoputri (10,6%), BJ Habibie (7,3%), Abdurrahman Wahid (3,9%), Sri Bintang Pamungkas (1,5%) serta lain-lain (6,0%). Di antara 'lain-lain' ini, terdapat nama Ginanjar Kartasasmita, Mar'ie Muhammad, Rudini, Hartono, dan Dr Ir AM Syaefuddin.

Pilihan terhadap Amien Rais ini tak lepas dari kerinduan mereka akan munculnya presiden baru. Maklum, mereka adalah generasi yang hidup dan besar pada masa rezim Soeharto. Padahal, pada kalangan ini, popularitas Soeharto ambruk dengan nilai *raport* yang *jeblok* (*lihat*: **Ramai-Ramai...**).

Maka wajar jika mayoritas dari mereka yang terdidik ini (70,3%) menolak pengangkatan kembali Soeharto. Sementara itu, memang masih saja ada mahasiswa yang setuju bila Soeharto dipilih kembali, meski angkanya cukup kecil (14,0%). Mereka yang berorangtuakan ABRI/ purnawirawan 36,4% menyatakan setuju dengan pencalonan Soeharto, 54,5% menolak, dan 9,1% *abstain*. Sebagai perbandingan, mahasiswa yang

Bagaimana gaya pemerintahan Soeharto selama ini?

42,1%	tidak sesuai harapan
26,7%	sesuai harapan
16,2%	tidak menjawab
14,9%	tidak tahu

N=382

kepemimpinannya dianggap berhasil membangun prasarana fisik kehidupan rakyat (62,2%). *Ketiga*, keberhasilan Soeharto paling banyak mendapat nilai pada peran sertanya dalam memelihara perdamaian dunia (75,0%). Dan *keempat*, Soeharto dipandang sukses menjaga stabilitas nasional yang mantap dan terkendali (45,2%).

Dari ketiga penilaian keberhasilan tersebut, tak lain dari prestasi istimewa Orde Baru sebagai orde yang lebih banyak menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Kemajuan yang dicapai pembangunan nasional menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Pembangunan prasarana fisik dan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, yang berekor juga pada taraf pendidikan rakyat, tak lain dari kepeloporan Soeharto yang kemudian melekatkan dirinya sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Seorang pemimpin dari sebuah negara berkembang yang menjadikan pembangunan sebagai agenda besar nasional.

Apakah kepemimpinan Soeharto berhasil memberantas praktek korupsi dan kolusi dalam birokrasi pemerintahan?

86,4%	tidak setuju
6,2%	tidak tahu
5,4%	tidak menjawab
2,1%	setuju

N=389

Keberhasilan kepemimpinan Soeharto yang juga dinilai lebih adalah di bidang politik luar negeri, khususnya peran sertanya dalam ikut menjaga ketertiban dunia. Kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif, yang diwujudkan dengan peran-peran penting di tingkat internasional semisal pengiriman pasukan perdamaian Bosnia Herzegovina dan kedaulatan Suku Moro di Filipina, menjadi catatan penting prestasi Indonesia di mata internasional.

Pada bagian lain, Soeharto dianggap berhasil menjaga stabilitas nasional yang mantap dan terkendali. Maraknya aksi kerusuhan SARA dan non SARA yang dimulai sejak paruh akhir 1996, agaknya luput dari perhatian mereka.

Pencapaian penting tersebut ternyata tidak diikuti pencapaian di bidang lainnya. Tercatat, dalam penilaian mahasiswa UGM, terdapat 6 bidang yang masuk dalam kategori *jeblok* nilainya.Yakni, kepemimpinan Soeharto tidak berhasil mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia (49,2%). Ia juga dinilai gagal dalam kaderisasi kepemimpinan nasional (61,1%), dan tidak berhasil dalam upaya

Apakah kepemimpinan Soeharto berhasi melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945?

69,6%	tidak setuju
11,9%	tidak mrnjawab
10,3%	setuju
8,2%	tidak tahu

N=388

berorangtuakan wiraswasta, 72,2% menolak Soeharto, 17,7 setuju, 10,3% *abstain*.

Yang cukup mengejutkan dari hasil polling ini adalah prosentase mahasiswa yang *abstain*. Untuk setiap pertanyaan, angka *abstain* berkisar antara 4,1%-27%. Ketika ditanya apakah mereka bangga punya presiden seperti Soeharto, 27% *abstain*. Angka *abstain* yang juga cukup besar adalah ketika mereka ditanya tentang berhasil-tidaknya kepemimpinan Soeharto. Walaupun 43,0% mahasiswa UGM menilai Soeharto berhasil dan 23,6% mengatakan "tidak", namun 24,1% menyatakan *abstain*. 9,2% sisanya mengaku "tidak tahu".

Meski membutuhkan penelitian lebih lanjut, situasi sosial-politik represif ---yang membuat banyak orang takut untuk bicara politik---, agaknya bisa menjelaskan mengapa mereka *abstain*.

Pada bagian lain, mereka yang menolak Soeharto (70,3%), memiliki kerinduan akan munculnya presiden baru yang membawa angin perubahan (60,51%). Alasan lain, ketuaan Soeharto sangat diragukan untuk mampu memimpin negeri ini sampai 2003 (35,71%). Sedangkan 3,78% lainnya beralasan, Soeharto tidak cukup dekat dengan rakyat.

Di sisi berseberangan, mahasiswa UGM yang setuju diangkatnya kembali Soeharto sebanyak 14,0%. 47,17%. dari mereka beralasan *"Demi Pembangunan Nasional"*. Propaganda yang kerap diucapkan pejabat pemerintah Indonesia itu terbilang sukses mencuci otak, bahkan pada kalangan mahasiswa sekalipun. Di mata mereka yang punya alasan ini, pembangunan nasional yang dinakhodai Soeharto dianggap berhasil. Resesi yang terjadi saat ini ---salah satunya dipicu oleh depresiasi rupiah terhadap dollar AS dan fluktuasinya yang tak menentu---, mungkin tak pernah terbetik di benak mereka.

Demikian halnya dengan *"Belum Ada Pengganti yang Layak"*. Apologi yang acap dilisankan kelompok konservatif untuk menghindari pencalonan presiden di luar Soeharto ini, juga bisa dikatakan berhasil mem-*brainwashing* mahasiswa. Mereka yang memakai apologi itu sebagai alasannya mendukung Soeharto sebanyak 35,8%. Sedangkan 16,98% lainnya punya alasan unik: Soeharto adalah pemimpin kharismatik.***

Asep Mulyana
bersama tim riset Balairung

Apakah anda setuju bila Soeharto dipilih kembali dalam Sidang Umum MPR 1998?

70,3% tidak
15,8% tidak menjawab
14,0% ya
N=387

menegakkan kepastian hukum (*rule of law*) (69,5%).

Berkaitan dengan dua pasal proyeksi dalam UUD 1945,

Soeharto diharapkan dipilih kembali karena:

47,17%	Demi kelangsungan pembangunan
35,84%	Belum ada pengganti yang layak
16,98%	Soeharto pemimpin kharismatik

N=53

kepemimpinan Soeharto dinilai gagal dalam melaksanakan amanat pasal 28 UUD 45, "kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" (69,3%). Sedang dalam pertanyaan apakah kepemimpinan Soeharto berhasil dalam melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sebanyak 69,6% mengatakan tidak setuju. Hanya 10,3% responden mengatakan setuju, 11,9% *abstain*, 8,25% tidak tahu.

Adapun penilaian paling buruk diberikan mahasiswa UGM dalam hal ketidakberhasilan Soeharto dalam hal upaya mewujudkan *clean goverment*, yakni memberantas praktek korupsi dan kolusi dalam jajaran birokrasi kekuasaannya (86,4%).

Dengan nilai *raport* yang demikian *jeblok*, mau tidak mau telah melahirkan penilaian yang cukup logis bila kepemimpinan Soeharto dan pemerintahannya tidak populer lagi di mata mahasiswa UGM.

Adapun puncak dari penilaian ini adalah; mayoritas mahasiswa UGM (70,3%) menyatakan tidak setuju bila Soeharto dipilih kembali sebagai presiden Republik Indonesia dalam sidang umum MPR 1998. Sementara 14,0% responden menyatakan setuju dan 15,8% responden tidak menjawab.

Presiden Indonesia 1998-2003 pilihan mahasiswa UGM

Amien Rais	47,1%
Try Sutrisno	23,0%
Megawati Soekarno.P	10,6%
BJ Habibie	7,3%
Abdurrahman Wahid	3,9%
Sri Bintang Pamungkas	1,5%
Siti Hardiyanti Rukmana	0,6%
Lain-lain	6,0%

N=331

Menilik angka mayoritas di atas, temuan fakta yang menyatakan ketidaksetujuan dipilihnya kembali Soeharto dalam Sidang Umum MPR 1998, tentunya memiliki variabel penting dengan kondisi Indonesia kontemporer.

Apakah kepemimpinan Soeharto berhasil dalam kaderisasi kepemimpinan nasional?

61,1% tidak setuju
16,2% setuju
11,9% tidak tahu
10,8% tidak menjawab
N=388

Badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, ternyata tak gampang berlalu. *Dus*, bangkrutnya sendi-sendi ekonomi nasional yang menimpa kehidupan rakyat ramai se-Indonesia raya ini, kiranya telah meluluhlantakkan satu-satunya dalil kebanggaan Orde Baru: stabilitas ekonomi dan pembangunan.

Kenyataan lain, seiring gejala alamiah dengan makin *uzur* dan kian senjanya usia Soeharto, tentu mengombakkan sekian banyak kekhawatiran di kalangan muda berkenaan dengan *stamina* kepemimpinannya dan masa depan negara-bangsa ini. Fenomena munculnya tokoh-tokoh nasional yang marak akhir-akhir ini, taruhlah kesediaan Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah) dan Megawati Sukarnoputeri (Ketua PDI hasil Munas 1993) mencalonkan diri sebagai presiden, pantas kiranya bila percaturan baru ini memberi pengaruh kuat terhadap sikap politik dan opini mahasiswa UGM yang ramai-ramai menolak Soeharto. Yakni, Kerinduan akan perubahan dan presiden baru!***

Presiden Soeharto diharapkan tidak dipilih kembali karena:

60,51%	Merindukan presiden baru
35,71%	Soeharto sudah tua
3,78%	Soeharto tidak dekat dengan rakyat

N=238

Prabowo
bersama tim riset Balairung

Mengontrol Kekuasaan Presiden: Revisi UUD 1945!

Pernyataan "Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Tidak Tak Terbatas" dalam UUD 1945 sudah tidak lagi berlaku. UUD 1945 yang selalu diagungkan itu ternyata menjadi pemicu besarnya kekuasaan lembaga kepresidenan. Hanya satu cara yang bisa dilakukan: Perbaiki UUD 1945!

Kekuasaan Presiden Tidak Tak Terbatas. Demikian satu pernyataan yang sering didengungkan ketika mahasiswa mengikuti kuliah Pancasila. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, memang demikian adanya.

Jika lebih disederhanakan, maka pernyataan tersebut akan mengandung arti bahwa kekuasaan presiden terbatas. Namun, term "terbatas" di sini belum secara operasional terdefinisikan.

Menjawab kebingungan ini, kita akan terbentur pasal 7 UUD 1945. Pasal ini menyatakan, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali".

Pernyataan "dapat dipilih kembali" inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa di Republik ini, Presiden dapat memimpin berkali-kali. Padahal, menurut seorang guru besar UI, Deliar Noer, pasal 7 itu harus dipahami bahwa presiden memang dapat dipilih kembali, namun hanya sampai dua periode saja.

Penafsiran serupa juga diungkap Mochtar Pabotinggi. "Tidak boleh ada satu warga negara yang didewakan. Ada batas! Ada salah satu hukum politik yang menyatakan kalau seseorang berkuasa terlalu lama, dan terlalu berpusat kekuasaan padanya, itu akan menjadi monopolistik dan sangat tidak bagus," katanya.

Inkonstitusional

Menilik kembali bagaimana presiden berkuasa dapat dilihat pada peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Peralihan tersebut terjadi secara inkonstitusional.

Seyogyanya presiden dipilih MPR pada Sidang Umum berdasarkan suara terbanyak. Meski masih diperdebatkan, ada anggapan kuat bahwa pada transisi kepemimpinan waktu itu, telah terjadi manipulasi wewenang Surat Perintah Sebelas Maret. Presiden Soekarno memang memberikan Supersemar, namun surat itu sebenarnya hanya memberikan mandat untuk memulihkan keadaan yang pelik. Soeharto kemudian memahaminya sebagai pemindahan kekuasaan. Inilah yang menguatkan asumsi bahwa suksesi waktu itu menunjukkan pergantian kekuasaan secara inkonstitusionil.

Tak Terbatas

Saat ini lembaga kepresidenan menjadi sangat tidak terbatas (baca: tidak terkontrol). Ini didukung oleh pasal-pasal dalam UUD 1945 yang secara transparan memberikan porsi peran yang besar bagi lembaga ini.

Selain memiliki kekuasaan eksekutif, Presiden juga memiliki kekuasaan yudikatif sekaligus legislasif. Kekuasaan eksekutif tercermin pada pasal 5 ayat 2 tentang penetapan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU dan pasal 17 ayat 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian para menteri.

Sementara Pasal 14 tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi secara terang-terangan memberikan mandat yudikatif kepada Presiden. Kekuasaan Presiden dalam urusan Legislasi terlihat dari keterlibatan Presiden yang sangat besar dalam proses pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Penegasan tentang ini terlihat pada UUD 1945 pasal 5 ayat 1 tentang pembentukan UU bersama-sama DPR,

pasal 21 ayat 2 tentang pembatalan RUU yang disetujui DPR, pasal 22 tentang penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti UU, dan pasal 23 ayat 1 tentang pengajuan RAPBN.

Ini belum ditambah hak-hak prerogatif lainnya seperti hak untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, damai, dan mengangkat duta besar.

Mengguritanya kekuasaan Presiden akibat longgarnya UUD 1945 ini dibenarkan mantan anggota DPR/MPR RI, Sabam Sirait. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara di belahan dunia mana pun terlihat bahwa kekuasaan Presiden di Indonesia sangat besar. Selain berperan sebagai kepala negara, Presiden juga memainkan fungsi sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri, panglima tertinggi militer, serta "mandataris MPR".

Dari perspektif lain, Mochtar Pabottinggi menjelaskan bahwa keadaan yang ada sekarang tak lepas dari diberlakukannya "keadaan darurat" selama kurang lebih 30 tahun belakangan ini. Bangsa Indonesia mewarisi keadaan yang tidak normal. Sehingga kepekaan terhadap masalah-masalah yang timbul saat ini menjadi hilang (tumpul).

Salah seorang staff pengajar fakultas hukum Universitas Islam Indonesia menambahkan bahwa kuatnya lembaga eksekutif ini memang sudah tercetak sejak tahun 1966. "Dulu memang diperlukan suatu strategi untuk menguatkan eksekutif. Kita perlu karena ada unsur PKI yang harus dibersihkan. Lalu dibentuk sistem kuat yang memberi peluang kepada eksekutif untuk berperan banyak. Maksudnya waktu itu sebenarnya untuk sementara," ungkapnya.

Dengan latar belakang "keadaan darurat" itu, lembaga kepresidenan kemudian menampakkan dirinya sebagai pelindung stabilitas pemerintahan. Untuk itu dibuatlah posisi yang sentral bagi Presiden.

"Stabilitas pemerintahan ini dioperasionalkan secara sangat sempit. Undang-undang politik semuanya disusun dengan arah stabilitas posisi kepala negara. Menjadilah kepala negara, siapapun yang menjadi kepala negara dengan sistem peraturan dan praktek perundangan seperti ini menjadi sangat istimewa. Sangat monopolistis," tegas Pabottimggi.

Pertanyaannya kemudian mengapa posisi lembaga kepresidenan bisa sedemikian kuat?

Menjawab pertanyaan ini, terang Mochtar Pabottinggi, sedikitnya ada dua hal yang dapat dijadikan jawabnya. *Pertama*, lembaga kontrol di negeri ini tidak berjalan secara wajar. Menurut Pabottinggi, ini terjadi karena ketimpangan posisi yang terjadi antara lembaga tinggi negara lainnya dengan kepresidenan. Bahkan, ketimpangan itu telah sampai pada tingkat terminologi yang dipakai. "DPR berdewan dan MPR bermajelis, sebenarnya lebih menyantuni kemauan kekuasaan karena memang diteknikkan atau direkayasa seperti itu," ungkap Mochtar Pabottinggi

Kedua, jika ditilik lebih lanjut isi undang-undang terdapat banyak pasal yang akhirnya memperkuat posisi lembaga kepresidenan. Apalagi ketika presiden mengeluarkan 5 paket UU Politik. Paket ini sendiri terdiri dari UU No.1/ 1985 tentang Pemilu, UU No. 2/1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/ DPR, UU No. 3/1985 tentang Parpol dan Golkar, UU No. 5/ 1985 tentang referendum, serta UU No. 8/ 1985 tentang keormasan. 5 paket UU Politik ini, pada gilirannya mendapat *feedback* dari berbagai kalangan agar paket ini dicabut.

Aprilina

Moch. Pabottinggi

Belakangan ada suatu upaya dari pihak eksekutif untuk menghidupkan kembali Ketetapan MPR No. VI/ MPR/ 1988 tentang pelimpahan wewenang MPR kepada Presiden/Mandataris MPR guna melakukan tindakan penyelamatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Tap MPR ini pernah dibekukan oleh Wahono, ketua DPR/ MPR saat itu. Namun pada pertengahan 1997, wacana publik diramaikan oleh rumor bahwa Tap ini akan kembali diberlakukan.

Dengan Tap MPR No. VI/MPR/1988 ini, kekuasaan Presiden --dengan mengatasnamakan mandataris MPR-- secara mutlak benar-benar tidak lagi terkontrol. Ia bisa melakukan tindakan apapun dengan alasan menyelamatkan Pancasila dan Konstitusi 1945.

Tentang hal ini, advokat senior Adnan Buyung Nasution mengungkapkan, ada dua hal yang menyebabkan Presiden bertindak demikian. "*Pertama*, mungkin dikarenakan adanya perasaan *insecure*, perasaan tidak aman terhadap kekuasaannya sehingga harus membungkam siapa saja yang melakukan kritik dan koreksi. *Kedua*, karena presiden mau ada perubahan sehingga perlu ada senjata untuk melakukan perubahan-perubahan," tutur mantan Ketua YLBHI ini.

Merevisi UUD

Jalan yang bisa ditempuh adalah mengefektifkan mekanisme kontrol terhadap lembaga kepresidenan. Dan cara untuk itu adalah memperbaiki UUD 1945!

Mengapa demikian? Seperti terurai di atas, UUD 1945 secara transparan memberi peluang yang besar pada lembaga kepresidenan untuk mengembangkan kekuasaannya secara tidak terbatas.

Hal ini setidaknya diungkap Buyung Nasution. Menurutnya, kekuatan personal lembaga kepresidenan saat ini telah didukung oleh UUD 1945 yang telah memberi peluang terhadap bentuk hegemoni kekuasaan. Selain itu, proses politik yang terjadi --di mana negara cukup kebal terhadap *feedback* dari masyarakat-- membuat kekuasaan pemerintah yang dikomandoi lembaga kepresidenan semakin kuat. Sehingga, kendali negara ada di tangan lembaga kepresidenan.

Namun, memperbaiki UUD 1945 bukan pekerjaan mudah. Apalagi Orde Baru selalu menanamkan pemikiran yang salah kaprah bahwa UUD 1945 sesuatu yang sakral, dan

tidak boleh diutak-atik. Alasannya, mengutak-atik konstitusi bisa dianggap mengutak-atik negara.

"Kalau orang tidak mau melakukan perbaikan terhadap UUD 1945 berarti ia telah me*mumi*kan undang-undang. Memperlakukan Undang-undang sebagai mumi. Mumi tidak lain adalah barang mati," jelas Mochtar Pabottinggi kepada *Balairung*.

Adalah naif, lanjut Pabottinggi, jika orang tetap mempertahankan bunyi, huruf dan pasal dalam UUD 1945. "Semua undang-undang ini hidup memerlukan perubahan-perubahan, bukan mengganti tetapi memperbaiki dan menyempurnakan terus," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Soemantri. Rektor Universitas Tujuhbelas Agustus (Untag) Jakarta ini mengatakan, kekuasaan Presiden dapat dibatasi dengan satu cara, yaitu mengubah UUD 1945. "Alternatif lain Tap MPR bisa dijadikan instrumen untuk mengatur jabatan Presiden," ungkapnya

Tentang Tap MPR sebagai bentuk solusi lain, Buyung Nasution dalam sebuah Panel Forum Lembaga Kepresidenan menjelaskan, penyempurnaan berupa amandemen terhadap sejumlah pasal UUD 1945 dapat berbentuk Ketetapan MPR.

Menurut catatan Buyung, sedikitnya ada enam Tap MPR yang diperlukan. *Pertama,* Tap MPR tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi, paling banyak, dua periode. Dan lama satu periode adalah lima tahun. Tap MPR ini sebagai bentuk penyempurnaan Pasal 7 UUD 1945.

Kedua, Tap MPR yang mengatur masalah pertanggungjawaban presiden. Selama ini presiden mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai mandataris kepada MPR yang baru terbentuk. Dengan mekanisme ini, tidak mungkin MPR yang baru terbentuk itu menggugat pertanggungjawaban Presiden. Untuk itu perlu dibuat Tap MPR yang mengatur agar pertanggungjawaban Presiden dilaporkan kepada MPR lama yang mengangkatnya.

Ketiga, Tap MPR yang mengatur ketentuan pasal 14 UUD 1945 -- kewenangan Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi-- tidak dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Yaitu, ketika Presiden sendiri, keluarganya, atau pembantu-pembantunya melakukan pelanggaran hukum.

Keempat, Tap MPR yang mengatur tentang ketentuan hak menguji materiil terhadap suatu produk UU, yang dihasilkan oleh Presiden bersama DPR.

Kelima, Tap MPR yang mengatur masalah perjanjian luar negeri yang menimbulkan utang bagi negara. Tap ini mengatur bahwa setiap pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah harus memperoleh ratifikasi dari DPR.

fatkur

Adnan Buyung. N

Keenam, Tap MPR yang mengatur Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Hak Asasi Manusia, sebagai penyempurnaan terhadap pasal 27 s.d 34 UUD 1945.

Kembali menyoal pembatasan masa jabatan Presiden, ada satu kemungkinan untuk mengontrol kekuasaan lembaga kepresidenan. Yaitu, memasukkan bahasan khusus tentang pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Namun, upaya memperbaiki UUD 1945 akan terbentur pada mekanisme legal-formal dan hambatan struktural.

Setidaknya, hal ini disinyalir oleh Pabotinggi. "Undang-undang dihasilkan oleh Badan Eksekutif atau Legislatif. Nah, yang mengangkat legislatif itu siapa? Itu prosedurnya sudah seperti lingkaran setan. Eksekutif yang nantinya menikmati hasil regulasi tersebut," tegasnya.

Berkenaan dengan itu, mantan menteri Dalam Negeri Rudini, dalam sebuah bukunya yang mengkaji Lembaga Kepresidenan berasumsi, untuk kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun mendatang, kekuasaan dan wewenang Lembaga Kepresidenan RI tetap bersumber pada UUD 1945.

"Namun saya juga tidak menutup mata terhadap beberapa pihak yang berpendapat bahwa justru UUD 1945-lah yang telah memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada badan eksekutif, sehingga (UUD 1945) dituduh sebagai penyebab lahirnya pemerintahan yang cenderung otoriter," kata Rudini yang sekarang menjabat direktur Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).

UU Kepresidenan

Untuk mengontrol kekuasaan lembaga kepresidenan, belakangan muncul solusi lain yang tak kalah menarik. Yaitu, usulan tentang dibuatnya satu UU yang secara khusus mengatur lembaga kepresidenan.

Kontan saja, usulan ini menyulut polemik. Deliar Noer yang sempat menjadi salah seorang staf pribadi Soeharto mengatakan, UU Kepresidenan tidak perlu ada. Alasannya, pasal 7 UUD 1945 telah mengatur hal tersebut.

Namun, S. Toto Pandoyo dalam tulisanya, *Tidak tak Terbatas: Kajian atas Lemnbaga Kepresidenan* (1997) mempertanyakan tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga kepresidenan. Padahal menurut catatan Pandoyo, semua lembaga tinggi dan bahkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, telah diatur dalam undang-undang.

Lebih Lanjut, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM ini menilai, usulan tentang perlunya pengaturan lembaga kepresidenan oleh satu undang-undang adalah hal yang wajar. "Tujuannya agar fungsi, wewenang, tugas, serta hak dan kewajibannya dapat dirinci secara jelas dan transparan," demikian Pandoyo.

Penegasan tentang perlunya UU tentang lembaga kepresidenan juga diungkap Sabam Sirait. "Yang belum diatur lebih rinci dalam UU tentang kekuasaannya adalah lembaga kepresidenan," katanya.

Setelah kurun waktu selama kurang lebih 30 tahun Bangsa Indonesia berada pada 'keadaan darurat'. Kini saatnya untuk melakukan perubahan.

Changes is a must. ***

Aprilina Prastari
ajianto, melani,andi, udin,
rosyadi,yayah,kukuh

Kalau Mau Pasti Bisa

**Seorang Mitra Lingkungan percaya, kerusakan bisa dicegah.
Udara, air, dan tanah bisa dijaga dari pencemaran.
Hutan bisa dilindungi dari api, sungai diusahakan, makin jernih,
tanah dibuat kian subur, dan udara dibikin tambah segar.
Seorang Mitra Lingkungan yakin kalau mau pasti bisa.
Bisnis dan industri di Indonesia sedang membuktikannya.
Silakan bergabung dengan Dana Mitra Lingkungan.**

TANRI ABENG	MARIA WONGSONAGORO	EKA BUDIANTA
Ketua Dewan Penyantun	Ketua Pengurus Harian	Direktur Eksekutif

Jadilah Mitra Lingkungan

PARTISIPASI ANDA DAPAT DISALURKAN MELALUI:
Bank Niaga, Graha Niaga, Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta.
Nomer Rekening: 041-1677-8 a/n DANA MITRA LINGKUNGAN
Sekretariat: Jalan Mampang Prapatan VI-41, Jakarta 12790
Telepon (021) 794-5104 Fax (021) 794-5116

***Iklan Layanan Masyarakat ini Hasil Kerjasama *Balairung*, Majalah Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan Buletin Mitra Lingkungan PANCAROBA, terbitan Dana Mitra Lingkungan**

Lima Agenda Kaum Muda Pasca Soeharto

"Beri aku sepuluh pemuda yang mempunyai semangat menyala-nyala, maka akan kurubah dunia"

(Soekarno)

Dalam sejarah revolusi Indonesia, keterlibatan kaum muda dalam pembentukan *nation building* sangat terasa artinya sampai saat ini. Kaum muda dengan semangat menggelora, idealisme yang tinggi, mampu membakar semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, menyingkirkan kolonialisme dari tanah air.

Keterlibatan itu dimulai dengan sumpah kaum muda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang terkenal dengan "Soempah Pemoeda". Tokoh-tokoh muda seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, saat itu mampu merangkul generasi seusianya untuk terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan.

buku Manusia dalam kemelut Sejarah

Anak muda dahulu menuntut perubahan

Orang-orang muda ini tidak hanya bergerak berdasar rasa kasihan terhadap nasib rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan tetapi karena sadar bahwa kolonialisme harus disingkirkan.

Tokoh-tokoh muda pergerakan awal tahun 1920-an inilah yang meletakkan dasar persatuan dan kemudian menjadi *founding fathers* negara yang bernama Indonesia.

Peran generasi muda kembali terlihat tatkala bangsa ini di ambang kemerdekaan. Generasi muda, yang dipelopori Sukarni dan kawan-kawan, mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mereka menuntut kemerdekaan Indonesia harus dicanangkan saat itu.

Desakan kaum muda inilah yang membuat Soekarno dan Hatta lantas membacakan teks proklamasi untuk menandai lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan.

Bila ditilik dari kesejarahannya, berdirinya Orde Baru sesungguhnya tak lepas dari peran generasi muda juga. Ambruknya Orde Lama yang digantikan Orde Baru tidak lepas dari peran mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI, KAPI, dan KAPPI. Mereka menuntut dibubarkannya pemerintahan Soekarno, yang dianggap otoriter dan membela komunis. Meskipun, harus diakui pula bahwa peran generasi muda 66 tidak lepas dari campur tangan militer, khususnya Angkatan Darat.

Demikianlah, sejarah telah mencatat

betapa anak muda dengan segala kekuatannya selalu terlibat dalam setiap perubahan. Itu pula yang lantas memunculkan mitos anak muda sebagai simbol *agent of change,* idealisme tinggi, semangat yang tak pernah padam, dan memiliki visi yang jernih terhadap perjuangan kemanusiaan.

Mitos itu kemudian memunculkan semacam *image* bahwa setiap perjuangan membebaskan diri dari penindasan harus dimulai dari kaum muda, terutama kalangan mahasiswa yang terlibat dalam organisasi-organisasi pergerakan kemahasiswaan. Karena merekalah kelompok yang masih berenergi penuh, jauh dari kepentingan atau tendensi tertentu, dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Selain itu karena mau tak mau tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang akan dipegang oleh generasi muda.

Nurdianto

Kaum muda dipayungi lima agenda permasalahan

Namun semangat menggelora yang ada dalam diri anak muda terkadang hanya bersifat emosional, reaksioner. Tidak jarang mereka hanya bisa berkoar menentang, tapi tatkala dihadapkan pada permasalahan riil yang menuntut adanya solusi ke depan mereka semua terdiam. Anak muda tidak siap dengan konsep-konsep untuk membawa arah perubahan yang lebih menjanjikan. Untuk kasus ini mungkin kita bisa belajar dari sejarah Angkatan 66 yang saat itu menuntut Soekarno turun tapi mereka tidak siap memberi arah ke mana Indonesia Pasca Soekarno. Maka yang terjadi kemudian adalah keadaan yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Yakni, tetap dominannya peran militer sebagai aktor politik yang terus terjadi hingga sekarang.

Sebuah Pelajaran

Fenomena yang terjadi pada Angkatan 66 adalah sebuah pelajaran. Karenanya, kita tidak menghendaki peristiwa tersebut terulang lagi. Hanya bisa berkoar dan menuntut tetapi mereka tidak memiliki konsep yang jelas tentang perubahan dan Indonesia masa depan yang diinginkan.

Maka satu hal yang bisa dipetik dari pelajaran tersebut adalah, bahwa anak muda terlebih dahulu harus mampu memahami siapa dirinya sebelum menuntut terjadinya suatu perubahan. Setidak-tidaknya, mereka harus bisa memetakan tantangan, permasalahan sekarang dan mendatang, untuk kemudian memberi tawaran solusi tentang Indonesia ke depan.

Kaum Muda dan Perubahan

Perubahan memang harus berlangsung. Indonesia masa depan menuntut adanya perubahan-perubahan baru di banyak aspek kehidupan. Tetapi pertanyaannya adalah dari mana kita harus memulai perubahan itu? Juga bagaimana posisi kaum muda di dalamnya?

Menurut Ari Ujianto, Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat UGM, saat ini kaum muda berada dalam masa transisi.

Di sisi lain, menurut mahasiswa Fakultas Hukum itu, mereka sangat *concern* dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Kaum muda adalah komunitas yang di mana pun keberadaannya, sangat diharapkan untuk mengadakan perubahan. Harapan itulah yang kemudian memunculkan jargon *agent of change,* yang mungkin menjadi kata-kata bombastis saat ini.

Meskipun ada anggapan hanya jargon namun, jika menengok sejarah peran kaum muda dalam pergerakan Indonesia, mereka tetap diharapkan tampil sebagai agen perubahan, yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Agenda Suksesi

Salah satu agenda besar yang dihadapi sekarang adalah suksesi kepemimpinan nasional. Salah satu alasannya Soeharto sudah terlalu tua untuk memerintah. Ia menyatakan siap *lengser keprabon* menjadi *pandita* untuk lima tahun mendatang.

Tentang hal ini Titok Haryanto, Ketua Dema UGM, menyatakan pendapatnya. "Jika sistem yang selama ini ada terus dipelihara, tidak akan terjadi suatu suksesi. Karena susunan kelembagaan, birokrat, dan sisitemnya sendiri tidak berpihak pada rakyat," ujarnya.

Namun demikian bukan berarti kita mengabaikan suksesi. Menurut Luthfi Rahman, anggota KMPD (Komite Mahasiswa Pencinta Demokrasi) Yogyakarta, suksesi akan menjadi ruang di mana kepemimpinan bisa dievaluasi dan direfleksikan.

"Meskipun, suksesi yang berjalan dari dua kepemimpinan, Soeharto dan Soekarno, tidak bisa dikatakan mencerminkan sistem demokrasi yang baik," ujarnya.

Namun, Luthfi mengingatkan, sementara wacana suksesi terus diproduksi, ada kekosongan wacana yang seharusnya menjadi ruang generasi muda untuk melakukan *counter* dan melontarkan ide-ide perubahan. Ruang inilah yang harus

diisi generasi muda selain hanya mengikuti isu *mainstream* suksesi.

Kekosongan wacana selama ini dibangun dengan sengaja oleh pemerintah Orde Baru sehingga mereka mampu melegitimasi setiap tindakannya. Tawaran yang bisa dilakukan terhadap situasi semacam ini adalah melakukan *counter* wacana untuk membuat pemberdayaan masyarakat.

Meneropong Permasalahan

Meneropong wajah Indonesia masa depan, banyak agenda masalah yang harus dipikirkan. Kaum muda harus segera mengagregasi kalangan muda untuk mendiskusikan agenda-agenda ke depan Indonesia.

Bila diperinci maka ada lima permasalahan Indonesia yang sudah krusial dan menuntut segera dicari *problem solving*-nya.

Pertama, permasalahan demokratisasi, perlunya keterbukaan politik untuk ruang berpartisipasi publik.. *Kedua*, penegakan hak asasi manusia, penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang kelompok dan golongan. *Ketiga*, Penegakan hukum, adanya jaminan dan kepastian hukum bagi tiap-tiap warga negara. *Keempat*, perekonomian, perlunya pemerataan hasil-hasil ekonomi bagi seluruh rakyat. Dan *kelima*, pendidikan, peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi tantangan masa depan.

Demokratisasi sebagai agenda utama memiliki nilai penting bagi upaya untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan membuka partisipasi rakyat dalam bidang politik. Demokrasi yang secara substansial dirumuskan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat mengisyaratkan bahwa kedudukan atau posisi rakyat harus lebih kuat dari negara atau eksekutif. Dalam pelaksanaannya rakyat memandatkan kekuasaannya kepada eksekutif untuk mengatur negara.

Hal itu sesuai konsep demokrasi yang dikemukakan John Locke, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan hukum yang adil. Dalam praktiknya kekuasaan legislatif haruslah hanya satu, yang wakil-wakilnya dikontrol oleh rakyat, sehingga terdapat proses keterbukaan yang nyata.

Kelemahan Orde Baru salah satunya adalah ketertutupan sistem, khususnya lemahnya tingkat kontrol legislatif terhadap eksekutif. Ketertutupan sistem itu lama kelamaan menimbulkan keraguan rakyat terhadap pemerintah. Kondisi-kondisi seperti mandulnya DPR, korupsi, kolusi yang akut di birokrasi, serta kecurangan- kecurangan politik yang dilakukan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya, semakin menguatkan keraguan dan ketidakpuasan kalangan bawah.

Bagi Titok Haryanto kondisi di atas akan menjadi prakondisi yang cukup mematangkan rakyat untuk mengambil sikap. "Rakyat makin tahu kecurangan-kecurangan politik rejim. Itu menjadi kontribusi bagi meningkatnya radikalisme massa," ujarnya.

Agenda kedua yang harus segera dipecahkan adalah penegakan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup, kemerdekaan, berpendapat, dan hak milik. Selama Orde Baru, hak-hak itu telah dikesampingkan. Ini karena orientasi Orde Baru mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas di berbagai bidang. Konsekuensi dari itu adalah semua hal yang bertentangan dengan kebijakan Orde Baru ditindak dengan cara kekerasan dengan alasan penertiban.

Agaknya hal ini senada yang ditulis Mochtar Mas'oed dalam bukunya *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Orde Baru menumbuhkan sistem keyakinan, yang dalam prakteknya memberikan pembenaran terhadap kesengsaraan rakyat dan mengesahkan aktivitas militer dalam urusan ekonomi, politik, dan sosial.

Agenda berikutnya adalah penegakan hukum. Kepastian hukum adalah syarat utama adanya jaminan hak-hak rakyat. Kesamaan hak tanpa memandang status dan golongan bahwa di depan hukum setiap orang setara kedudukannya.

Hukum di Indonesia ini telah demikian bobrok, sehingga rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum formal. Adanya Surat Sakti, Kasus Udin, merupakan contoh betapa lemah sistem peradilan hukum di negara kita.

Keempat, perekonomian. Selama enam Pelita secara fisik pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan berhasil. Pembangunan gedung-gedung, transporatasi yang semakin memadai, adanya jaringan telekomunikasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi hampir 7% per tahun mampu mencengangkan dunia internasional.

Akan tetapi, pertanyaannya apakah semua rakyat dapat menikmati hasil pembangunan tersebut? .Menurut Haris Rusli Moti, Ketua HMI Cabang Bulaksumur, pertumbuhan ekonomi yang dibangun pemerintah selama ini sangat bergantung pada dukungan internasional. Kondisi ini sangat berbeda dengan Singapura atau Malaysia di mana kedua negara tersebut secara fundamental ekonominya lebih kuat daripada Indonesia.

"Prestasi yang dibangun oleh Orde Baru lebih menyokong proses kapitalisasi. Jadi, pertumbuhan yang dikedepankan bukan pada pemerataan. Wajar saja dengan dukungan kapitalisasi internasional, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Tetapi, di sisi lain, pemerataannya terdistorsi," jelas Haris Rusli yang juga Ketua Forum Idealogika Fakultas Sastra UGM.

Krisis moneter yang sekarang terjadi semakin menambah penderitaan masyarakat bawah. Pemerataan yang diharapkan semakin jauh dari realitas. Padahal, UUD '45 pasal 33 menyatakan bahwa tiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mengadakan kegiatan ekonomi. Kenyataannya, teori *Trickle Down Effect* yang diterapkan pemerintah tidak menetes seperti yang diharapkan.

Agenda kelima adalah pendidikan atau pemberdayaan rakyat. Masalah ini menjadi penting bila mengingat era pasar bebas, kompetisi global, yang akan segera berlangsung. Menghadapi era itu diperlukan kualitas manusia yang dapat bersaing dan turut berkompetisi dalam percaturan dunia internasional.

Kapitalisasi dunia internasional lewat wadah-wadah seperti AFTA, APEC dan lain-lain, menurut Haris Rusli, hanya akan berimplikasi buruk pada rakyat kecil seperti buruh dan petani. Atas

dasar itu maka pendidikan rakyat Indonesia harus ditingkatkan.

Menuju Perubahan

Jika peta persoalan Indomesia dalam masa transisi ini sudah bisa dijabarkan maka proses berikutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan *discource* tentang perubahan. "Karena tanpa perubahan, sistem yang telah ada selama hampir dua dasawarsa ini akan membusuk," tandas Luthfi.

Menurut A. Azwar Anas perubahan tentang Indonesia masa depan haruslah perubahan yang proaktif, tidak revolusioner, karena perubahan yang revolusioner hanya akan membawa korban. "Proses perubahan haruslah dinamis seperti proses pembangunan sebagaimana perubahan yang dibangun secara konseptual," kata anggota Utusan Golongan di DPR.

Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil lewat cara-cara konflik destruktif dan anarki tetapi harus dilakukan melalui proses yang kontruktif.

Akan tetapi, bagi Titok, konflik pun merupakan hal yang positif untuk prakondisi perubahan. "Jika konflik dipandang sebagai hal yang positif maka konflik dapat mendewasakan masyarakat sendiri. Dari sana akan muncul dialektika yang membawa perubahan yang sangat positif," paparnya.

Menurut Dwi, Wakil Ketua KNPI Yogyakarta, perubahan merupakan suatu keharusan. "Tapi, perubahan yang tidak mengingkari aspirasi rakyat. Artinya, perubahan harus secara damai, kontitusional, dan tanpa mendatangkan korban," tambahnya.

Namun, apakah cara-cara yang berjalan secara kontitusional sekarang ini dapat dipercaya? Pemilu 1997 yang diharapkan secara konstitusional membawa perubahan ternyata banyak diwarnai cara-cara inkonstitusional. Banyak terjadi pelanggaran selama proses kampanye hingga hari pelaksanaan Pemilu. Bahkan, Pemilu kali ini banyak membawa korban karena adanya kerusuhan antarpartai dan Golongan Karya.

Artinya, perubahan tidak bisa diwujudkan hanya dengan mengandalkan mekanisme yang ada. Perubahan harus dilakukan dengan merombak semua tatanan sistem yang mengungkung.

Pertama kali yang harus dilakukan adalah demokratisasi. Karena, bagi Stefanus, Ketua GMKI Cabang Yogyakarta, harus ada kesempatan untuk semua komponen bangsa berinteraksi tanpa batasan yang diskriminatif.

Alternatif lain seperti yang dikatakan Luthfi diperlukan pembenahan-pembenahan yang bersifat teknis. Perlu dimulai dari upaya mencari benang merah semua persoalan bangsa ini. Demokratisasi ini tidak hanya diperlukan terjadi di bidang politik tetapi juga sosial dan ekonomi.

Reformasi Politik

Reformasi politik untuk seluruh tatanan yang ada sekarang ini adalah pencabutan lima paket UU Politik. Karena lima paket tersebut tidak demokratis, rakyat dalam beraktivitas secara politik dihambat.

Ari Ujianto menjelaskan bahwa lima paket UU Politik sangat membatasi aspirasi rakyat untuk mengontrol pemerintah lewat DPR, membatasi akses masyarakat terhadap kekuasaan. Lima paket UU Politik telah menciptakan sistem politik yang eksklusif, tertutup, seperti proses Litsus di DPR saat ini yang tidak transparan.

Langkah berikutnya adalah membangun masyarakat sipil yang kuat. Artinya harus ada pemberdayaan lewat jalan pendidikan sehingga *bargaining position* rakyat terhadap negara setara. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam. Ditumbuhkannya wadah-wadah informal dalam masyarakat atau yang sekarang ini disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memperkuat posisi rakyat. Melakukan pendidikan yang murah sehingga mampu diraih oleh seluruh lapisan masyarakat. Apalagi menjelang persaingan abad 21 diperlukan masyarakat yang mampu bersaing dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Perubahan berikutnya yang sangat diharapkan adalah pemerataan distribusi hasil-hasil ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Krisis moneter yang sekarang terjadi membuktikan bahwa fundamental ekonomi kita tidak kokoh. Konsep "pembangunanisme" (*developmentalisme*) ternyata hanya melahirkan proses kapitalisme semu. Kekuatan ekonomi hanya tumbuh pada sebagian kelompok yang dekat dengan elit kekuasaan. Sehingga lahirlah konglomerat yang berpenghasilan jutaan dan disisi lain banyak rakyat Indoensia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang dititikberatkan Orde Baru hanya memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin. Adanya kelaparan sampai berakibat kematian semakin menguatkan bahwa *Trickle Down Effect* hanya mengembung di tengah, tetesannya tak pernah sampai ke bawah.

Apakah pengaruh internasional lewat badan-badan dunia seperti IMF, World Bank, mampu mendorong pemerataan dan demokratisasi? Menurut Stefanus, proses lewat wadah-wadah internasional berlangsung secara tidak transparan. Artinya, kegunaan dana tersebut tidak jelas untuk siapa. Sebab, bukan tidak mungkin hanya akan dimanfaatkan oleh sebagian orang yang dekat dengan kekuasaan.

Clean Government

Akhirnya yang bisa kita harapkan dari perubahan tersebut adalah pemerintahan yang bersih (*clean government*) dari praktik kolusi. Kedudukan yang jelas antara lembaga eksekutif dan legislatif, di mana sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, maka lembaga legislatif setara dan mempunyai mekanisme pengawasan yang kuat terhadap eksekutif. Bahkan menurut Ari Ujianto, wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat tidak diangkat oleh Presiden sehingga mereka bertanggung jawab langsung terhadap rakyat.

Sekian agenda yang harus dilakukan tadi tidak akan berjalan mulus, akan ada aral melintang yang akan menghalangi terciptannya perubahan seperti yang diharapkan. Namun seluruh rakyat akan bergandengan tangan, bersatu dan maju bersama-sama.***

Melanie
He-Rey, M. Mustofa, Lisa R Ahmad, Luqman, Ajianto, Iwan,Bustom

Ketidakpastian Pasca Soeharto

Repro The Jakarta Post

Stagnasi kepemimpinan nasional sudah demikian akut. Rakyat, pemegang kedaulatan, mengharapkan segera terjadi perubahan. Cepat atau lambat perubahan harus terjadi. Tetapi, bagaimana memformat pasca perubahan, inilah yang lebih penting dikerjakan!

Di Indonesia -- dan kebanyakan negara-negara dunia ketiga -- tampaknya suksesi kepemimpinan nasional menjadi peristiwa yang luar biasa. Hal ini dikarenakan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia selama kurang lebih 30 tahun baru terjadi sekali suksesi.

Tidak adanya budaya pergantian kepemimpinan tersebut menjadikan bangsa Indonesia sekarang mengalami kebingungan luar biasa. Rakyat seolah tidak siap harus dimulai dari mana memulai perubahan.. Ditambah dengan kondisi sekarang di mana negara dalam kadaan hancur terpuruk di segala aspek kehidupannya.

Namun, sesulit apa pun perubahan harus tetap dilakukan. Kalau tidak, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang stagnan, mati membeku, tanpa dinamika kehidupan yang lebih tercerahkan.

Pertanyaanya, harus dengan cara bagaimana perubahan itu mesti dilakukan?

Perubahan menuju demokrasi dapat dilalui dengan beberapa cara. *Pertama,* melalui revolusi, yakni menginginkan perubahan tajam dalam siklus kekuasaan sosial. Ini tercermin dalam perubahan radikal terhadap proses pemerintahan yang berdaulat pada kewenangan dan legitimasi resmi dalam konsepsi tatanan sosial (Eugene Kamenka). Ini bisa dilihat pada peristiwa Komune Paris (1870- 1871), Revolusi Rusia (1917-1918), Revolusi Cina (1911-1948).

Kedua, replacement (pergantian). Diasumsikan kelompok oposisi harus lebih kuat dari pemerintah dan kelompok moderat juga harus lebih kuat dari kelompok ekstremis.

Ketiga, tranplacement. Proses ini terjadi sebagai akibat kesepakatan antara pemerintah dengan oposisi. Di satu sisi negara menganggap oposisi terlalu kuat tetapi di sisi lain oposisi menganggap sangat sulit untuk menumbangkan rejim. Karena keduanya sama-sama membutuhkan akhirnya keduanya membuat kesepakatan.

Menurut Laurence Whitehead, perubahan menuju demokrasi dapat terwujud jika militer mengalami kekalahan dalam konteks internasional dan tekanan-tekanan ideologis pada tingkat internasional yang berpengaruh pada presepsi-presepsi para pelaku politik tentang masa bertahan suatu rezim. Di samping itu, hal lain yang dapat mendukung terjadinya transisi politik adalah timbulnya kemerosotan (krisis) ekonomi domestik dan internasional.

Sedangkan menurut O ' Donnel transisi ditandai dengan kebangkitan masyarakat sipil yang memuncak sebagai akibat pergesekan antara garis keras *(duros)* dengan garis lunak

(blandos).

Sejarah Suksesi Indonesia

Untuk memprediksi peristiwa proses transisi politik mendatang (baca: dari Soeharto ke penggantinya) sangatlah tidak mudah. Hal ini bukan saja karena memang peristiwa tersebut masih terlalu gelap untuk dijelaskan. Tapi lebih jauh karena tradisi politik Indonesia memang sangat unik, belum masuk dalam teori politik canggih mana pun. Sebab seperti yang banyak dilihat nasib politik Indonesia hanya tergantung pada satu sosok tunggal: Soeharto.

Dokumenter

J Kristiadi

Namun, bukan berarti kemudian kita berlepas tangan dan tidak mau mencoba mengerti transisi politik mendatang. Sebab ketika berhenti, secara tidak sadar kita diam-diam telah menghendaki ketidakpastian nasib Indonesia sekarang dan mendatang. *Dus*, untuk mengerti bagaimana transisi politik mendatang sudah semestinya kita mengerti sejarah suksesi yang pernah ada di Indonesia. Karena dengan mengerti sejarah suksesi yang pernah terjadi, sedikit banyak membantu kita guna mengerti peristiwa apa yang kemungkinan muncul dalam peralihan kekuasaan mendatang.

Sejarah suksesi Indonesia seperti yang banyak diketahui hanya pernah terjadi sekali dalam perjalanan Indonesia sehabis perang kemardekaan, yakni dari Soekarno ke Soeharto.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah proses suksesi tersebut berdasarkan konstitusi yang ada, konstitusi setengah hati, atau malah lewat kudeta?

"Suksesi di Indonesia baru pertama kali terjadi, yaitu dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan tersebut caranya sangat halus sehingga tampak konstitusional," ungkap **Jenderal (Purn) Soemitro**.

Tetapi **Kristiadi**, staf *Center For Strategic And International Studies* (CSIS), justru berpendapat bahwa menjelang Orde Baru itu terjadi banyak konflik yang mengakibatkan pecahnya ABRI sehingga kemudian ada yang melebur ke tubuh PKI.

Apa yang diungkapkan Kirstiadi tersebut didukung **Bonar Tigor Naipospos**, aktifis PIJAR Indonesia, yang mengatakan bahwa proses demokratisasi di dunia ketiga memang tak pernah berjalan mulus. "Contohnya Filipina, Thailand, dan negara-negara Amerika Latin. Selalu ada korban di setiap pergantian rejim, termasuk yang terjadi pada Soekarno ke Soeharto," terangnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa banyaknya korban dalam transisi merupakan konsekuensi logis dari rejim yang memang mengandalkan kekerasan dan tak pernah mau "sukarela" menyerahkan kekuasaannya.

Dikotomi Sipil-Militer

Menarik untuk ditelaah, disadari atau tidak, pergesekan antara garis keras *(duros)* atau kelompok radikal dan garis lunak *(blandos)* atau kelompok moderat dalam masa Orde Baru menjadi catatan tersendiri.

"Memang dalam Orde Baru telah terjadi faksi-faksi, baik di tubuh militer maupun di kalangan sipil. Tetapi, hal itu tidak memuncak karena mereka tidak yakin pada kekuatan masing-masing. Kalau mengadakan manuver, kemudian mati kan sia-sia saja," ungkap Bonar Tigor.

Namun, menjelang suksesi pertentangan atau dikotomi sipil-militer kembali menyeruak dan menjadi polemik tersendiri. Meskipun tidak semua orang sepakat dengan polemik itu. Seperti **Frans Magnis Suseno**, misalnya, sangat tidak sepakat polaritas antara sipil--militer, Islam--non-Islam.

Hal serupa juga diungkap oleh **Rudini.** Menurutnya, dalam kondisi sekarang tidak tepat lagi membicarakan dikotomi sipil -militer. "Lebih tepat bila pembicaraan ditekankan pada kriteria manusianya. Misalnya saja tentang kriteria pemimpin yang ideal. Kriterianya bisa mengambil poin-poin, misalnya, yang memenuhi kapabilitas, tidak menghindar dari kemajuan teknologi dan menjadi panutan rakyat," ujarnya.

Sementara Kristiadi memberikan gambaran yang lain. Menurutnya, walaupun tidak sepakat dengan dikotomi tersebut, tetapi saya melihat dalam hal ini ABRI lebih siap karena beberapa alasan.

Pertama, ABRI terbukti dapat memberikan kontribusi kultural bagi demokrasi lewat pendidikan militer sejak awal melalui indoktrinisasi menolak nilai-nilai SARA dan mampu masuk ke ruang mana saja.

Kedua, ABRI terbukti berhasil dalam konsep dwi fungsinya, sebagai perwujudan dari konsep *social acceptibility*. Di samping permasalahan struktural, nampaknya Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan kultural, dan ABRI mampu menghadapinya dengan baik..

"Karenanya, untuk masa mendatang ABRI masih sangat solid untuk memimpin Indonesia," tandasnya.

Sedangkan menurut **Soebadio Sastrosatomo** (dalam tulisan di SAMAK, *Penyelamat Republik Indonesia)*, ia tidak sepakat kalau militer yang menjadi pucuk pimpinan, karena selama ini militer begitu otoriter sehingga rakyat mengalami ketakutan terhadap militer. Hal ini dapat dilihat selama ini bagaimana pemegang kekuasaan tidak memerankan dirinya sebagai pemimpin, melainkan lebih sebagai penguasa.

Dokumenter

Pramoedya Ananta. T

Pilihan Perubahan

Apakah dalam waktu dekat akan terjadi perubahan? Benarkah dalam waktu singkat akan ada pencerahan di Indonesia?

Bonar Tigor memprediksikan bahwa dalam jangka waktu dekat tidak banyak perubahan di Indonesia. Indikasi yang paling nyata adalah dukungan dari negara Barat, Jepang,

dan Asia sendiri dalam krisis moneter Indonesia. Dapat dilihat paket *International Monetary Fund* (IMF) dalam jangka waktu tiga tahun. Artinya, IMF berani memberikan pinjaman ke Indonesia, karena negara kapitalis internasional sadar selama tiga tahun stabilitas politik di Indonesia tidak akan terganggu.

Seandainya ada perubahan , kata mantan aktivis mahasiswa itu, perubahan di Indonesia dalam jangka waktu dekat melalui demokrasi berskala rendah (*low democracy intensity*). Sehingga meskipun seandainya terjadi perubahan bukanlah melalui revolusi, melainkan tranformasi.

Hal senada diungkap oleh Magnis Suseno yang berharap suksesi nanti dapat melalui cara-cara transformasi. Sebab, jika terjadi revolusi akan terjadi kerusakan yang parah dan Indonesia akan membangun kembali dari awal.

Sumitro juga tidak sepakat dengan cara revolusi karena dipastikan akan terjadi disintegrasi sosial. "Bila terjadi revolusi negara kita akan seperti Yugoslavia dan negara-negara bekas Uni Soviet, tercerai-berai," tandasnya

Sementara itu mantan tokoh Lekra, **Pramudya Ananta Toer** menegaskan bahwa perubahan dapat melalui revolusi atau cara-cara yang lain. Itu sangat tergantung dengan situasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Dengan melihat situasi dan kondisi sekarang, maka Frans Magnis melihat bahwa jika menginginkan perubahan harus diciptakan adanya multipartai untuk menampung pluralitas masyarakat Indonesia. Maka konsekuensinya paket 5 Undang-Undang politik harus dikaji kembali.

Mempercepat Perubahan

Ada beberapa penyebab yang dimungkinkan menjadi pendorong perubahan di Indonesia *Pertama,* membelotnya satu faksi elit dalam negara. *Kedua,* konflik kelas antara pemodal di bank-bank dengan negara yang memang telah membentuk kelas tersendiri. *Ketiga,* membelotnya faksi militer.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mempercepat terjadinya perubahan tersebut? Mungkinkah dengan adanya pembentukan koalisi demokratik?

Rudini mengatakan bahwa jika melihat melihat situasi nasional saat ini nampaknya sudah saatnya dibentuk sebuah koalisi demokratik di antara semua elemen perubahan. Hanya saja permasalahannya untuk menyamakan agenda atau *platform* di antara tiap kelompok seringkali terjadi banyak batu sandungan.

Hal senada diucapkan Bonar Tigor. Baginya koalisi demokratik memang diperlukan. "Antara lain, kelompok kiri yang selama dikenal paling tegas memihak rakyat tertindas harus merangkul elemen-elemen lain yang menginginkan perubahan dan toleran dengan pluralitas. Sebab, seperti itulah hakikat demokrasi," tandasnya.

Apriliana

Berar Fathia

"Kaum santri juga tidak boleh ditinggalkan. Sebab, kaum santri merupakan kelompok yang kuat di Indonesia. Begitu juga dengan kaum primodial atau aliran karena mereka tetap berpengaruh dalam afiliasi atau loyalitas politik. Jadi, koalisi tadi harus merangkul semua elemen," jelasnya.

Namun demikian, ide pembentukan koalisi demokratik itu tidak semudah yang digambarkan. Bahkan Kristiadi melihat koalisi menjadi sulit karena friksi di dalam elit sendiri semakin tajam. "Jadi, ide itu bagus tetapi kemungkinannya kecil terealisasi," tandasnya.

Selain adanya friksi di tingkat elite, koalisi demokratik menjadi sulit manakala melihat iklim dan kultur demokrasi Indonesia yang sangat paternalistik. "Kultur itu menyulitkan banyak elemen untuk membuat keputusan secara mandiri," katanya.

Agenda Pasca Soeharto

Meski perubahan masih terlalu jauh untuk diharapkan, namun kita semua yakin bahwa suatu saat harapan perubahan itu pasti akan datang. Karenanya, sudah saatnya kita kemudian berpikir bagiamana nasib Indonesia pasca kepemimpinan Soeharto? Apa yang mesti dilakukan agar kesalahan hari ini serta kemarin tidak terulang lagi?

Bagi Berar, hal terpenting yang mesti dilakukan setelah pergantian presiden adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. "Hal ini penting karena kesalahan utama selama ini adalah tidak adanya masa jabatan presiden sehingga yang terjadi adalah stagnasi," ungkapnya.

Sehingga, menurutnya, maksimal seorang presiden hanya dipilih selama dua kali saja. "Lebih baik Presiden dipilih dua periode saja. Dalam kepemimpinan dua periode dapat diambil segi positifnya, yaitu mendorong DPR/MPR menjadi sistem politik yang efesien dan memaksa munculnya kader-kader baru setelah dua periode," jelasnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Sri Bintang Pamungkas. "Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memberikan harapan terus-menerus untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap politik kenegaraan sesuai dengan dinamika masyarakat dan dunia, maka seorang presiden seharusnya dipilih hanya dua kali masa jabatan saja," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pembatasan itu dimaksudkan untuk mencegah absolutisme lembaga kepresidenan, di samping itu politik negara akan lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.

Sementara itu **Abdurrahman Wahid** melihat untuk menuju semua itu hal pertama yang mesti dilakukan adalah pembenahan atas krisis yang berkepanjangan yaitu krisis ekonomi sebagai masalah yang urgen.

"Karena dengan memulihkan segala bentuk krisis ini, khususnya ekonomi, akan diharapkan tercapai kemakmuran bagi masyarakat luas," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Magnis. Menurutnya, agenda yang harus dikerjakan pasca Soeharto adalah menata perekonomian Indonesia terlebih dahulu. Sebab, jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang maka Indonesia hanya akan menjadi objek di era pasar bebas.

"Antara lain, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah buruh dan kaum ekonomi lemah lainnya,"

kata Magnis.

Lantas, apa yang mesti dilakukan untuk pembangunan ekonomi semacam itu? "Untuk menghadapi permasalahan Indonesia ke depan, yakni suksesi dan ekonomi yang begitu rumit, maka perlu ada dialog ke samping antargenerasi, mulai dari generasi 45 sampai generasi sekarang, untuk membahas format negara yang akan datang bagaimana membentuk ekonomi yang mampu menghadapi ekses globalisasi sekaligus mengatasi masalah dalam negeri," ujar Soemitro.

Desentralisasi Ekonomi-Politik

Rupanya permasalahan ekonomi politik merupakan probiem vital dalam sebuah bangunan negara.

Begitu pentingnya sehingga Sri Bintang Pamungkas, dalam tulisannya di *Daulat Rakyat*, membeberkan kesalahan besar yang dilakukan Orde Baru dalam bidang ekonomi selama ini adalah adanya pemborosan dan inefisiensi ekonomi yang itu sangat menguras sumber daya domestik dan mengurangi daya saing industri produk-produk Indonesia di pasar global. Itu yang membuat ekonomi Indonesia menjadi rapuh.

Menurutnya dosa besar yang dilakukan oleh Orde Baru adalah membudayakan praktek monopoli dalam ekonomi. "Adanya monopolisme-oligoligopolisme dan konglomerasi, pemberian fasilitas, atau hak-hak khusus untuk kelompok-kelompok tertentu, pemberian perlindungan untuk kelompok-kelompok tertentu, perlindungan terhadap pungutan-pungutan liar, praktik korupsi-kolusi telah menjadikan ekonomi rakyat menjadi hancur," tandas Bintang.

Hal lain yang menjadikan kesalahan sistem ekonomi sekarang adalah adanya eksploitasi besar-besaran terhadap potensi ekonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan latar permasalahan seperti itu, Bintang kemudian mengajukan usulan untuk Indonesia pasca Soeharto. Menurutnya sistem pemerintahan haruslah desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan jaminan bagi tiap-tiap Daerah Tingkat I untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi daerahnya dan bebas dari kebijaksanaan pemerintah pusat, kecuali untuk hal-hal yang memang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk menuju perubahan seperti ditawarkan bukanlah hal yang mudah. Namun kerumitan ini bisa dipecahkan dengan pertama-tama mengembalikan kekuasaan dan kedaulatan kepada rakyat. Sebab, dengan kembalinya kedaulatan tadi terbersit harapan untuk terciptanya perubahan dan masa depan yang lebih baik.

Sekaligus juga mengembalikan hakikat demokrasi itu sendiri. ***Vox Populi Vox Dei !***

Ajianto
Udin, Andi, April, Yayah, Wuwun, Rosyadi

Citra Emas (CES)
Sekolah Manajemen dan Public Relations

Pada dasarnya setiap individu selalu berupaya agar dirinya senantiasa dapat memancarkan sosok pribadinya secara positif agar di dalam meniti kehidupannya, ia dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Upaya membangun citra diri (*personal image*) yang baik sudah menjadi prasyarat utama agar dirinya bisa survive dan berhasil di dalam menembus peradaban masyarakat yang modern. Realitas sosial tersebut secara makro juga terjadi pada setiap organisasi perusahaan, apapun jenisnya. Sehingga keberhasilan manajemen di dalam membangun sebuah citra (*institusional building*) dan upaya pembinaan moral kerja yang kondusif akan menentukan kelangsungan usahanya.

Maraknya kegiatan ekonomi yang makin kompetitif dewasa ini tentu saja mempercepat laju permintaan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas, baik secara teknis maupun dalam aspek kepribadiannya. Kesiapan diri pada masing-masing individu tersebut semestinya direncana sejak dini agar ia bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tuntutan kerja. Perwujudan citra diri dan institusi yang positif akan lebih memungkinkan perusahaan tersebut dapat merebut ruang kehidupan (*niche*), yang makin hari persaingan makin sengit.

dok. CES

Staf pengajar, **komitmen dengan kualitas**

Melihat problema tersebut, C-E-S hadir dengan memberikan berbagai alternatif pendidikan pelatihan, konsultasi maupun riset yang arahnya untuk mengisi kecakapan *Public Relations* baik dalam perspektif mikro sebagai pengembangan kepribadian (bisnis) maupun pengelolaan *Public Relations* secara kelembagaan, sebagai salah satu fungsi manajemen yang makin strategis. **Rhenald Kasali** (pakar manajemen dan Public Relations dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) mengatakan bahwa C-E-S telah melakukan terobosan maju dan merupakan lembaga pendidikan yang pertama kali di Indonesia yang memadukan kajian *Public Relations* dalam terminologi manajemen modern, yang prospektif.

Kelahiran yang bertepatan dengan Tahun Indonesia Emas (1995) memberikan inspirasi untuk memberi nama CITRA EMAS (CES - dibaca Ce-E-Es). Dengan semangat memberikan yang terbaik pada siswa didik dan *clien* serta ditopang dengan fasilitas pendidikan yang eksklusif di pusat kota Malioboro Yogyakarta.

DIPLOMA MANAJEMEN DAN *PUBLIC RELATIONS*

Program ini dirancang bagi anda yang lulus SMA atau mahasiswa/wi yang punya minat di dalam *Public Relations* secara mendalam, yang ditempuh selama 1 tahun. Adapun materi dasar meliputi Teori Komunikasi, Dasar-dasar *Public Relations*, *Marketing*, Komunikasi Organisasi dan Teknik Presentasi. Materi lanjutan meliputi Manajemen PR, Perencanaan Media, Pengelolaan Media Internal, Komunikasi Lisan dan Periklanan. Sedangkan materi penunjang adalah Komputer (*under Windows*) dan *English For Bussiness I & II* serta diakhiri dengan proses magang.

Para lulusan diharapkan siap memasuki dunia ke-PR-an di berbagai perusahaan. Hingga saat ini kami sudah menerima pesanan dari beberapa perusahaan bagi para lulusan program ini. Program berikutnya direncanakan dimulai 7 April 1997.

PUBLIC RELATIONS FOR EXECUTIVE

Para eksekutif dan manajer perusahaan perlu menambah wawasan berkenaan dengan peranan dan arti penting PR bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Program ini disajikan secara intensif dengan mengutamakan pada analisis kasus, agar para peserta dapat memahami secata teoritis maupun praktis serta kritis di dalam mensikapi persoalan organisasi perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Materi yang disajikan meliputi Budaya Perusahaan, Manajemen PR, Kepribadian Plus, Loby dan Negoisasi, Table Manner, dan lain-lain. Masa pelatihan selama 6 minggu (seminggu 3X).

PROGRAM REGULER LAINNYA

Meliputi: Pelatihan Komunikasi Bisnis (selama 3 minggu); Komunikasi Pemasaran (selama 3 minggu); Mensiasati Interview (selama 2 minggu); Kepribadian Plus (selama 2 minggu) dan segera dibuka Diploma *Marketing* (selama 1 tahun).

LAYANAN *iN HOUSE TRAINING*

Kinerja sebuah perusahaan biasanya mengalami pasang surut, yang terkadang bisa memunculkan kondisi krisis yang sulit dideteksi dan diramalkan. CES siap mendampingi dalam pelatihan spesifik diperusahaan ataupun di CES. Serta dimungkinkan konsultasi dan riset yang relevan dengan kasus tersebut. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan keinginan perusahaan.

STAF AHLI DAN PENGAJAR

CES didukung oleh Prof. DR. Harsono Suwardi (Ketua Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana UI); DR. Sasa Djuarsa Sendjaja (Direktur LPPKM Jakarta); Dra. Miranty Abidin (praktisi PR); DR. Suyanto, MA (Konsultan Bank Dunia). Staf Pengajar: Drs. Widodo Muktiyo, SE, M.Com.; Drs. Jefta Leibo, MS; Drs. A. Eko Setyanto, M.Si.; Drs. Ahmad Zaini Abar; Drs. IG. Ngurah Putra, MA; Okina Fitriyani, S. Psi.; Ir. Herawati , MM; Dra. Mirra Noor Milla; Ahmad Syauqi Soeratno dan Drs. M Alexander.***

Waktu Pendaftaran
setiap hari kerja
Jam 08.00 s/d 17.00
di Kantor CES
Jl Malioboro 183 Lantai II
(Depan Hotel Garuda)
Yogyakarta.
Telp. (0274) 581706.
Area parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali

KRT Permadi Satrio Wiwoho, S.H. :

Suksesi Kali Ini Akan Berdarah...

Permadi, paranormal yang sering mengundang kontroversi, sekeluarnya dari penjara ternyata tak jera juga untuk bicara keras soal suksesi. "Masa penyambung lidah Bung Karno kapok dipenjara," begitu kilahnya.

"Suksesi kali ini bisa tanpa darah bila dua kekuatan yang bertentangan menyepakati Soeharto turun," ungkapnya. Kepada Hery Trianto, dari *Balairung*, Permadi mengungkapkan lebih lanjut buah pikirannya.

Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap suksesi?

Secara politik Golkar dan ABRI karena mereka yang dominan. Kalau mereka mengatakan Pak Harto diganti, Pak Harto bisa apa sih? Apa mampu melawan Golkar dan ABRI dengan usia yang sudah setua itu. Tapi jika Golkar mempertahankan maka ia yang bertanggung jawab terhadap hasilnya.

Kalau kita melihat sejarah, suksesi sejak zaman kerajaan selalu ditandai pertumpahan darah, bagaimana dengan Indonesia selanjutnya?

Saya memang cenderung melihat suksesi berdarah, karena beberapa faktor yang tidak dipenuhi misalnya dialog nasional, kesepakatan nasional. Nah sekarang ini khan Golkar, ABRI, dan Pak Harto bersikeras untuk terus menerus. Sementara kondisi nasional maupun internasional tidak mendukung. Ekonomi, politik makin parah yang akhirnya rakyat khan kehilangan kepercayaan. Kalau sudah begitu rakyat pasti akan menuntut.

Permadi

ISRAR ARDIANSYAH/THE JAKARTA POST

Apakah pertumpahan darah itu akan benar-benar terjadi?

Demi Tuhan saya tidak menghendaki itu, tapi jika angkara murka di Indonesia tidak mau bercermin pada dirinya maka perebutan kekuasaan itulah yang bakal terjadi. Itu sudah hukum alam. Kalau sungai dijadikan tambak, pantai direklamasi maka alam pasti akan bergolak. Suksesi kali ini bisa tanpa darah bila dua kekuatan yang bertentangan menyepakati pak Harto turun.

Seandainya kekuasaan Presiden Soeharto berakhir apa yang bakal terjadi?

Jika terjadi pergolakan tentu kita akan mengalami kemunduran di segala lini. Tapi saya yakin seperti jangka-jangka, babad-babad kuno yang menceritakan bahwa ini akan terjadi bahkan harus terjadi, sesudah itu kita akan mengalami kejayaan. Kembalinya kejayaan nusantara saya yakin karena sementara negara-negara besar mengalami keruntuhan seperti Jepang, Korea, atau Amerika. Dan Indonesia mempunyai keunggulan di bidang budaya, ideologi Pancasila, dan ajaran-ajaran spiritual baik agama maupun non agama.

Lalu kekuatan apa yang bakal bermain setelah ini?

Saya kira kekuatan Tuhan, karena

Tuhan akan mencabut kekuatan manusia untuk hancur, sehingga Tuhanlah yang nantinya mengatur dunia ini melalui orang yang diutusnya, pemimpin-pemimpin baru yang akan muncul. Sejarah manusia telah menunjukan Tuhan itu selalu mempunyai siklus setiap akan memunculkan budi luhur pasti didahului angkara murka. Sebelum Muhammad ada jahiliyah, sebelum Musa ada Fir'aun. Jadi siklusnya khan begitu dan nampaknya sudah hukum alam.

Bagaimana dengan polarisasi antara kekuatan pemerintah dan kelompok oposisi?

Nanti akan hancur, khan polarisasinya berubah antara angkara murka dan budi luhur. Itulah sebabnya PDI pecah, NU pecah, PPP pecah, ABRI pecah dan Golkar pecah, karena hanya hati nurani yang bisa menyatukan mereka, sehingga akan terjadi perang spiritual.

Apa kondisi semacam ini ada paralelisme dengan zaman dulu seperti Soekarno dan Soeharto yang dikelilingi kekuatan di sekitarnya misalnya PKI, ABRI, atau Golkar?

Saya kira konstelasinya mirip hanya tidak sama, kalau dulu PKI sekarang Golkar. Nah konstelasi semacam itu akan melahirkan ekstriminitas karena sudah merasa kuat seperti saat ini. Satu hal yang sama itu bertentangan dengan moral dan hati nurani.

Bagaimana melihat adanya kekuatan yang disebut revolusioner seperti PRD, PUDI atau yang lain seperti dikatakan pemerintah?

Saya sebenarnya tidak ingin kekuatan itu disebut revolusioner. Itu kekuatan biasa, kekuatan koreksi, itu dianggap kekuatan yang vokal, lantang, padahal khan wajar-wajar saja. Apa yang dikemukakan Amien Rais itu khan bukan revolusioner, *wong* dia membaca ayat-ayat Qur'an, tentang moral pejabat harus begini, tentang kekayaan alam harus dikelola untuk rakyat. Itu khan bukan satu kekuatan yang vokal atau revolusioner.

Sebenarnya Anda yakin nggak akan munculnya masyarakat baru di Indonesia?

O, sangat yakin, pemerintah saat ini tinggal menunggu hari. Andaikan Pak Harto terpilih, nggak bakal lama.

Lalu siapa yang akan memimpin masyarakat baru ini?

Ya kembali kalau saya mengikuti jangka-jangka kejawen dan sebagainya disebut 'Satria Piningit' *nggak* akan bisa diketahui. Seperti Musa, Musa itu bedanya dengan Isa, Tuhan sama-sama memberitahukan telah dilahirkan seorang anak yang akan menyelamatkan dunia tapi untuk Isa diberitahukan ikutilah bintang ini kau akan menemukan, dan sejak lahir semua sudah tahu inilah utusan Tuhan. Tapi untuk Musa tidak, sudah dilahirkan utusan Tuhan yang akan mengalahkan Fir'aun, tapi tidak diberitahukan siapa sehingga Fir'aun marah semua bayi laki-laki dibunuh. Musa karena sudah ditunjuk jadi dilindungi. Sampai umur 40 tidak ada yang tahu padahal ia bergaul wajar.

ISRAR ARDIANSYAH/THE JAKARTA POST

Permadi

Apakah Sekarang terjadi seperti kasus Musa tersebut?

Ya, saya anggap seperti itu karena ciri-ciri Satria Piningit yang ada dalam babad tanah Jawa ya seperti itu. Tidak bisa diketahui bahkan hidupnya *kesampar kesandung* (terlunta-lunta) menjadi *satria wirang* (satria yang selalu mendapat malu), hidupnya dihinakan orang dan selalu dipermalukan orang. Sekarang belum diketahui tapi pasti sudah siap.

Tapi setidaknya kita bisa menduga ada orang yang punya kans seperti itu, misalnya Wismoyo atau Gus Dur barangkali?

Itu tidak. Karena, pertama harus berdarah Majapahit, hidupnya *kesampar kesandung*. Wismoyo itu kan *mukti wibowo* (sejahtera dan dihormati, Red), bertentangan dengan sifat satria piningit.

Apakah Munculnya Pak Harto dahulu juga menggunakan mitologi satrio piningit?

Pak Harto itu setengah piningit, bung Karno setengah piningit. Bung Karno diketahui kemunculannya sejak ia muda sudah menunjukkan kepemimpinan HOS Cokroaminoto, Agus Salim tahu ini anak yang bakal memimpin Indonesia. Jadi bukan piningit dalam kemunculannya tetapi perilakunya sangat piningit. Seperti keluar dari PBB, menentang Amerika dan mendirikan Ganefo.

Begitu juga dengan pak Harto setengah piningit. Khan *nggak* ada yang tahu. Semua mengharap apa itu Yani, Chaerul Shaleh, atau Subandrio. Tetapi Soeharto tidak masuk dan tiba-tiba muncul. Prilakunya orang tahu kalau dia (Soeharto) akan ngomong begini, termasuk kalau mau pemilihan presiden, ngomong saya sudah tua, saya ingin istirahat tapi kalau rakyat menghendaki dan seterusnya. Makanya sudah bisa diduga dia *ngomong* begitu terus menerus. Nah yang ketiga tadi munculnya tidak diketahui, perilakunya tidak diketahui. Jika melihat tiga urutan, satria kinunjara, satria mukti wibowo dan satria piningit saat ini waktunya sudah dekat sekali.

Berarti Amien Rais sekalipun bukan?

Bukannya begitu, Anda bisa, saya bisa, Amien Rais bisa, tapi nggak terduga bahwa dia yang akan muncul.

Bagaimana dengan kekuatan setelah munculnya masyarakat baru Indonesia?

Seperti di Philipina saat pemerintahan Marcos yang sangat didukung menhankamnya. Tapi begitu Marcos goyah menyeberang dia ke Corry Aquino. Nah disini nanti pasti banyak jendral-jendral yang begitu, mereka masih ingin menikmati masa depan. ***

Hery Trianto

Amien Rais:
"...Begitu Rasa Takut pada Soeharto Sudah Dilepaskan..."

ARIEF SANTOSO/JAWA POS

Amien Rais dan Kuntowijoyo

Munculnya Amien Rais untuk menjadi calon presiden bukan merupakan rahasia lagi. Tapi banyak diantara masyarakat yang tidak tahu visi dan misi ia tentang konsep Indonesia masa depan. Dan bagaimana langkahnya ketika Soeharto turun?

"...Soeharto memang harus turun, maka sebaiknya ada presidium," ungkapnya kepada *Balairung* yang mewancarainya selama kurang lebih 1 jam. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang terjadi seandainya pergantian tidak akan terjadi?

Kalau sampai tidak terjadi suksesi, dalam arti Sidang Umum MPR besok bulan Maret 1998 itu masih lagi mengukuhkan kepempinan Soeharto maka buat saya itu sebuah kiamat politik dan ekonomi bagi Indonesia.

Saya mengatakan kiamat politik dan ekonomi dengan sadar tidak ada emosi. Ini tidak melebih-lebihkan. Tapi inilah renungan saya yang sudah cukup panjang. Mengapa saya berkesimpulan seperti itu karena sejak 1993 saya sudah mengibarkan satu isu yang sangat penting yaitu perlunya suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Hanya saja 4 atau 5 tahun yang lalu orang tidak suka mendengar isu yang saya lontarkan bahkan sementara petinggi negara mengatakan tidak etis, *Nggege mongso*, tidak relevan, emosional,

dan sebagaianya. Tapi sekarang saya pikir dibenarkan oleh perkembangan bahwa kepemimpinan Soeharto memang sudah harus segara diakhiri, *enough is enough*, kita perlu sebuah kepemimpinan yang baru. Hanya saja sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang beragama, saya pikir cara menyikapi kita terhadap seorang pemimpin juga harus tetap etis. Bukan berarti habis manis sepah dibuang. Saya kira Bung Karno juga punya kesalahan yang sangat besar karena secara politik pernah bercumbu rayu dengan PKI dan akhirnya membawa kita ke Lubang Buaya dan peristiwa Gestapu PKI.

Nah saya kira pak Harto juga punya kesalahan yang cukup signifikan dalam arti penanganan ekonomi nasional itu memang sangat berat sebelah di mana yang diuntungkan adalah para konglomerat dan juga tentu keluarganya sendiri. Dan ini harus segera diakhiri. Tapi kemudian kalau kita bisa memaafkan Bung Karno, tentu kita juga harus memaafkan pak Harto.

Kalau solusinya suksesi, Ada pandangan tentang figur di antara sekian orang di Indonesia yang kira-kira ia hadir bisa membuat perubahan yang secara sistemik sudah rusak sedemikian berat?

Saya kira sulit untuk menemukan seorang figur yang cukup *actiontable* bisa diterima oleh sebagian besar kekuatan politik negeri ini karena terlalu lama Soeharto ada di kursi kepemimpinan nasional, sehingga selama 30 tahun tidak pernah diberi kesempatan munculnya tokoh baru yang mungkin kalibernya sesungguhnya lebih bagus dari Soekarno atau Soeharto. Tetapi Anda tahu bahwa bagaimana mungkin Tyson bisa menjadi *champion* atau juara tinju dunia kalau tidak pernah diberi kesempatan, sementara ternyata ketika diberi kesempatan dia lebih lebih hebat dari tokoh-tokoh tinju yang lain. Jadi masalahnya selama 30 tahun memang rezim Soeharto tidak memberikan kesempatan sama sekali munculnya keder-kader pemimpin yang baru. Dan kalau saya bicara dalam dunia mahasiswa mungkin saudara Daud Yusuf ikut bertanggung jawab luar biasa yang telah menumpulkan kepekaan politik mahasiswa dengan proyek NKK/BKK. NKK itu yang telah mementahkan dan menumpulkan visi politik mahasiswa sehingga terus terang saya penuh dengan simpatik kasihan sama generasi adik-adik saya dimana mereka memang kepekaan politiknya kadang-kadang tidak setajam kakak-kakaknya pada generasi '66-an.

Dan karena itu saya melihat bahwa yang penting, setelah Soeharto turun itu bukan langsung dipimpin satu tokoh sendirian tetapi diperlukan satu presidium, yang menjadi anggota presidium itu adalah tokoh yang dipercaya oleh rakyat. Bahwa mereka

... Pak Harto juga punya kesalahan yang cukup signifikan dalam arti penanganan ekonomi nasional itu memang sangat berat sebelah di mana yang diuntungkan adalah para konglomerat dan juga tentu keluarganya sendiri.

punya komitmen kerakyatan yang sangat tinggi dan terbukti tidak pernah korupsi, tidak pernah kolusi, tidak berpikir nepotistik. Sesungguhnya rakyat itu tahu siapa saja mereka itu. Persis ketika Bung Karno mengundurkan diri sebelum diambil alih oleh Soeharto lewat Supersemar itu ada presidium yang menjembatani dari Soekarno ke Soeharto. Seingat saya prsidium itu terdiri dari pak Harto sendiri, kemudian Sultan HB, lantas Adam Malik, dan mungkin satu dua figur lain yang saya lupa. Tapi lihatlah kemiripan yang bisa diambil kalau Soeharto memang harus turun, maka sebaiknya ada presidium. Karena siapapun yang ditampilkan pasti akan kontroversial. Apakah itu Try Sutrisno, Habibie, atau Ginanjar, apalagi yang lain-lain itu kira-kira akan menimbulkan kontroversi. Sehingga saya punya solusi diperlukan satu presidium yang mantap terdiri dari 5 sampai 6 orang yang mewakili ABRI, Golkar, Parpol, dunia kampus, kemudian masyarakat sipil pada umumnya yang memang dipercaya dan selama ini tidak pernah ada bukti-bukti korupsi atau kolusi atau menghamba kekuasaan.

Tapi sejauh mana itu mungkin jika melibat prosedur, mekanisme, dan situasi sistem di Indonesia?

Jangan dilupakan, bahwa pemegang kedaulatan tertinggi itu adalah MPR. Jadi 1000 anggota MPR bisa saja membuat presidium atau pimpinan kolektif dengan musyawarah mereka bisa menelorkan apa saja untuk kebaikan bangsa ini. Jadi kita tetap menghormati aturan main konstitusi itu bahwa kedaulatan tertinggi dipegang oleh MPR. Dan karena itu 1000 anggota MPR itu kita harapkan memang berpikitr jernih, bertindak sesuai dengan hati nurani, dan bisikan terdalam dari nurani yang bersih itu dan jangan sampai menghamba pada seorang makhluk apalagi hanya untuk memperpanjang kekuasaan Soeharto yang jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bagi saya memperpanjang kekuasaan Soeharto sama saja menegakkan benang basah. Karena jelas sekali, tidak usah jadi ekonom, tidak usah jadi politisi, tidak usah sekolah di perguruan tinggi dengan krisis multidimensi itu mengisyaratkan bahwa Soeharto memang sudah harus selesai

Jika kesalahanya sudah sedemikian sistemik, masihkah ada harapan pada MPR?

Memang secercah harapan itu pasti ada. Kalau MPR mau membuka mata hati dan telinga nuraninya itu dan saya kira satu saja syaratnya; begitu rasa takut pada Soeharto sudah dilepaskan mereka jadi manusia rasional, mereka akan bisa berpikir jernih, dan tidak terpukau dan terpancang kepada kepentingan seorang makhluk yang bernama Soeharto.

Bagaimana konsep Negara Masa Depan menurut Anda?

Kalau saya setelah ada presidium yang mengambil alih kekuasan Soeharto itu kemudian ada agenda nasional yang harus segera menjadi pekerjaan rumah kita segera. Jadi yang pertama dilakukan langkah-langkah pengamanan terhadap sumber-sumber kekayaan alam kita sebagai modal pembangunan masa mendatang. Kekayaan alam kita yang

berupa hutan demikian kaya raya itu harus direkonstruksi lagi dalam hal kepemilikan. Bayangkan ada seorang swasta bisa memagang HPH(Hak Pengelolaan Hutan) sampai jutaan Ha. Saya kira ini dari segi agama, segi moral, segi rasio, segi akal sehat, dari pertimbangan apapun itu tidak masuk akal. Apa hak seseorang bisa menguasai jutaan Ha hutan-hutan kita yang itu oleh Allah SWT sebagai karunia untuk bangsa. Hutan ditebangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan yang lain-lain. Kemudian juga kita harus amankan kekayaan pertambangan kita. Jadi emas, tembaga, perak, batu bara, sampai migas itu bisa menjadi modal pembangunan masa mendatang buat anak cucu kita. Sementara sekarang ini itu telah digadaikan secara murah kepada perusahaan-perusahaan asing. Di alam semesta ini hanya ada satu negara namanya Indonesia yang memungkinkan orang asing bisa memegang 100% saham pengelolaan pertambangan Indonesia. Jadi keanehan ini harus dibenahi dahulu.

Dan yang kedua secara sistematik dan mantap harus segera dibangun *clean goverment*, caranya tentu dengan berani benar-benar menanggulangi korupsi dan kolusi. Saya tidak pernah membeli pendapat yang mengatakan korupsi tidak bisa diatasi. Banyak contoh negara lain yang menunjukkan dengan kemauan dan tekad yang sangat kuat dari pemegang kekuasaan korupsi itu bisa diatasi. Italia merupakan negara terkorup di seluruh Eropa, tetapi ketika pemerintahanya itu mau bejerka keras untuk mengahantam korupsi itu buktinya berhasil. Memang resikonya separo menteri kabinet dikirim ke penjara kemudian sepertiga anggota parlemen di non aktifkan. Dan barang kali Indonesia seperti itu kalau mau tidak jadi soal.

Kemudian agenda yang ketiga, saya kira memang penciutan kesenjangan kaya miskin yang sudah sangat tidak masuk akal. Jadi bagaimana supaya 3% pemilik atau 30% dari pemegang 70% lebih perekonomian nasional itu bisa dikurangi secara bertahap tanpa mengejutkan. Sementara mayoritas orang miskin itu didongkrak pelan-pelan, ya dengan konsep-konsep ekonomi yang *marketable*, yang dapat operasional. Dan tentu di samping itu cara jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang perbaikan sumber daya manusia kita supaya kita tidak terpuruk di rawa-rawa keterbelakangan, punya peluang berkompetisi dengan negara-negara yang lain.

Nah, terakhir yang tentu terus menjadi agenda tidak pernah surut itu adalah memelihara Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kemajukan bangsa kita dari segi agama, ras, etnik, tradisi, dll itu rahasia kekuatan bangsa. Kalau kita sampai melupakan masalah yang satu ini, kita bisa mengalami disintegrasi nasional. Nah ini saya kira sesuatu yang bisa diterima secara tulus oleh setiap orang Indonesia, setiap pemimpin, setiap politisi, setiap ulama, dan rohaniawan. Karena ini menyangkut kepentingan bangsa jangka penjang.

Bagaimana peluang disintegrasi ketika Soeharto turun?

Kalau saya memang begini. Kita mencari contoh-contoh lain di samping contoh negeri sendiri. Dulu Bung Karno memang punya kesalahan politik. Sehingga gara-gara Gestapu PKI itu mungkin puluhan bahkan ratusan ribu manusia lenyap dari muka bumi lewat peristiwa berdarah yang namanya Gestapu PKI itu. Tetapi lihatlah Bung Karno khan tetap diakui sebagai pemimpin bangsa yang punya kedudukan tinggi karena kita tahu tentu Bung Karno tidak bisa memikul sendiri kesalahan seluruh Orde Lama itu. Mungkin juga lihatlah di Amerika Serikat negara yang demokrasinya sangat mantap ketika Nixon melakukan sekandal *watergate* itu masyarakat Amerika akhirnya juga mengakui walaupun secara hukum Nixon bisa dikirim ke penjara tetapi masyarakat Amerika pun juga menghargai pemimpinnya. Saya kira dengan Soeharto saya berpikir dalam prespektif yang sama. Jadi Soeharto memang tidak bisa disuruh memikul sendirian kesalahan Orde Baru sekarang ini. Karena yang mengelilingi Soeharto yang bernama X, Y, Z, A, B, dan C itu juga kebanyakan merupakan, maaf istilah saya rada kasar, "cecunguk" yang meninabobokan Pak Harto sehingga dia lupa dalam banyak hal. Jadi kalau saya sekalipun mungkin adik-adik mahasiswa melihat sikap saya terlalu lunak, tetapi mungkin dalam jangka panjang juga bijak. Tetapi kalau anak-anak Soeharto saya kira lain, karena dia tidak punya prestasi dan pengorbanan untuk bangsa ini. Mereka-mereka itu hanyalah penikmat-penikmat hasil pembangunan yang berlindung di balik kekuasaan bapaknya. Kalau dengan Pak Harto saya pikir lain. Tapi untuk Tutut dan adik-adiknya saya kira bisa diperiksa kredit macetnya di bank-bank kita dan kemudian harus dikembalikan.

Apakah perlu untuk melakukan revisi terhadap UUD 1945?

Yang satu ini sesungguhnya jangan diutik-utik dahulu. Karena sudah begitu menancap di kepala kita. Bahwa UUD 1945 itu kalau diubah kemudian akan menimbulkan huru-hara. Sesungguhnya saya juga berpikir, bahwa UU itu dibuat oleh manusia, dan manusia bisa merubah UU yang dibikinnya sendiri. Tidak ada yang sakral, tabu, dan suci dalam UUD kita. Cuma kita harus realistis karena sudah begitu menancapnya di *batok* kepala setiap pemimpin bahwa UUD 1945 kalau dirubah akan menimbulkan kegegeran. Jadi sementara itu jangan dulu. Kita bisa memberantas korupsi, kita bisa membuat proses interogasi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa mengutik-utik UUD 1945.

Tapi dalam jangka panjang gimana Pak, perlu nggak pembatasan persiden?

Oh jelas sekali

Artinya perlu dituangkan dalam UUD 1945?

Sesungguhnya UUD 1945 itu sudah membatasi. Misalnya, seperti istilah "dipilih kembali" itu dipilih sekali saja. Misalnya orang sudah makan dan disuruh tambah, itu tambahnya ya satu piring. Bukan makan boleh tambah, tambahnya tujuh piring, itu bukan tambah, itu namamya sudah tidak *bener*.

Tapi khan bisa diperjelas?

Itu-itu MPR lebih dari bisa, lebih dari mampu, lebih dari gampang. Kalau MPR mau membuat TAP MPR Pembatasan itu sudah selesai. *Nggak* usah-usah dipikir-pikir.***

Khoirul Rosyadi
A. Kurnia Elxo, Mashudi

Potensi Junta Militer
Pasca Soeharto

Terpusatnya komando militer pada Soeharto sepanjang Orde Baru sesungguhnya memendam efek buruk di masa datang. Potensi junta militer setelah kekuasaan Soeharto runtuh sangat tinggi terjadi. Friksi-friksi di tubuh militer yang selama ini terpendam akan bermunculan.

Berbicara politik Indonesia kontemporer maka pembicaraan otomatis harus menyinggung pula keberadaan militer. Fenomena militer Orde Baru sangatlah menarik. Ada keunikan tersendiri yang membedakan militer Indonesia dengan negara lain. Karena keunikan inilah, militer Orde Baru mampu mempertahankan legitimasinya di panggung kekuasaan sampai sekarang.

Dalam temu wicara kali ini, *Balairung* kembali menggagas keberadaan militer di Indonesia, terutama mengenai posisi dan perannya setelah kepemimpinan Soeharto berakhir. Apakah militer akan menjadi junta seperti di negara-negara Amerika Latin? Atau, warnanya akan berubah---mengurangi keterlibatannya di panggung politik?

Dalam diskusi kali ini *Balairung* mengundang **M. Najib Azca** (wartawan Tabloid *Adil*), **Eric Hiariej** (Staf *Institute Research Empowerment*), dan **R. Kristiawan** (pegiat Majalah Sintesa Fisipol UGM). Secara terpisah, *Balairung* mewawancarai **Kapten Alamsyah** (Kaur Humas Akmil, saat ini kuliah S2 Program Ketahanan Nasional Pasca Sarjana UGM). Diskusi ini dipandu **Asep Mulyana** dan dituliskan kembali oleh **Melanie.**

Selintas Militer Kemarin

Untuk mengerti bagaimana wajah militer mendatang (sehabis Soeharto turun tahta), paling tidak kita harus mengerti bagimana militer sekarang dan kemarin. Di samping itu memahami manuver politik ABRI yang terjadi selama kurun 30 tahun merupakan hal terpenting. Sebab dengan ini gambaran mengenai bagaimana wajah militer mendatang dapat sedikit terjelaskan.

REPRO KR

Militer dalam suatu latihan

Apa dan bagaimana gerak dan intervensi militer dalam kurun perjalanan bangsa selama ini? Menurut Kristiawan, intervensi militer dalam sosial politik dalam Orde Baru sampai tahun '90-an dapat dari dua model intervensi. *Pertama*, intervensi politik. *Kedua*, intervensi sipil.

Dalam melakukan intervensi politik, instrumen utama yang digunakan ABRI adalah Golkar. Keberadaan ABRI dalam Golkar sangat dominan sedemikian rupa sehingga melemahkan kekuatan sipil. Ketika Soedharmono ditunjuk sebagai Ketua Golkar, inilah langkah awal promosi ABRI terhadap Golkar. Efeknya, *partai kuning* ini memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu. Dengan realitas ini, militer di Golkar semakin menancapkan kuku dominasinya.

Sedangkan intervensi militer ke sipil, bisa dilihat dari bagaimana hubungan ABRI dengan Islam. Militer di awal Orde Baru merangkul Islam yang mayoritas. Meski kemudian kemunculan kekuatan-kekuatan

Islam, membuat militer jadi kuatir, ragu, dan curiga kepada Islam.

"Di samping adanya intervensi politik, ada pula intervensi sosial yang berupa indoktrinasi besar-besaran pada kalangan sipil lewat kurikulum Kewiraan, P4 atau diwajibkannya siswa SMP-SMA belajar. Pendidikan Bela Negara," lanjutnya.

Najib Azca

Dalam proses intervensi sosial, instrumen yang paling dominan adalah kekaryaan ABRI. Argumen ini dikuatkan oleh sejumlah bukti bahwa pos-pos penting dalam pemerintahan banyak diduduki oleh kalangan ABRI meski di pertengahan tahun '90-an ada penurunan.

Tapi apakah penurunan ini langsung menguatkan sipil? Ternyata tidak. Kristiawan menyimpulkan bahwa selama 30 tahun berdirinya Orde Baru, ABRI berusaha tampil menjadi kekuatan yang paling dominan dalam seluruh kehidupan sosial dan politik.

Bila ditarik ke belakang, aktivitas militer yang begitu jauh, menurut Najib tidak terlepas dari ideologisasi lewat dwifungsi ABRI-nya Jendral AH Nasution. Konsep yang disebut jalan tengah inilah yang membuat militer Indonesia berbeda dengan negara lain. Dwifungsi menjadi pembenaran ABRI untuk memasuki ruang-ruang sipil dan mendominasi sampai sekarang.

Sejak pertama Orde Baru berdiri, militer telah melakukan intervensi dalam pemerintahan. Cara ini dilakukan dengan menempatkan perwira-perwira ABRI di pos-pos penting pemerintahan. Sejak itu di mulai campur tangan ABRI dalam proses pengambilan kebijaksanaan politik.

Labih jauh Najib menjelaskan bahwa konsep dwifungsi merupakan upaya militer untuk melakukan politik wacana dengan cara sangat canggih. Diskursus yang diterapkan ABRI ini berangkat dari kesadaran bahwa kekuatan senjata tidak mempunyai manfaat bagi militer sendiri. "Dari situ jelas sulit mengharapkan terjadinya kudeta yang intens dari militer," ucap Najib.

Namun menurut Alamsyah, kosep dwifungsi ABRI telah ada sejak pemerintah Indonesia ada. "Dan ketika Presiden Soekarno menentang, Pak Dirman tetap bergerilya. Militer tetap eksis. Bila militer di negara lain dibentuk oleh pemerintah, tapi militer Indonesia tidak," ungkapnya.

Dengan sejarah yang seperti itu, maka ketika ada keterlibatan militer yang banyak menduduki jabatan-jabatan strategis struktural, menurut Alamsyah, itu bukan merupakan intervensi. Tapi justru permintaan dari Badan Legislatif lewat Mabes ABRI.

"Karena sejak awal konsep dan orientasi ABRI adalah pengabdian maka permintaan untuk duduk sebagai gubernur, bupati, walikota dan seterusnya harus dipenuhi," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sejak pendidikan, tidak pernah ABRI diorientasikan menduduki jabatan struktural. Tujuan ABRI hanya pengabdian terhadap rakyat dan bangsa. Militer tidak pernah menolerir kepentingan perseorangan.

Sementara itu, untuk mewujudkan fungsi sosialnya, ABRI memfungsikan diri sebagai pengontrol ketidakselarasan (instabilitas) dari pusat sampai pelosok-pelosok.

Alamsyah menambahkan bahwa ABRI berpolitik bukan untuk meraih jabatan. Yang menjadi tujuan adalah pengabdian lewat jabatan struktural. "Tujuan ini dicapai dengan cara duduk di legislatif, menjadi pimpinan-pimpinan. Di situlah realisasi dwifungsi ABRI," terang Alamsyah.

Dengan salah satu pemahaman dwifungsi yang begitu kuat maka untuk mencabut itu semua tidaklah mudah. Karena menurut Eric, dwifungsi telah mendarah daging dalam tubuh militer Indonesia. Sehingga, mustahil kita membayangkan profesionalisme dalam tubuh militer di mana tudasnya semata-mata menjaga keamanan negara.

Militer Pasca Soeharto

Dengan menguatnya militer lewat dwifungsi yang begitu hegemonik, maka mempertanyakan bagaimana wajah militer pasca turunya Soeharto mendatang, bagi Eric, tidak artinya. "Militer tetap militer, ia adalah tentara, ia tidak akan pernah berubah sifat keditaktorannya. *Dus,* ada tidaknya Soeharto, militer di Indonesia masih tetap seperti sekarang, kecuali kalau ada revolusi di Indonesia seperti di Bulgaria, Rumania, dan Uni Soviet," tandasnya.

Hal senada diungkap oleh Najib. Menurutnya, satu-satunya aktor politik dalam Orde Baru adalah militer dengan Soeharto-nya.

"Ketika kemudian muncul polemik tentang variabel umur (Soeharto sudah 77 tahun) hak itu terleweti begitu saja. Dan militer tetap dominan," ungkapnya.

Dengan peta seperti itu, menurutnya, yang dapat dilakukan untuk mengerti bagaimana militer pasca Soeharto adalah dengan cara melihat apa yang terjadi dalam proses transisi kepemimpinan pasca Soeharto.

Eric Hiariej

Namun, patut dicermati di sini bahwa konflik di tubuh militer sendiri sangat kecil kemungkinannya karena di kalangan militer punya kekuatiran jika terjadi kudeta sekali maka akan menyusul kudeta-kudeta lainnya.

"Karena transisi berdarah oleh satu kelompok akan menimbulkan iri kelompok lain, sehingga dia ingin melakukan hal yang sama. Maka militer pun tetap menunggu Soeharto turun--walau tidak puas-- dan menghindari terjadinya transisi
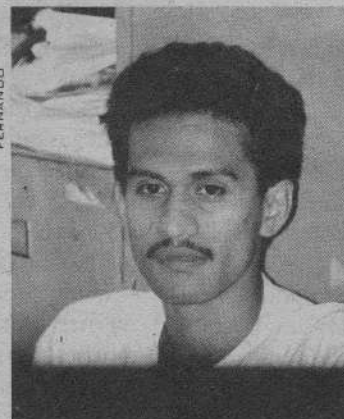
berdarah," ujarnya.

Analisis ini diperkuat oleh Alamsyah. Menurutnya, kudeta tidak akan pernah terjadi. Mengapa?

"Karena ABRI tidak menginginkan terjadinya kudeta. Selama empat tahun saya belajar konsep militer tidak ada kata-kata ABRI ingin melakukan kudeta," tandasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, selama ini militer loyal terhadap semua angkatan, baik AD, AL, dan AU. Junta militer bagi kalangan militer merupakan pantangan. "Bahwa pernah ada kup di tahun '60-an dan '70-an, itu nerupakan milisi-milisi sempalan yang tidak sejalan dengan komando pimpinan ABRI," tambah Alamsyah.

Dengan komitmen seperti itu, maka sepeninggal Soeharto, militer di Indonesia akan tetap seperti yang sekarang. "Tidak ada kemungkinan lain setelah Soeharto turun, situasi ini tidak menjadi masalah bagi militer," ujar Kristiawan.

Meski demikian, sepeninggal Soeharto, dapat dipastikan akan terjadi banyak keretakan di tubuh militer, karena kekuatan-kekuatan potensial di dalamnya saling bersaing.

"Tanpa Soeharto pun sebenarnya militer bisa jalan sendiri. Namun, karena selama ini Soeharto mampu meredam persaingan itu, konfliknya tidak muncul kuat di permukaan," ungkap Eric.

Militer dan Agenda Demokrasi

Melihat tidak banyaknya perubahan militer menjadikan kita pesimis terhadap kemungkinan militer menciptakan iklim yang demokratis di masa mendatang.

Namun, ini bukan berarti bahwa demokrasi di negeri ini sudah selamanya mati. Ada faktor eksternal yang mungkin dapat menyokong tumbuhnya demokrasi di Indonesia.

Amalinda Savirani, salah satu peserta diskusi, melihat salah satu faktor eksternal seperti kapitalisme global dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau strategi politik lain dari militer. Variabel ini penting diperhatikan oleh siapapun yang bertindak sebagai pengambil keputusan kelak.

"Berbagai pakar pembangunan, seperti Huntington, O' Donnel, Lawrence Whitehead, percaya bahwa pengaruh eksternal mempengaruhi proses demokratisasi," ungkapnya.

Namun Eric tidak sependapat dengan asumsi ini. "Tetapi, saya tidak percaya pada kekuatan eksternal itu. IMF misalnya. Jangan dikira IMF benar-benar membantu kita. Dia tidak peduli dengan demokrasi atau tidak. Bagi mereka yang penting uang pinjamannya kembali," tegasnya.

Menurut dosen Fisipol ini, badan-badan keuangan dunia mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan demokratisasi di Indonesia. Maka masuknya pengaruh eksternal seperti kapitalisme global, globalisasi dianalogikan pedang bermata dua.

R. Kristiawan

Sisi yang satu memperkuat proses demokratisasi seperti yang terjadi di Eropa Timur. Namun di sisi lain, ia mengidap ketidakberesan. "Sebagai contoh, keterlibatan Amerika Serikat dalam politik negara lain. Selama ini mereka tidak peduli dengan adanya demokrasi atau tidak. Kasus Indochina, di mana Amerika Serikat malah mendukung jendral paling otoriter di kawasan tersebut, merupakan bukti ketidakpedulian AS terhadap demokratisasi di kawasan tersebut," jelas Eric.

Kemungkinan pengaruh eksternal mendukung proses demokratisasi masih menjadi kontroversi. Kondisi ini menegaskan bahwa bantuan atau tekanan yang berasal dari dunia internasional untuk demokratisasi di Indonesia tidak dapat mutlak diharapkan dampak positifnya.

Namun pernyataan bahwa tekanan internasional merupakan pedang bermata dua sebenarnya lebih ditujukan untuk pemerintah Orde Baru.

Menurut John Gun, peserta diskusi yang lain, tuntutan International Monetary Fund (IMF) atau tekanan Amerika akan melahirkan *image* bahwa pemerintah Orde Baru sudah terpojok di mata dunia internasional dan rakyat Indonesia sendiri.

Bantuan IMF yang sebagian besar disokong Amerika, akan mendorong pemerintah Orde Baru membuat kebijakan-kebijakan yang menindas kaum buruh, kaum petani, dan semua kaum proletar. "Tapi, itu justru makin meningkatkan resistensi gerakan massa di Indonesia," tandas John Gun.

Berbicara pengaruh internasional, yang paling penting bagi Eric adalah bagaimana kesehatan pasar dunia internasional. Sebab, jika pasar dunia sehat tidak akan ada perubahan di dunia. Perubahan hanya bisa terjadi jika pasar dunia mengalami krisis atau ketidakseimbangan.

Wacana *Counter* Militer

Fenomena kerusuhan yang terjadi di berbagai kota belakangan ini yang oleh militer selalu diselesaikan dengan pendekatan kekerasan menjadi agenda diskusi yang menarik. Terutama dalam kaitan apakah fenomena itu bisa menjadi parameter dalam melihat wajah militer pasca Soeharto.

Bisa jadi bahwa kekerasan selama ini merupakan cermin dari militer Indonesia pasca Soeharto. Dan seandainya itu betul maka ada kerugian besar sekaligus kesalahan bagi militer.

Karena, menurut Najib, ketika militer tampil sangat keras, risiko yang harus ditanggung adalah kehilangan dukungan rakyat. Militer seharusnya menyadari bahwa ia tidak dapat memerintah dengan senapan. "Dengan demikian mereka seharusnya melakukan pendekatan persuasif dan mengutamakan negosiasi," tandasnya.

Bagaimana dengan kita masyarakat sipil? Apa yang bisa kita perbuat dan menyikapi perlakuan militer yang sedemikian otoriter?

"Yang bisa kita perbuat sekarang adalah melakukan dekonstruksi terhadap hegemoni militer dalam setiap lapisan dan sektor kemasyarakatan. Caranya dengan menyuburkan wacana-wacana tanding dalam masyarakat," tandas. Najib. ***

Melanie

transkrip oleh Utee' dan Eka Riska R

Referendum dan Konstitusi Baru:

Jalan Menuju Demokrasi Pasca Soeharto

REPRO DR

Ir. Sri Bintang Pamungkas,Ph.D.
Sekjen PUDI, mantan staf pengajar
Fakultas Teknik
Universitas Indonesia

UUD 1945 memang sudah harus diganti. Paling tidak harus diperbaiki atau disempurnakan. Pertama-tama, Undang-Undang Dasar tersebut memang hanya sekedar dibuat oleh Panitia Kecil secara kilat menjelang kemerdekaan, lalu disetujui sekedar untuk formalitas menjadi sebuah Konstitusi. Tidak pernah ada suatu lembaga wakil rakyat hasil pemilihan umum (Pemilu) yang benar-benar memeriksanya dengan seksama dan lalu menetapkannya menjadi Konstitusi RI.

Bahkan, di jaman Orde Baru sekalipun, setelah ada MPR hasil Pemilu, tidak pernah ada sidang MPR yang khusus diadakan untuk menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi RI. Justru, kalau kita melihat kembali di jaman Bung Karno, Kontituante hasil Pemilu 1955 yang khusus bertugas merancang dan menetapkan sebuah konstitusi bagi RI, pernah menolak UUD 1945 sampai tiga kali dengan pemungutan suara (voting) sebagai Konsitusi RI.

Selanjutnya UUD 1945 oleh Orde Baru benar-benar telah disakralkan. Seakan-akan tanpa UUD 1945 Indonesia akan berantakan. Seakan-akan UUD 1945 adalah absolut. Sakralisme ini tentu saja bertentangan dengan Dasar Negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja yang sakral itu hanya Allah dan firman-firman-Nya. Di dunia ini tidak ada yang sakral. Jadi sakralisme dibenci Allah karena tidak rasional. Padahal manusia diperintah untuk berpikir terus untuk memecahkan berbagai persoalan dunia dan manusia. Jadi sakralisme terhadap sesuatu yang tak absolut sama saja dengan menyerah kepada nasib.

Selain itu, UUD 1945 memang penuh dengan kekurangan. Antara lain, dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Juga terdapat beberapa inkonsistensi yang sifatnya sangat mendasar. *Pertama,* dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam menetapkan sistem perwakilan, seakan-akan kedaulatan di tangan rakyat telah sama sekali hilang, karena diserahkan sepenuhnya lewat Lembaga Perwakilan rakyat yang disebut MPR, sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi negara (Pasal 1 ayat 2). Lembaga MPR ini menjadi tidak jelas karena tersusun oleh DPR (legislatif) ditambah wakil golongan dan utusan daerah (pasal 2 ayat 1), seakan-akan ada wakil golongan lain selain golongan dalam di DPR

Kedua, hak-hak rakyat yang dasar dan asasi dalam hubungannya dengan kontrak sosial dengan pihak eksekutif juga tidak diformulasikan dengan baik. Hak-hak penduduk dan warga negara yang dinyatakan dalam pasal 27 hingga 34 terasa sangat kurang dan tidak jelas sehingga justru tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak dasar rakyat dan hak asasi manusia pada umumnya.

Ketiga, lembaga eksekutif mendapat kekuasan yang sangat besar dalam UUD 1945, khususnya lembaga kepresidenan. Selain kekuasaan pemerintah juga ada di tangan Presiden (pasal 4) yang sekaligus adalah kepala negara maka presiden juga mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang (pasal 5). Dari kenyataan besarnya kekuasan eksekutif yang diberikan UUD ini, maka hubungan antara rakyat dan negara yang dibayangkan bersifat integral (konsep integralistik) justru telah menempatkan rakyat dalam posisi yang sangat lemah dibawah eksekutif yang dengan mudahnya mengatasnamakan kepentingan negara dan nasional di atas kepentingan rakyat. Hal-hal tersebut, dalam kenyataannya berlangsung terus sampai sekarang sehingga membawa pihak eksekutif ke dalam diktatorisme dan fasisme.

Khusus dalam hubungan itu patut dicatat, ketidakjelasan UUD 1945 dalam menetapkan periode jabatan presiden (dan wakil presiden), seakan-akan UUD 1945 memang menghendaki, bahwa pimpinan eksekutif dapat dipilih berkali-kali tanpa batas (pasal 7). Tiadanya batas periode jabatan pimpinan eksekutif tersebut tidak hanya membawa konsekuensi kekuasaan absolut pada lembaga tersebut, tapi juga sekaligus mencegah terjadinya perubahan dan pembaharuan sistem yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maju yang sangat dinamis.

Keempat, kekuasan eksekutif yang sangat besar tersebut memungkinkan campur tangan pihak eksekutif, khususnya Presiden RI terhadap kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan, bahwa dalam UUD 1945 kekuasaan membuat undang-undang dan pelaksanaanya ada ditangan presiden RI. Sehingga, undang-undang yang dibuat untuk mengatur susunan dan kekuasaan legislatif (DPR, Pasal 19), bahkan lembaga tertinggi seperti MPR (Pasal 2 ayat 1), dan kekuasaan yudikatif (pasal 24-25), juga dengan mudahnya diintervensi oleh kekuasaan Presiden. Sebagai akibat selanjutnya adalah hilangnya

kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya (Pasal 28).

Kelima, kekuasaan eksekutif yang absolut itu menimbulkan berbagai ekses negatif dalam sistem pemerintahan, antara lain, sentralisme dan militerisme serta korupsi dan kolusi. Sebagai akibat dari sentaralisme daerah-daerah tidak bisa berkembang sebagaimana seharusnya sesuai dengan kemampuan dan kekayaan sumberdaya alam daerah. Militerisme, selain menimbulkan fasisme militer, juga mengakibatkan tersisihnya kekuatan sipil dan munculnya masyarakat sipil yang berdaulat, serta tumbuhnya kehidupan masyarakat demokratis pada umumnya. Beberapa kerusakan sosial lain yang ditimbulkan adalah terjadinya korupsi dan kolusi yang sulit sekali diberantas, bahkan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka perubahan atau penyempurnaan terhadap UUD 1945 diarahkan untuk meliputi bidang-bidang sebagai berikut. *Pertama*, lembaga MPR. Lembaga MPR dalam Konstitusi baru diformulasikan sebagai sidang gabungan antara DPR dan Senat. Meskipun MPR adalah cerminan dari lembaga tertinggi perwakilan rakyat, akan tetapi MPR tidak dinyatakan sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Di samping MPR, rakyat tetap berdaulat dalam menjalankan hak-hak dasar dan hak-hak asasinya.

THE OVERCOMING, ANDY SENO AJI

Semua keputusan di MPR dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Disini setiap anggota MPR berdaulat menyampaikan pendapat dan pikirannya. Fraksiisme sebagaimana yang diterapkan oleh rezim Soeharto, yang juga berarti menyimpang dari ketentuan UUD 1945 (pasal 3), ditolak. Demikian pula tidak ada *recall* terhadap anggota-anggota MPR. Demikian pula anggota-anggota DPR (masa jabatan 6 tahun) dan senat (masa jabatan 4 tahun) masing-masing dipilih dengan masa jabatan berbeda dari masa jabatan presiden dan wapres (masa jabatan 5 tahun), sehingga lembaga perwakilan rakyat dan lembaga kepresidenan masing-masing independen satu dari lainnya.

Sebagaimana dalam UUD 1945 (pasal 37), MPR bisa menghasilkan berbagai amandemen terhadap Konstitusi dengan proses yang mirip dengan proses pembuatan undang-undang. Bedanya, amandemen terhadap Konstitusi membutuhkan persyaratan persetujuan yang lebih besar. MPR tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden.

DPR adalah representasi rakyat dari berbagai kekuatan sosial politik yang tercermin dari partai-partai. Disini Indonesia akan memberlakukan sistem multi partai sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Tidak ada hak dari pemerintah untuk melarang adanya partai politik. Tetapi untuk bisa mengikuti pemilu dan mendapat dana dari negara, maka dibutuhkan beberapa persyaratan tertentu bagi setiap partai.

Anggota DPR dipilih dari partai-partai politik yang ada berdasarkan sistem distrik. Dengan demikian, pemilihan umum akan memilih orang yang berkualitas, dan bukan memilih tanda gambar. DPR dan anggota DPR mempunyai hak menyelidiki dan hak bertanya kepada Pemerintah dan Menteri yang bersangkutan. Pemerintah dan Menteri wajib memberi jawaban, baik secara lisan maupun tertulis.

Disini ada ketentuan yang jelas, bahwa pegawai negeri sipil, militer dan kepolisian sama sekali tidak dibenarkan untuk menjadi anggota suatu partai politik. Mereka kehilangan haknya untuk dipilih menjadi wakil rakyat, tetapi mereka tidak kehilangan haknya untuk memilih.

Sedang senat merupakan wakil dari berbagai daerah-daerah otonom. Di sini, semua propinsi, yaitu ke 26 propinsi yang ada di Indonesia (tidak terhitung Timor -Timur) akan di dorong untuk menjadi daerah yang otonom penuh. Indonesia tetap merupakan Republik Kesatuan.

Ketentuan mengenai daerah otonom ini sebetulnya juga ada dalam UUD 1945, yaitu pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian, ide mengenai otonomi ini bukan pula sesuatu yang baru. Apalagi mengingat otonomi masih berada di dalam batas-batas Negara Kesatuan RI, maka otonomi penuh daerah tingkat I ini tidak sama dengan negara bagian dalam sistem Negara Serikat. Ide otonomi ini sendiri muncul mengingat sentralisme selalu akan menimbulkan kesenjangan antar daerah dan, bahkan, keruntuhan sebagaimana terjadi di negara-negara Blok Timur. Selain itu, keragaman Indonesia justru merupakan salah satu unsur yang justru mempersatukan Indonesia, sesuai dengan lambang "Bhinneka Tunggal Ika".

Sebagai daerah berotonimi penuh, Gubernur /Kepala Daerah Tingkat I yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah bukan merupakan wakil dari pemerintah pusat. Selain itu, DPRD I dan II yang mengawasi berbagi kebijakan eksekutif di daerahnya, dipilih berdasarkan sistem proporsional bersamaan dengan pemilihan anggota DPR (pusat).

Tiap propinsi akan diwakili oleh tiga orang Senat yang berasal dari tiga Kabupaten yang berbeda. Anggota Senat dipilih langsung oleh rakyat di daerah setempat. Tugas Senat yang utama adalah memperjuangkan daerah yang
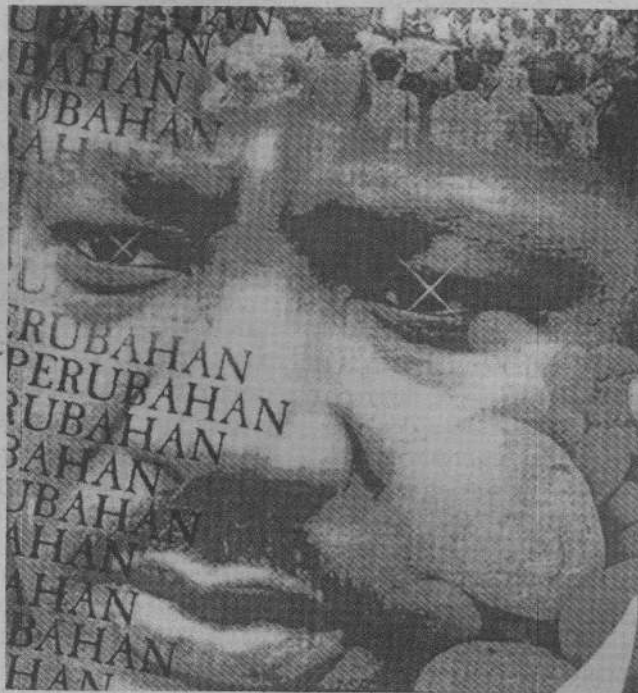
diwakilinya, serta mencegah adanya peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan daerah.

Selanjutnya, berbeda dari UUD 1945, kekuasan membuat undang-undang tidak hanya ada di tangannya Presiden dengan persetujuan dari DPR. Tetapi, secara bersama-sama ada ditangannya Presiden, DPR dan Senat. Dengan demikian, DPR dan Senat pun mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang, serta turut menentukan persetujuan atas setiap rancangan undang-undang, baik yang disampaikan sendiri maupun oleh pemerintah (presiden).

Dalam Konstitusi Baru, lembaga Kepresidenan diformulasikan secara lebih baik. Presiden mempunyai tugas khusus memimpin para menteri di departemen-departeman pemerintah. Sedang wakil presiden memimpin para pimpinan lembaga-lembaga pemerintah atau kementrian non departemen. Presiden dalam banyak hal masih mempunyai hak-hak yang hampir sama seperti dalam UUD 1945, tetapi dalam kekuasaan membuat undang-undang presiden tidak sendiri.

Menteri-menteri memang dipilih sendiri oleh presiden tetapi pilihan itu harus mendapat persetujuan dari MPR. Persetujuan dan Penolakan dilakukan dalam tempo satu minggu sejak penetapan kabinet oleh presiden. Apabila MPR berkeberatan, maka presiden harus mencari penggantinya. Jabatan presiden, anggota DPR dan Senat tidak bisa dirangkap, dan tidak bisa dirangkap dengan jabatan kenegaraan lainya. Demikian pula jabatan-jabatan bisnis dan yang semacam itu, harus dilepaskan sama sekali.

Presiden dan wakil presiden dipilih untuk waktu lima tahun dan setelah itu bisa dipilih sekali lagi. Pencalonan keduanya ada dalam satu paket. Tiap-tiap pasangan calon merupakan wakil dari partai-partai politik atau lembaga-lembaga lain yang ikut serta dalam pencalonan. Pemilihan presiden dan Wakil Presiden dilakukan langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang khusus dilakukan untuk itu.

Selain kemandirian dan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat dijamin sebagaimana MPR diatas, Kontitusi Baru juga menjamin kemandirian dari kekuasaan kehakiman (Yudikatif). Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas para hakim dan pengadilan-pengadilan lain. Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan melakukan penilaian hukum atau judicial review. Ketua Mahkamah Agung diusulkan oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan MPR.

Dalam Konstitusi Baru, hak-hak dasar dan hak-hak asasi manusia dinyatakan dalam satu bab khusus, sebagaimana UUD 1949 dan UUD 1950. Hak-hak dasar dan asasi warga negara dan penduduk ini sebagian besar diambil dari apa yang termuat dalam UUD 1949 dan 1950, sehingga tidak terlalu jauh berbeda dari pemikiran para pendiri Republik pada masa lalu. Selain itu juga perlu dicatat, bahwa pasal 27 hingga 34 sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tetap ada disana, tidak mengalami perubahan.

Konstitusi Baru juga menekankan fungsi militer dengan lebih jelas, yaitu untuk pertahanan negara. Konstitusi Baru mencegah terjadinya militerisme dan militerisasi yang menciptakan suasana darurat dan menimbulkan rasa takut kepada rakyat tiada hentinya. Bahkan militerisme dalam Orde Baru ini telah dianggap terlalu jauh, sehingga menimbulkan berbagai praktek mirip fasisme. Konstitusi Baru menginginkan sosok militer profesional yang hebat, sejahtera lahir dan batin beserta keluarganya, tetapi tidak menghendaki adanya superioritas militer diatas kedaulatan rakyat. Yaitu sosok militer yang tidak memihak dalam situasi konflik politik.

Sebagaimana ditetapkan pula dalam UUD 1949 dan UUD 1950, fungsi dan tugas Angkatan Kepolisian dalam Konstitusi Baru dibedakan dari militer. Tugas Angkatan Kepolisian pada umumnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum. Meskipun Angkatan Kepolisian antara yang di pusat dan di daerah-daerah otonom independen satu sama lain, mereka mempunyai koordinasi yang erat. Demikian pula ada koordinasi tertentu antara kepolisian RI dan semua Angkatan di militer. Selain kepolisian juga dibentuk petugas keamanan dari orang-orang sipil yang terlatih, khususnya untuk keamanan lingkungan.

Mukaddimah UUD 1945 juga masih dimuat sebagaimana aslinya, termasuk lima sila dalam Pancasila secara utuh. Dalam soal ini, Konstitusi Baru menekankan bahwa Pancasila adalah sekali lagi dasar negara. Dia bukan ideologi negara sebagaimana secara "tiba-tiba" dinyatakan begitu oleh rezim Orde Baru. Dengan menetapkan Pancasila kembali sebagai Dasar Negara, maka tidak perlu ada keragu-raguan bagi umat Islam khususnya dan warga negara pada umumnya untuk memilih ideologi yang lain. Ideologi yang lain adalah hak dari rakyat untuk memilihnya, sepanjang pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tetap ada.

Penyempurnaan UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara bertahap. Yaitu dimulai dari perubahan kecil-kecilan yang lalu disusul dengan perubahan besar atau yang sifatnya rutin sesuai dengan perkembangan jaman dan masyarakat. Perubahan kecil dilakukan melalui referendum. Referendum ditempuh karena Orde Baru telah menganulir berlakunya pasal 37 UUD 1945 melalui ketetapan MPR tahun 1983.

Dalam tahap pertama referandum itu rakyat diminta untuk menjawab "setuju" atau "tidak setuju" atas dua pertanyaan: (1) apakah rakyat setuju ada pembatasan periode jabatan presiden; dan (2) apakah rakyat setuju presiden (dan wakil presiden) RI dipilih secara langsung rakyat. Sebagaimana diketahui, absolutisme lembaga kepresidenan dalam rezim Soeharto sekarang ini menempatkan demokrasi Indonesia pada situasi yang kritis. Sehingga "menghentikan" absolutisme lembaga kepresidenan akan menjadi syarat awal bagi perubahan yang sifatnya lebih luas di masa mendatang.

Sekiranya referendum seperti diatas bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini maka konsep referendum ini justru akan bisa menghentikan siklus Soehartoisme menjelang Sidang Umum MPR Maret 1998 nanti. Selama rakyat Indonesia masih mau saja 'dijebak' oleh para penguasa kita untuk mengikuti 'pola MPR', yang disebut-sebut sebagi pola konstitusional, sebagaimana terjadi selama 30 tahun terakhir ini (dan akan terjadi pula nanti pada Maret 1998), maka selama itu pula rakyat tidak akan pernah berdaulat! Tetapi juga tidak boleh dilupakan, bahwa referendum itu sendiri sesuatu yang konstitusional! Hidup Referendum!***

MOLEKUL NASIONAL;

Sebuah Anti Inflamasi dalam Kunyit

Ditemukannya struktur 5 buah molekul turunan kurkumin oleh kelompok peneliti Fakultas Farmasi UGM melalui kerjasama dengan Vrije Universiteit Belanda dipercaya telah mengangkat nama UGM baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian diresmikannya nama molekul itu sebagai Molekul Nasional oleh Menteri Kesehatan RI, seakan memacu tim peneliti untuk membuat molekul anti inflamasi (radang) yang dikembangkan berdasar struktur turunan kurkumin itu. Tetapi apa sebenarnya molekul kurkumin itu sendiri?

Sejak dahulu manusia selalu berusaha memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas hidupnya, entah itu hewan maupun tumbuhan. Kuda, misalnya, telah lama digunakan sebagai alat transportasi oleh kebanyakan masyarakat sebelum munculnya alat tranportasi modern. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya Kunyit.

Kunyit, yang punya nama ilmiah *Curcuma Longa*, telah lama dikenal bangsa Indonesia sebagai tumbuhan yang mempunyai banyak khasiat berguna. Selain dipergunakan sebagai penyedap dan pewarna makanan, Kunyit juga dipergunakan untuk mengolesi sembilu saat memotong *ari-ari* bayi yang baru lahir sehingga tidak terjadi pembengkaan pada bekas potongan ari-ari.

Walaupun telah diketahui mempunyai efek mencegah pembengkakan, atau efek anti inflamasi, namun zat yang terdapat di dalam Kunyit yang berkhasiat mencegah pembengkakan itu sendiri belum diketahui. Sampai akhirnya sekitar tahun 1870 ilmuwan berhasil mengisolasi senyawaan tersebut dari Kunyit yang diberi nama *Curcumin*.

Di Indonesia sendiri yang banyak terdapat tanaman Kunyit, pengembangan Kunyit sebagai sumber daya alam dibidang pengobatan boleh dibilang belum berkembang. Walaupun ada yang mempergunakan sebagai obat terhadap beberapa penyakit, namun biasanya masih dalam skala pengobatan tradisional.

DISCOVER, ANDY SENO AJI

Mengingat potensi besar yang terkandung dalam Kunyit dan minimnya penelitian yang telah dihasilkan, maka Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap senyawa *Curcumin* yang terkandung di dalam Kunyit.

"Penelitian ini sendiri berawal dari kerjasama antara Fakultas Farmasi UGM dengan Vrije Universiteit Amsterdam Belanda dalam program MCPT *(Mid Career Training in Pharmacochemistry)* di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga farmasi," ungkap Dr Umar Anggoro Jennie. Berawal dari situlah, "Lalu Fakultas Farmasi UGM berusaha menindak lanjuti hasil dari pelatihan tersebut dalam bentuk penelitian."

"Penelitian ini sendiri melibatkan mahasiswa program S-3 yang telah mendapatkan pendidikan di Belanda," tambah dosen pengajar Fakultas Farmasi UGM ini.

Sejarah Molekul Nasional

Sekitar tahun 1990 dibentuklah suatu tim peneliti yang berusaha mengembangkan turunan *Curcumin* dengan harapan mempunyai daya anti inflamasi yang lebih baik daripada *Curcumin* itu sendiri. Tim peneliti ini terdiri dari Profesor Samhoedi

Reksohadiprodjo, Dr. Umar Jenie Anggoro, Drs. Supardjan, Dra. Nurfina, Drs. sardjiman, Drs. Sudibyo, Drs. martono, dan Dra. Oetari.

Sementara Ide awal dipilihnya *Curcumin* sebagai bahan penelitian berasal dari Profesor Samhoedi Reksohadiprodjo yang juga bertindak sebagai ketua tim penelitian.

Kenapa mesti Kunyit yang menjadikan mereka tertarik untuk melakukan penelitian? "*Curcumin* dipilih selain karena tanaman Kunyit banyak terdapat di Indonesia, juga karena kebutuhan akan obat anti inflamasi di Indonesia sendiri masih termasuk tinggi," Jelas Dr Umar, salah seorang dari tim peneliti.

Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang telah didapatkan para peneliti dari Fakultas Farmasi, tanpa melibatkan peneliti asing, akhirnya berhasil mengembangkan beberapa senyawa turunan *Curcumin*. Namun dari sekian banyak senyawa yang berhasil dikembangkan hanya lima diantaranya yang dipatenkan dengan nama Molekul Nasional.

Sistematika Penelitian

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah "dari suatu model matematis sampai pada suatu molekul". Konsep ini mengaplikasikan teknik QSAR *(Quantitative Structure Activity Relationship)* yang terdapat di dalam ilmu *pharmacochemistry* atau kimia farmasi. Dengan teknik ini dapat diketahui hubungan kuantitatif antara struktur kimia dari suatu molekul terhadap aktivitas molekul tersebut di dalam suatu sistem.

Untuk molekul obat, aktivitas yang dimaksud adalah khasiatnya terhadap suatu sistem organisme manusia ataupun hewan.

Sebelum suatu senyawa disintesis dan diuji coba secara klinis, diperhitungkan dahulu aktivitasnya secara teoritis. Apabila secara teoritis senyawa yang diperkirakan tidak memiliki khasiat yang dibutuhkan maka senyawa tersebut tidak perlu disintesis. Hal ini, tentu saja, dapat menghemat waktu penelitian.

Langkah awal dari penelitian Molekul Nasional adalah pengumpulan data fisik dan kimia dari senyawa *Curcumin*. Data ini diperlukan untuk memperkirakan aktivitas dari turunan *Curcumin* yang akan dikembangkan.

Turunan *Curcumin* adalah berupa *Curcumin* yang beberapa gugus fungsionalnya, misalnya gugus metilen aktif, telah diganti dengan gugus baru.

Penambahan gugus baru ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan molekul dalam hal daya anti inflamasi, mengurangi toksisitas, dan meningkatkan selektivitas molekul terhadap penyakit.

Selektivitas obat merupakan kemampuan obat untuk mengobati suatu penyakit tertentu saja tanpa mempunyai efek samping terhadap fungsi-fungsi organ yang lain.

TITIK PUJI LESTARI

Dengan bantuan komputer, sekarang struktur molekul dari senyawa yang akan diselidiki dapat ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian pergantian dari gugus-gugus yang ada dapat dilakukan. Tentu saja dengan mempertimbangkan apakah gugus-gugus yang kita ubah itu secara hukum-hukum kimia dan fisika memungkinkan.

Selanjutnya berdasarkan konsep QSAR dan data-data yang diberikan dapat diperkirakan aktivitas dari senyawa tersebut. Dengan teknik di atas dikembangkan beberapa molekul untuk diteliti lebih lanjut.

Menurut Drs Sardjiman, salah satu anggota tim peneliti, jumlah senyawaan yang mempunyai potensi kurang lebih mencapai 99 buah molekul.

Langkah berikutnya adalah pengujian secara farmakologi molekul-molekul yang mempunyai potensi di atas. Uji farmakologi ini menggunakan hewan sebagai bahan percobaan. Para peneliti menggunakan lever tikus untuk menguji Molekul Nasional.

Walaupun secara teori molekul-molekul tersebut mempunyai sifat yang potensial namun perlu diuji sifat-sifat sesungguhnya.

Selain itu juga perlu diketahui mekanisme yang terjadi dalam metabolisme tubuh apabila obat tersebut digunakan. Pengujian tersebut diantaranya meliputi uji sifat anti inflamasi, anti oksidasi, uji toksisitas, dan uji penghambatan aktivitas senyawa tersebut terhadap *enzym Glutation Entransferase* pada metabolisme tubuh fase ke dua. Metabolisme ini melibatkan sistem konjugasi *enzym Glutation Entransferase* dalam tubuh kita.

Enzym Glutation Entransferase diperlukan tubuh kita sebagai katalis reaksi antara *Glutation* dalam tubuh kita dengan obat yang kita gunakan. Apabila obat yang kita gunakan ternyata menghambat kerja *enzym Glutation*, maka toksisitas obat tersebut akan bertambah. Namun tidak berarti sifat ini tidak diinginkan sama sekali.

Untuk beberapa jenis obat tertentu kerja *enzym Glutation* memang dihambat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah obat penyakit kanker.

Peluang Molekul Nasional

Ternyata dari beberapa molekul yang diteliti terdapat beberapa molekul yang amat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai obat anti inflamasi. Selain mempunyai daya anti

inflamasi, molekul- molekul ini mempunyai sifat-sifat yang lebih baik daripada *Curcumin*.

"Bahkan ada yang memiliki sifat anti oksidasi 10 kali lipat lebih baik daripada Curcumin," ungkap Sardjiman anggota tim yang menemukan sekitar 47 buah molekul.

"Daya basmi bakterinya pada konsentrasi tertentu juga mempunyai kualitas yang sama dengan obat pembunuh bakteri yang umum dipakai, misalnya *Miconazell*," tambah Sardjiman.

Akhirnya dari sekian banyak molekul yang diteliti, lima buah diantaranya mempunyai kualitas terbaik dipilih untuk dipatenkan dan diberi nama Molekul Nasional.

Menurut Sardjiman, Kualitas Molekul Nasional itu sendiri dapat diandalkan. Untuk mengetahui seberapa jauh kualitasnya, Molekul Nasional pernah diuji coba dengan cara membandingkannya dengan *Phenyl Butazone*, obat anti inflamasi yang paling umum digunakan. Dan hasilnya, menurut Umar jenie, salah satu tim peneliti, Molekul Nasional mempunyai daya anti inflamasi paling tidak sama dengan Phenyl Butazone.

"Daya basmi bakterinya pada konsentrasi tertentu juga mempunyai kualitas yang sama dengan obat pembunuh bakteri yang umum dipakai misalnya"

Bahkan dibandingkan dengan Phenyl Butazone, Molekul Nasional mempunyai beberapa kelebihan yakni; tingkat toksisitas lebih rendah dan harga jual yang diperkirakan akan lebih murah.

Harga jual yang lebih murah ini dimungkinkan karena untuk membuat Molekul Nasional hanya memerlukan sekitar dua langkah pengolahan saja. Reaksi pembentukannya hanyalah reaksi kondensasi Novanagel. Sedangkan biasanya dalam pembuatan obat lainnya memerlukan langkah pengolahan yang panjang dan kompleks sehingga membutuhkan biaya lebih besar.

"Selain itu juga bahan baku pembuatan Molekul Nasional relatif murah dan banyak tersedia di Indonesia," ungkap Sardjiman yang juga sedang mengembangkan senyawa Eritromisin ini.

Namun sejauh ini, penelitian yang dilakukan barulah dalam skala laboratorium, belum dalam skala industri. Oleh karena itu Fakultas Farmasi UGM bekerjasama dengan dua perusahaan swasta yang bergerak di bidang farmasi mengadakan kerjasama untuk mengembangkan dalam skala industri.

Pengembangan ini termasuk analisa pasar dan uji klinis Molekul Nasional terhadap manusia. Uji klinis inilah yang merupakan verifikasi apakah Molekul Nasional laik dipasarkan atau tidak. Dan apabila semuanya berjalan dengan lancar maka Molekul Nasional diharapkan sudah masuk pasar sekitar tahun 2002.

"Mungkin dari kelima Molekul Nasional ini tidak semuanya yang dapat dikembangkan dalam skala industri. Namun kami optimis. Do'akan saja, karena Molekul Nasional ini merupakan yang pertama di Indonesia," harap Umar Jenie.

Memang walaupun harus menunggu beberapa tahun lagi untuk melihat Molekul Nasional beredar dipasaran, namun kita semua berharap agar supaya hasil karya peneliti Indonesia ini dapat menjadi langkah awal. Apalagi, seperti dikatakan Umar Jenie, semua proses pengembangannya dapat dilakukan di Fakultas Farmasi sendiri.

Dan lagi, alam Indonesia telah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan urutan nomer dua dalam hal keanekaragaman hayati. Sekarang tinggal kemauan dan usaha para ilmuwan kita untuk mengembangkan potensi yang ada.***

Arifin, Fitrianto

Implikasi Reformasi Perbankan Dalam Menyehatkan Perekonomian Nasional

oleh: **Widigdo Sukarman**
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PENDAHULUAN

Sejarah perbankan di Indonesia mencatat, deregulasi perbankan pertama kali dilakukan pada tahun 1983, dimana pada saat itu pemerintah memberikan kebebasan perbankan untuk menentukan sendiri tingkat suku bunga. Namun kebijakan ini tidak membawa dampak terlalu besar bagi dunia perbankan nasional. Baru pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988(PAKTO 88) yang memberikan perubahan cukup berarti bagi iklim perbankan, sehingga kebijakan ini disebut sebagai awal liberalisasi perbankan nasional.

Ada enam inti kebijakan pemerintah pada PAKTO 88 yang mampu merubah wajah perbankan nasional, yakni:

1. Kemudahan untuk mendirikan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Bank Perkreditan Rakyat baik yang baru maupun cabang.
2. Mengijinkan bank menerbitkan berbagai bentuk tabungan untuk menarik dana pihak ketiga.
3. Perluasan bank devisa, pendirian bank campuran, penyempurnaan mekanisme *swap*, serta jual beli valuta asing dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
4. Penempatan dana BUMN dan BUMD maksimal 50% pada bank swasta, ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 15% menjadi hanya 2%.
5. Diaktifkannya operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*)
6. Pengenaan pajak pada deposito berjangka, sertifikat deposito serta tabungan dengan saldo lebih dari Rp 5 juta.

Sesuai dengan orientasi kebijakan yang menitikberatkan pengerahan dana dari masyarakat (*financial deepening*) untuk pembangunan nasional, maka wajar kalau kebijakan tersebut bersifat lebih mengupayakan pada cara-cara untuk memobilisasi dana msayarakat.

Hasil nyata dari PAKTO 88 adalah meningkatnya bank *mindednees* masyarakat sehingga mendorong peningkatan jumlah dana yang dapat dihimpun perbankan nasional (lihat tabel 1). Peningkatan ini selanjutnya menambah jumlah dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit pada dunia swasta.

tabel 1
PERKEMBANGAN DANA DAN KREDIT PERBANKAN
(dalam triliun rupiah)

	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97*
DANA	37,52	54,37	83,16	95,12	114,85	142,67	170,41	214,76	281,71	316,00
KREDIT	42,45	62,92	96,98	112,38	122,93	150,26	188,88	234,61	229,92	340,43

Sumber: Statistik Keuangan BI
***) hingga Juli 1997**

Peningkatan dana masyarakat pada akhir Juli 1997 sebesar Rp. 316,00 triliun atau hampir 8,5 kali lipat bila dibandingkan dengan penghimpunan dana perbankan pada akhir tahun 1988 yang hanya sebesar Rp. 37,52 triliun. Demikian juga penyaluran kredit meningkat dari Rp. 42,45 triliun menjadi Rp. 340,03 triliun pada akhir Juli 1997. Dengan meningkatnya dana masyarakat ini kebutuhan dana investasi pembangunan yang

sebelumnya pemerintah menanggung porsi terbesar secara berangsur berubah menjadi tanggungan pihak swasta.

PERMASALAHAN PERBANKAN INDONESIA

Dalam perjalanannya, Pakto 88 mampu mendorong akumulasi pendanaan. Namun dibalik kesuksesan ini perbankan nasional juga mengalami beberapa permasalahan struktural, seperti keterbatasan modal, sumber daya manusia dan teknologi sistem dan prosedur. Di sisi sumber daya manusia, kurangnya tenaga profesional menyebabkan terjadinya bajak-membajak bankir dan lemahnya faktor *risk management*.

Jauh sebelum krisis nilai tukar Rupiah merebak pada Juli 1997, sebenarnya kondisi beberapa bank di Indonesia tidak begitu baik, terutama jika dikaitkan dengan masalah kesehatan bank. Sejumlah bank diketahui mengalami permasalahan dalam hal BMPK, CAR dan sebagainya.

Masalah pemberian kredit pada grup usaha yang melampaui ketentuan BMPK ini sebenarnya telah diantisipasi oleh otoritas moneter dengan membatasi fasilitas kredit terhadap kelompok usaha sendiri maksimum hanya sebesar 10% dari penyertaannya pada bank atau 25% dari penyertaannya pada bank terhadap seluruh perusahaan yang menjadi kelompok usahanya, aturan ini kemudian dibuat lebih transparan pada tahun 1993, lewat SK Dir BI No. 26/21/KEP/DIR tgl. 29 Mei 1993 dimana fasilitas kredit terhadap kelompok usaha dibatasi hanya 10%. Dalam hal ini pihak otoritas moneter memberi keleluasaan pelaksanaannya hingga akhir Maret 1997. Namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan disinyalir masih banyak bank yang melanggar ketentuan ini, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan perusahaan intermediaris dengan pola *back to back finance*.

Jika dalam kondisi normal pelanggaran rambu-rambu perbankan dapat berdampak buruk bagi kinerjanya apa lagi dalam kondisi krisis seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Pelanggaran atas rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter akan menyebabkan bank mengalami problema yang sangat mendasar. Misalnya peningkatan asset Dollar AS menyebabkan *Retirn On Asset* (ROA) bank menurun. Demikian pula dengan ratio kecukupan modal (CAR) yang turun drastis karena meningkatnya kewajiban dalam Dollar AS.

Selain itu, situasi krisis menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak meningkatanya *Nen Performing Loans*(NPLs), yang pada gilirannya akan menurunkan modal bank. Untuk itulah reformasi perbankan yang diluncurkan pada tanggal 27 Januari 1998 dirasakan sudah sangat mendesak.

UPAYA PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Pemerintah menyadari rendahnya syarat minimal modal disetor dan kurang efisiennya operasional perbankan merupakan faktor utama lemahnya fundamental perbankan nasional. Modal bank di Indonesia dibandingkan dengan modal bank-bank di negara ASEAN lainnya masih kalah jauh (lihat tabel 2). Akibatnya perbankan di Indonesia sulit bersaing dengan perbankan di negara-negara ASEAN.

Rendahnya modal disetor menyulitkan perbankan nasional mengembangkan bisnisnya. Hal ini juga menyulitkan bank dalam memenuhi ketentuan CAR, BMPK maupun *Net Open Position*(NOP) atau posisi devisa netto(PDN).

Faktor lain lemahnya kondisi perbankan nasional adalah kurang efisiennya pengelolaan bank, hal ini tercermin dari tingginya suku bunga perbankan di Indonesia dibandingkan dengan perbankan di negara-negara ASEAN lainnya(lihat tabel 3). Tingginya suku bunga perbangkan di Indonesia menyulitkan dunia usaha memenuhi kewajibannya kepada bank. Akibatnya, kredit bermasalah semakin membesar.

Diferensiasi tingkat bunga kredit di antara negara-negara ASEAN seperti terlihat pada tabel 3 di atas telah mendorong beberapa bank di Indone-

tabel 2

SYARAT MODAL MINIMAL DI BEBERAPA NEGARA ASEAN

NAMA NEGARA	MODAL MINIMAL*
SINGAPURA	2.500.000,00
MALAYSIA	1.500.000,00
THAILAND	700.000,00
PHILIPINA	400.000,00
INDONESIA	150.000,00

Sumber: *Kompas*, 12 November 1997

***) Equivalent dalam Rupiah**

sia mencari pinjaman US Dollar dari pihak asing, kalangan dunia usaha juga melakukan hal yang sama, bahkan sebagian besar tidak di-*hedging*(lindung nilai).

Agar permasalahan yang dialami perbankan tidak semakin berat, pemerintah berulangkali menghimbau pada perbankan Indonesia segera memperbaiki kondisi internalnya dengan cara konsolidasi baik melalui *merger* ataupun akuisisi. Keseriusan otoritas moneter untuk menyehatkan kondisi perbankan nasional ditunjukkan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah(PP) No. 68 tahun 1996, tentang tata cara pencabutan izin usaha bank dan likuidasi bank, yang direvisi dengan PP no. 40/1997 tanggal 31 Oktober 1997.

diharapkan akan medorong bank-bank swasta untuk melakukan hal yang sama.

Likuidasi bank-bank swasta serta krisis nilai tukar yang berkepanjangan ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi perbankan nasional, terutama bank-bank swasta tertentu ditandai menurunnya kepercayaan masyarakat serta kreditur kepada perbankan nasional. Indikator lainnya adalah terjadinya penarikan dana besar-besaran (*rush*). Akibatnya bank-bank yang terkena *rush* mengalami kesulitan likuiditas. Laporan mingguan Bank Indonesia menunjukkan simpanan pada bank swasta nasional pada bulan November turun sebesar 12 % atau Rp. 22,925 triliun menjadi Rp. 169,015 triliun dibanding bulan Oktober 1997 yang masih sebesar Rp. 191,940 triliun.

Penurunan simpanan pada bank swasta secara langsung menurunkan likuiditas pada bank-bank tertentu, akibatnya tingkat bunga (*inter bank call money*) meningkat hingga mencapai angka 175 % pa. Kondisi ini tentunya sangat tidak sehat bagi perbankan secara nasional, sehingga bila kondisi ini berlangsung terlalu

tabel 3

TINGKAT BUNGA DEPOSITO DAN PRIME RATE DI BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA DAN AMERIKA SERIKAT

(dalam %)

NAMA NEGARA/MATA UANG	DEPOSITO(3MO)	PRIME RATE	MARGIN PERBANKAN
INDONESIA/RUPIAH	14,500	18,250	3,750
SINGAPORE/DOLLAR	3,500	6,000	2,500
MALAYSIA/RINGGIT	7,700	9,450	1,750
THAILAND/BAHT	8,750	13,750	5,000
PHILIPINA/PESO	9,000	14,500	5,500
AMERIKA/DOLLAR	5,530	8,500	2,970

Sumber: *Asia Week, July 12, 1997*

Namun himbauan pemerintah ini kurang mendapat respon positif dari pelaku perbankan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut ijin operasi 16 bank swasta nasional pada tanggal 1 November 1997. Langkah tersebut diambil pemerintah tentunya dengan tujuan mengurangi dampak buruk kondisi perbankan nasional terhadap perekonomian secara makro.

Pemerintah juga mengumumkan rencana penggabungan bank-bank BUMN, yaitu, Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi anak perusahaan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tetap dipertahankan seperti semula (31/12/97). Upaya ini

lama akan berakibat fatal bagi sistem perbankan nasional yang pada akhirnya akan menggiring perekonomian pada situasi yang lebih buruk.

Agar tujuan penyehatan perbankan nasional dapat tercapai seperti yang diharapkan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan nilai rupiah terhadap dollar AS, pemerintah mengumumkan reformasi perbankan nasional pada 27 Januari 1998.

REFORMASI PERBANKAN INDONESIA

Reformasi perbankan dilukiskan gubernur BI **Sudradjat Djiwandono** sebagai langkah awal, sekaligus sebagai kelanjutan dari program reformasi ekonomi yang diumumkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Januari 1998 saat penandatanganan *letter of intent* dengan managing direktur dana moneter internasional (IMF), **Michael Camdessus**. Inti reformasi itu antara lain, negara menjamin semua simpanan nasabah (deposito, giro dan tabungan) pada semua bank di Indonesia, kecuali bank asing. Jaminan ini berlaku baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Penngecualian jaminan ini juga mencakup pelonggaran persyaratan bagi pemodal asing untuk memiliki bank di dalam negeri.

Bersamaan dengan pemberian jaminan ini, dalam upaya memulihkan kepercayaan pada perbankan nasional, pemerintah juga telah membentuk badan penyehatan perbankan nasional (BPPN) yang akan bertanggung jawab dalam memperbaiki bank-bank yang saat ini dalam kondisi kurang sehat serta tidak memiliki prospek kuat untuk pulih. Tujuan pendirian BPPN ini untuk merehabilitasi bank-bank bermasalah dan memulihkan sistem perbankan.

BPPN merupakan lembaga independen dengan dua fungsi utama yakni sebagai pengawas bank-bank yang memerlukan restrukturisasi (sekaligus mengelola proses restrukturisasi itu), dan melakukan pengelolaan asset bank-bank yang melakukan proses restrukturisasi seperti merger, akuisisi dan konsolidasi.

Dengan jaminan serta pengawasan yang ketat terhadap bank yang sedang menghadapi permasalahan, diharapkan dapat menenangkan nasabah. Dengan demikian pemerintah juga tidak harus membayar semua dana nasabah jika kepanikan mereda. Sehubungan dengan pemberian jaminan pada bank pemerintah akan menerbitkan obligasi yang sumber dananya antara lain dari APBN namun dilakukan amortisasi pada APBN, maksudnya agar tidak memberatkan APBN dalam satu tahun anggaran. Jaminan ini juga berlaku hanya dua tahun sejak diumumkan, selanjutnya fungsinya akan digantikan dengan sistem asuransi pinjaman (*deposit insurance scheme*).

Mengingat pelaksanaan sistem asuransi pinjaman baru dapat dilaksanakan dalam dua tahun lagi, maka selama pemerintah memberikan jaminan terhadap dana masyarakat pada perbankan pemerintah memberlakukan tarif premi yang seragam untuk seluruh bank. Kondisi ini tentunya menyebabkan peta persaingan perbankan akan berubah, mengingat bank sehat maupun bank yang tidak sehat akan memperoleh perlakuan sama sehingga bank-bank tertentu terutama yang kurang sehat akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik dana masyarakat sebanyak mungkin bila perlu dengan tingkat bunga setinggi mungkin agar bank-nya kembali dapat disehatkan. Namun kondisi ini secara makro perbankan akan merusak sistem yang ada sebagai dampak dari perang suku bunga. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka pemerintah membatasi penawaran suku bunga yang dapat ditawarkan pada nasabah. Selain itu pertumbuhan penyaluran kredit juga dibatasi.

Dalam hal pembatasan tingkat bunga yang dapat ditawarkan pada nasabah, otoritas moneter akan menentukan tingkat suku bunga deposito yang mengacu pada dua puluh bank besar di Indonesia (Jakarta Inter Bank Offered Rate-JIBOR) untuk rupiah, sementara untuk mata uang asing mengacu pada bank-bank utama di Singapura (Singapore Inter Bank Offered Rate-SIBOR). Toleransi atas suku bunga yang dapat ditawarkan pada pemilik dana diberikan maksimal 5% di atas acuan tersebut.

Mengenai pembatasan ekspansi kredit, otoritas moneter hanya memberikan toleransi pertumbuhan kredit maksimum 2 % dari pertumbuhan bank bersangkutan per bulan. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lagi ekspansi kredit berlebihan. Selain itu, untuk menghindari adanya rekayasa tertentu untuk memanfaatkan jaminan pemerintah, maka pemberian kredit dan fasilitas pembiayaan lain dari bank pun akan dibatasi.

Lanjutan dari langkah-langkah reformasi perbankan ini adalah diumumkannya syarat minimal modal disetor bank umum (baik devisa maupun non devisa) pada tanggal 10 februari 1998, yakni minimal Rp. 3 triliun secara bertahap, yakni, pada akhir tahun 1998 harus terpenuhi sekitar Rp. 1 triliun, pada akhir tahun 1999 (kemudian ditunda menjadi tahun 2000) minimal menjadi Rp. 2 triliun dan pada tahun 2003 menjadi Rp. 3 triliun.

IMPLIKASI

Reformasi perbankan ini tentu saja membawa implikasi bagi kalangan perbankan, masyarakat nasabah, pemerintah, maupun kalangan dunia

Implikasi bagi bank antara lain berkaitan dengan adanya jaminan deposan, pembentukan BPPN dan kepatuhan terhadap ketentuan BI. Diperkirakan dana nasabah akan meningkat secara *signifikan*, karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional sehingga likuiditas bank membaik.

usaha. Implikasi bagi bank antara lain berkaitan dengan adanya jaminan deposan, pembentukan BPPN dan kepatuhan terhadap ketentuan BI. Diperkirakan dana nasabah akan meningkat secara signifikan, karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank nasional sehingga likuiditas bank membaik. Kepercayaan bank-bank asing dan bank-bank koresponden juga meningkat, sehingga mereka mau mengaksep L/C yang diterbitkan

bank-bank di Indonesia.

Meskipun demikian, adanya jaminan itu tidak menyebabkan perbankan bersikap seenaknya dan menggantungkan kepada pemerintah. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan adanya jaminan atas dana nasabah, maka seolah-olah tanggung jawab atas segala resiko pengelolaan dana tersebut beralih ke lembaga penjaminan. Ini jelas pemahaman yang salah kaprah. Prinsip kehati-hatian didukung penerapan *self regulatory banking* dalam mengelola usaha bank tetap harus menjadi pedoman utama. Pengelola bank juga harus pandai-pandai memantau posisi pertumbuhan valasnya agar tidak melebihi ketentuan 2 %, kapan harus ekspansi dan kapan harus kontraktif.

Direksi dan pengurus bank juga tidak bisa seenaknya dalam mengelola bank. Jika mereka berbuat hal yang diluar ketentuan, mereka akan dikenai sanksi hukum, misalnya dituntut ke pengadilan. Sebab, ini uang yang digunakan untuk menjamin adalah uang negara. Konsekuensinya, perbankan harus menjalankan kepercayaan yang diberikan pemerintah. Perhimpunan bank-bank pemerintah (Himbara) dan perhimpunan bank-bank swasta nasional (Perbanas) dapat menghimbau para anggotanya untuk mematuhi rambu-rambu perbankan.

Reformasi perbankan yang kini diupayakan pemerintah tak pelak lagi merupakan wahana untuk menyehatkan kondisi perbankan nasional, memulihkan kepercayaan dan menyiapkan perbankan nasional agar mampu bersaing dengan bank-bank asing.

Terlebih dengan adanya ketentuan dimana setiap bank harus menandatangani suatu pernyataan bahwa mereka bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan (seperti suku bunga, ekspansi kredit, pembatasan deposito valas dan penyaluran kredit valas) serta pemeriksaan yang lebih ketat dari biasanya. Ketidakberesan dalam mengelola bank yang menjurus banknya menjadi tidak sehat akan diserahkan kepada BPPN. untuk menyehatkannya. Namun demikian terhadap pemilik dan pengurus bank akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya sehingga banknya tidak sehat. Bahkan kepada pungurus bank yang terbukti menyebabkan kerugian negara akan ditindak secara hukum dan administratif berupa pelarangan meneruskan profesinya diperbankan.

Namun yang berkaitan dengan rencana peningkatan modal minimum bank dari Rp. 150 milyar menjadi Rp. 3 triliun (terutama untuk bank devisa), ternyata mendapat respon yang berbeda. Sebagian pengamat, pemilik dan pengurus bank menyatakan setuju, namun sebagian lagi menyatakan kurang setuju dengan alasan masing-masing. Mereka yang setuju beralasan, kalau kita mau bersaing dengan bank-bank asing, mau tidak mau kita harus memperkuat permodalan. Caranya, pemilik dan pemegang saham menambah dana segar, atau *go public* (jika *timing*nya memungkinkan) untuk meraup dana murah, atau mengundang investor baru. Cara lainnya adalah merger dengan bank lain atau rela diakuisi bank lain.

Sedangkan yang tidak setuju, umumnya berpendapat harus diberlakukan dengan kriteria tertentu. Sebab jika ketentuan ini berlaku sekarang, akan mematikan banyak bank. Ketentuan permodalan baru itu seharusnya diberlakukan bagi bank yang akan atau sudah go international dengan asset triliunan. Bagi bank-bank kecil atau menengah, perlu kriteria tersendiri. Alasannya, setiap bank punya segmen masing-masing.

Implikasi bagi masyarakat nasabah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank jelas berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan mereka terhadap perbankan. Masyarakat, terutama para penabung dan deposan, menjadi lega, tenang, tidak panik atau tidak ikut-ikutan mengambil tabungannya di bank. Masyarakat yang kebanyakan merasa awam bank, tidak mau berpikir panjang atau mengambil resiko. Merekalah yang kemudian ramai-ramai menarik dananya dari bank-bank swasta tertentu untuk dipindahkan ke bank pemerintah dan bank asing. Sikap masyarakat yang seperti itu sangat bisa dipahami, karena kebanyakan dari mereka tabungannya terbatas dan tidak sedikit yang mengandalkan perolehan bunga setiap bulan untuk penghasilan rutin.

Kini tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk bersikap ragu terhadap keamanan dananya yang disimpan di bank-bank dalam negeri. Kepastian itu diperkirakan akan membawa efek positif, terutama dari segi psikologis, shingga masyarakat tidak akan cepat-cepat percaya pada isu-isu mengenai perbankan. Sebab ketidak tahuan masyarakat mengenai seluk beluk perbankan kerap menyebabkan mereka rentan terhadap isu. Contohnya, penggabungan atau merger antar bank yang bertujuan memperkokoh intitusi perbankan saja bisa ditangkap sebagai sesuatu yang meresahkan terutama berkaitan dengan kemanan dananya.

Sedangkan implikasi bagi dunia usaha (sektor riil)

antara lain bergairahnya kembali kegiatan usaha mereka, baik karena pulihnya kepercayaan mereka maupun karena meningkatnya likuiditas bank. Meningkatnya likuiditas bank berdampak pada penurunan suku bunga, karena bank mampu menekan *cost of fund*. Hal ini jelas berdampak positif bagi dunia usaha. KADIN Indonesia sebagai wadah para pengusaha Indonesia menyambut gembira atas keputusan pemerintah menjamin seluruh dana milik deposan/kreditur dan penyesuaian utang luar negeri swasta.

Jaminan penuh pemerintah akan menciptakan ketenangan kepada para deposan dan juga *counter-part* perbankan luar negeri sehingga L/C yang diterbitkan perbankan nasional diterima mitra luar negerinya. Investor asing makin percaya iklim berusaha di Indonesia lebih baik dan prospektif, karena kini pemerintah "berada di belakang" perbankan nasional. Meningkatnya kegiatan usaha --yang tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar-- pada gilirannya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun untuk tahun anggaran 1998/1999 ini ditargetkan hanya bertumbuh nol persen.

Implikasi bagi pemerintah, khususnya BI selaku bank pengawas dan pembina adalah tetap dituntut meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap bank-bank umum nasional, walaupun sudah ada jaminan atas keselamatan dana deposan dan pendirian BPPN. Sistem pengawasan yang sudah ada bukannya kurang memadai, hanya karena kurang intensif diimplementasikan dan faktor rendahnya kredibilitas dan mentalitas petugas pengawasnya yang menyebabkan bank-bank nasional menjadi bermasalah. Jajaran Direksi BI yang baru yang terdiri dari unsur intern dan ekstern merupakan komposisi yang baik untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan.

PENUTUP

Reformasi perbankan yang kini diupayakan pemerintah tak pelak lagi merupakan wahana untuk menyehatkan kondisi perbankan nasional, memulihkan kepercayaan dan menyiapkan perbankan nasional agar mampu bersaing dengan bank-bank asing.

Adanya jaminan pemerintah terhadap pemilik dana serta kreditur pada perbankan nasional serta rencana pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) diharapkan akan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sehingga dapat memperbaiki kondisi perbankan nasional yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat. Meskipun demikian tidak berarti pengurus bank dapat menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan sesukanya, mengingat segenap pengelola bank telah menandatangani kesepakatan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan perbuatannya jika bank mengalami kesulitan.

Berkaitan dengan keputusan peningkatan modal minimal disetor dari Rp. 0,15 triliun menjadi Rp 3 triliun pada tahun 2003, akan menjadikan kondisi perbankan Indonesia lebih kuat serta bersaing dengan perbankan internasional setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah menyadari perubahan minimal modal disetor cukup memberatkan sebagian besar bank, untuk itu pemerintah melakukannya secara bertahap yakni Rp 1 triliun hingga akhir 1998, 2 triliun hingga tahun 2000 dan Rp 3 triliun pada akhir tahun 2003. Untuk

Jaminan penuh pemerintah akan menciptakan ketenangan kepada para deposan dan juga *counter-part* perbankan luar negeri sehingga L/C yang diterbitkan perbankan nasional diterima mitra luar negerinya. Investor asing makin percaya iklim berusaha di Indonesia lebih baik dan prospektif, karena kini pemerintah "berada di belakang" perbankan nasional. Meningkatnya kegiatan usaha --yang tentu saja akan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar-- pada gilirannya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun untuk tahun anggaran 1998/1999 ini ditargetkan hanya bertumbuh nol persen.

memenuhi ketentuan ini, bank-bank diharapkan melakukan merger atau mencari pemodal baru dari luar negeri.

Akhirnya reformasi perbankan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga iklim moneter dapat sehat kembali. Dengan sehatnya iklim moneter maka sektor riil juga akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya akan menyehatkan iklim perekonomian secara *agregate****

Pemilihan Rektor Dulu dan Kini:

Setali Tiga Uang

Dari dulu hingga kini mekanisme pemilihan rektor sama saja. Mahasiswa hanya berhak menjadi penonton dan duduk manis di pinggir lapangan. Akankah peristiwa empat tahun lalu terulang lagi? Pemerintah memilih rektor yang tidak dikehendaki mahasiswa.

PEPRO WARTA KAGAMA

Tiga tokoh teras UGM *mengemban tugas masa depan.*

Empat tahun lalu, meskipun hasil *polling* rektor yang dilakukan majalah *Balairung* tidak menghendaki Soekanto menjadi rektor, toh dia tetap terpilih untuk memimpim UGM. Kini empat tahun telah berlalu, Soekanto dengan *research university*nya berusaha membangun kampus bervisi kerakyatan ini.

Dan kini tidak lama lagi akan ada pergantian rektor, tiga nama telah diajukan oleh senat universitas ke Depdikbud sebagi pemegang penuh otoritas, mereka adalah Prof. Dr. Ichlasul Amal, Prof. Dr. Sofyan Effendi, MPIA, dan Prof. Dr. Ir Soeprojo Pusposutardjo, M. Eng.

Setali tiga uang. Itulah ungkapan paling tepat bila mengamati pemilihan rektor empat tahun lalu dengan sekarang. Senat universitas hanyalah sebatas pemberi pertimbangan kepada pemerintah tentang nama-nama yang muncul (PP No. 30 1990, pasal 38). Jangan tanya dimana posisi mahasiswa untuk menentukan kepala kampusnya. Mereka hanya boleh nonton di luar garis sembari duduk manis menunggu ketentuan si pembuat keputusan, presiden.

Sejak dulu mekanisme macam ini sebenarnya sudah banyak dipertanyakan. Yang kuliah itu mahasiswa atau pemerintah sih? Hingga keputusan-keputusan penting yang sangat menyentuh kepentingan mahasiswa 'terpaksa' hanya jadi tontonan . Suara-suara agar mahasiswa dilibatkan seperti menjaring angin. Mirip sebuah episode drama yang diulang-ulang tiap kali pergantian pucuk kepepimpinan di kampus biru ini.

"Pemilihan rektor selama ini memang bersifat tertutup. Secara politik mahasiswa sebagai elemen dari perguruan tinggi tidak diberi hak dalam memilih siapa rektornya," ungkap Ketua II BEM, Cahyo Pamungkas.

Senada dengan Cahyo, ketua SMPT Laode Hidayat melihat mekanisme saat ini tidak jelas. Senat hanya mendapat tembusan 17 nama Guru Besar. Hanya sebatss itu agaknya mahasiswa dilibatkan.

Replikasi mekanisme pemilihan rektor memang akan terjadi lagi. Dari ketiga calon yang tersaring kini tengah di proses Depdikbud dan rencananya bulan Maret ini akan diumumkan siapa pemegang kepemimpinan universitas terbesar dan tertua di negeri Indonesia. Bagi sebagian mahasiswa UGM ketiga calon rektor itu masih ibarat *kucing di dalam karung*. Belum jelas apakah mereka nanti akan jadi mitra mahasiswa atau tidak. Terutama tingkat akomodatifnya terhadap aspirasi yang ada.

Posisi rektor sangat menentukan guna menciptakan kondisi kalangan akademis yang lepas dari tekanan rasa takut, terutama takut berpikir dan berpendapat yang argumentatatif. Rektor memang birokrat tapi bukan berarti perpanjangan tangan pemerintah yang seenaknya menginjak-injak otonomi keilmuan.

Dalam sejarahnya UGM pernah

memiliki figur rektor yang diidealkan mahasiswa. Tercatat waktu itu Prof. Sukadji yang berperan dalam penolakan NKK/BKK, dan Prof. Koesnadi dengan kedekatan pada mahasiswa ketika ramai-ramai mahasiswa menolak SDSB.

"Seorang rektor itu harus tetap bervisi pada pembelaan masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan akademis, berarti ia bisa menjadikan kampus sebagai pusat pendidikan yang berorientasi pada pada pembebasan masyarakat," ungkap Cahyo.

Ditambahkannya, bisa jadi keinginan itu menjadi hal yang sangat utopis untuk negara yang otoriter semacam Indonesia. Tapi paling tidak Cahyo percaya bahwa yang namanya rektor itu masih dimungkinkan untuk melakukan transformasi struktural karena masih terbuka ruang-ruang bagi rektor untuk mengendalikan jalannya perguruan tinggi ke arah pergerakan masyarakat.

Menurut HM. Lutfie, Pjs. Sekjen Dewan Mahasiswa lain lagi, rektor ideal adalah yang mau menerima perbedaan dan sejajar dengan mahasiswa. Ada hubungan struktural tapi sifatnya koordinatif. Mahasiswa memberitahu rektor, dan rektor memberitahu mahasiswa. Tidak feodal, lebih bersikap demokratis, dan sanggup membaca pikiran mahasiswa.

Akan tetapi Luthfie melihat bahwa jika sistemnya tetap begini di mana lembaga mahasiswa tidak independen, siapapun rektornya tidak akan merubah keadaan. Untuk itu perlu diadakan perubahan secara struktural.

Soeprojo Pusposutardjo

"*Nggak* bisa UGM menjadi demokratis hanya dengan mengganti kepalanya, mengganti rektor secara fungsional tanpa merubaha struktur yang lain," papar Lutfie agak pesimis.

Tanggapan lain juga diungkapkan oleh Aris Kadarisman mahasiswa Fakultas Sastra, "Kita menginginkan kepemimpinan yang benar-benar ideal. Harusnya rektor mendatang murni dari pilihan UGM sendiri, bukan titipan."

Untuk sebuah idealitas, seharusnya ketiga calon rektor yang akan muncul semestinya dikenal oleh mahasiswa. Meski memang masih sulit ditebak kapasitasnya mengingat tertutupnya mekanisme dan popularitas calon yang masih berada di lingkungan fakultasnya masing-masing.

Namun yang terjadi sekarang banyak mahasiswa yang tidak mengerti siapa calon rektornya. "Saya malah *nggak* tahu *tuh*, siapa saja calonnya," kata Dwi Astra mahasiswa teknik elektro ketika ditanya siapa saja calon rektor periode mendatang.

Ungkapan Dwi di atas mungkin juga dialami oleh sebagian mahasiswa lainya. Untuk ukuran mahasiswa aktifis mungkin informasi macam ini mudah mereka dapatkan, tetapi untuk mahasiswa awam bisa jadi tidak terjangkau. Ini semua tak lepas dari mekanisme yang tidak transparan dan minimnya informasi yang dikeluarkan oleh pihak rektorat.

Kalau kita tarik garis yang lebih panjang lagi, persoalan ketertutupan tersebut bisa jadi merupakan keberhasilan Orde Baru dalam

Prof. Dr. Ir. Soeprojo Pusposutardjo, M.Eng.;

Generasi Pencerah Bangsa

Kampus ibarat keluarga, di dalamnya ada anak, bapak, dan ibu. Bagi Prof. Ir. Soeprojo, sebuah keluarga anggotanya harus bercita-cita baik, sehingga kalau ada perbedaan tidak mengakibatkan perpecahan.

Menurut Soeprojo perbedaan tersebut harus dicari, sebab antara yang baik belum tentu cocok. "Jadi saya tidak punya prinsip *prejudice* untuk semua warga kampus," paparnya

Universitas Gadjah Mada yang berdiri tahun 1949 merupakan universitas pertama dan tertua di Indonesia. Sehingga program awal mantan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian ini, adalah penyadaran kembali. "Tanpa kembali sadar, UGM sebagai universitas pertama republik ini, akan sia-sia," ungkapnya.

Keinginan Soeprojo, tak lain ingin menjadikan mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam pengembangan universitas. Tanpa menjelaskan kontrol sosial lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semuanya itu harus berlaku dalam satu keluarga.

Pencerah bangsa adalah cita-cita Soeprojo untuk seluruh mahasiswa UGM. Ia menandaskan, pencerah bangsa adalah manusia yang mau memahami masyarakat pada tujuan yang terang di kemudian hari. Sehingga pendidikan yang dijalankan oleh UGM harus mengarah pada tujuan tersebut.

Untuk membangun suasana kekeluargaan di kampus ini, jalan yang dipakai oleh Soeprojo dengan menyadarkan mahasiswa akan hak-haknya. Ketidakjelasan hak-hak mahasiswa menurut dia akan didiskusikan. Tiap permasalahan harus diselesaikan dengan terbuka. "Saya kumpulkan mahasiswa, saya tanya apakah saudara tahu hak-hak saudara sebagai mahasiswa menurut undang-undang yang berlaku?" kata Soeprojo.

Ketika ditanya bagimana ia akan memimpin universitas ini? Beliau dengan tegas menyatakan bahwa gayanya adalah kekeluargaan.

Apakah kekeluargaan yang didamba oleh Prof.Dr. Soeprojo mampu menampung semua aspirasi mahasiswa, akan ditentukan oleh kepemimpinannya lima tahun mendatang. Itupun jika Prof.Dr. Soeprojo terpilih.***

Melanie

Ugoran, Eka Rinanda R, Katam, Peddy. A

mendepolitisasasi kampus lewat NKK/BKK-nya.

Rektor Dambaan Mahasiswa

Rektor sebagai pimpinan kampus merupakan posisi strategis bagi perkembangan sebuah universitas. Untuk periode ini lebih penting, disamping peran rektor dalam kebijakan, lebih jauh untuk kepengurusan ini dihadapkan kepentingan yang lebih luas, yakni abad global.

Karenanya kita semua berharap rektor ke depan adalah rektor yang benar-benar mampu membawah UGM ke dalam pencerahan. *Dus,* ia harus cerdas sekaligus dekat dengan mahasiswa.
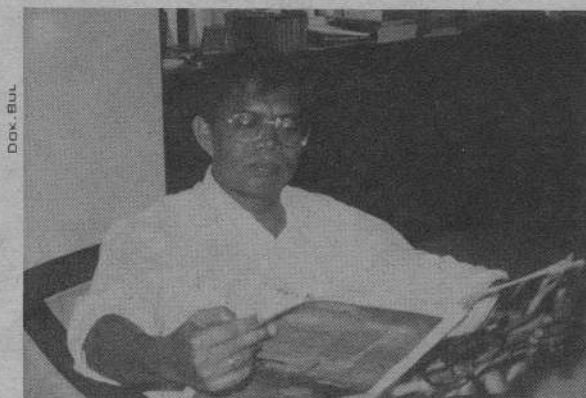
Dok. Bul

Sofyan Effendi

Dan beberapa mahasiswa yang berhasil ditemui *Balairung* ternyata sebagian besar mereka menghendaki Ichlasul Amal atau Sofian Effendi.

"Asal jangan Pak Projo saja. Menurut saya Pak Amal terbuka dengan gerakan mahasiswa, sedangkan pak Sofian cukup moderat," tutur Laode Hidayat.

Sementara Cahyo juga lebih memilih Ichlasul Amal dan Sofian Effendi karena *concern* dengan mahasiswa serta mengerti dengan nilai-nilai gerakan mahasiswa. Mungkin ini disebabkan karena mereka dari Sospol (Fisipol, Red) walaupun bukan jaminan akan bertindak demokratis. Sedangkan Suprojo lebih terlihat sebagai *kucing dalam karung* tentang bagaimana misinya tentang UGM ke depan, semuanya termasuk mengenai

Prof. Dr. Sofyan Effendi, MPIA:

Research University, Dengan 40% Mahasiswa Diploma. Lho?

Tak lama setelah terpilihnya sebagai rektor UGM empat tahun lalu, Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com menggelindingkan sebuah rencana besar menjadikan UGM sebagai Universitas penelitian dengan program seribu doktornya. Keinginan itu masih perlu di cocokkan dengan keadaan di lapangan. Menjelang pergantian rektor periode ini agaknya orientasi itu perlu ditinjau kembali, kalau mungkin diganti.

Data statistik 1994-1998 mencatat bahwa di UGM 35-40% mahasiswanya adalah mahasiswa diploma. Kenyataan ini diungkap oleh Sofyan ketika *Balairung* berhasil menemuinya.

"Kalau kita amati *trend* UGM sekarang justru sedang menukik, dalam arti kalau kita lihat saat ini jumlah mahasiswa yang masuk UGM banyak yang diploma, jelas ini semakin jauh dari sasaran menuju *Research University,*" ungkap Sofian.

Lebih jauh juga dijelaskan tentang keinginanya menjadikan UGM sebagai *Research University* dan Universitas Pendidikan setara dengan Jepang. Dan untuk menuju ke sana, rektor sangat berperan mengarahkan program yang akan dilaksanakan.

Ia juga menilai bahwa program di fakultas atau di jurusan belum berjalan dengan visi UGM. Acuan Visi Pasca Sarjana di tingkat fakultas dan jurusan tidak begitu jalan, justru program diploma yang diperbanyak.

"Kita malah seperti PTS dengan memperbanyak diploma. Bagaimana mau menjadi *Research University* jika mahasiswa diplomanya 40 persen," tambah dosen administrasi negara ini.

UGM di masa mendatang memang dihadapkan pada bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk negara yang sedang menghadapi persaingan bebas. *Research University* diperlukan sepanjang itu realistis dan berusaha diwujudkan secara konsisten.

Apakah itu lalu bisa dikaitkan dengan konsep *Link and Match* seperti yang pernah digulirkan oleh Mendikbud?

"Konsep itu hanya merupakan suatu upaya untuk lebih mendekatkan lulusan universitas dengan kebutuhan industri," psparnya.

Akan tetapi untuk UGM sendiri konsep *Link and Match* menurut Sofyan hanya relevan untuk bidang teknik. Susah untuk bidang-bidang lain terutama sosial. Kita tidak bisa mengembangkan konsep itu pada bidang sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Tugas dari perguruan tinggi adalah menciptakan lapangan kerja. Tapi sesuai dengan visi UGM maka harus dipersiapkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

"Bukan tenaga kerja diploma. Lulusan S1 yang kita harus tingkatkan kualitasnya, lalu S2 yang akan menciptakan tenaga pemikir tingkat menengah yang dibutuhkan masyarakat. Berkaitan dengan *Link and Match* bukan berarti kita harus diploma. Kita bisa menyumbangkan tenaga-tenaga yang berkualitas dari S1, S2, dan S3 yang sangat dibutuhkan masyarakat industrial," paparnya lebih lanjut.

Menyimak apa yang diungkapkan di atas agaknya Sofyan Effendi memiliki bayangan tentang optimalisasi program-program studi yang ada di UGM. Dan kelihatannya Program diploma merupakan program yang bukan menjadi agenda bagi Sofyan.

Lepas apakah hal ini benar atau tidak, jika seandainya Sofyan Effendi yang juga dosen jurusan Administrasi Negara, Fisipol jadi memimpin UGM. Program diploma yang empat tahun terakhir ini banyak diselenggarakan oleh berbagai fakultas ternyata tidak akan menjadi prioritasnya.***

He-Rey

M. Enandaru, Bekti, DA

gerakan mahasiswa.

Tentang Gerakan Mahasiswa

Dari ketiga calon rektor yang dihubungi *Balairung*. Semuanya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat gerakan mahasiswa.

Bagi Ichlasul Amal, yang saat ini masih sebagai Direktur Pasca Sarjana, dialog untuk saling bicara itu yang paling penting dalam menangani gerakan mahasiswa. "Kita tidak tahu mana yang paling bermanfaat, bisa sikap moderat, radikal, atau konservatif. Suatu saat mungkin sikap radikal yang diperlukan. Kalau kita lihat jaman revolusi pemuda radikal sampai menculik Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi perjalanan sejarah melihatnya untung saat itu ada yang radikal," jelasnya.

Ia menambahkan, pada masyarakat yang sudah *establish* sekalipun bukan berarti sikap radikal itu tidak ada. Yang penting adalah kompromi yang harus diciptakan, itu artinya suasana kondusif dibutuhkan untuk menumbuhkan dialog.

Ichlasul Amal

Kita tentu masih ingat ketika kepemimpinan Soekanto, aksi mahasiswa sering diwarnai oleh kehadiran militer. Tercatat waktu itu, aksi protes terhadap pembreidelan pers. Sang rektor jelas-jelas mengundang militer untuk meggulung mahasiswa. Meski kejadian itu diprotes keras oleh mahasiswa dan berhasil mendapatkan jaminan tidak ada penangkapan lagi.

Akan tetapi kejadian yang sama

Prof.Dr. Ichlasul Amal,M.A.;

Meningkatkan Kesejahteraan Dosen Muda

Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki dua elemen utama dalam dirinya, yakni; elemen akademik dan non akademik yang saling terkait satu sama lain. Menurut Prof.Dr. Ichlasul Amal, kedua elemen tersebut menjadi tombak utama perguruan tinggi untuk menjawab tuntutan masyarakat. Dan secara struktur organisasi keduanya dipegang oleh dekan di tiap fakultas. "Itu tercermin dalam struktur eselonnya," ungkapnya.

Disinggung tantangan dan kesulitan yang menghadang kampus UGM sekarang dan mendatang, dosen Jurusan Hubungan Internasional ini menjawab masalah dana. Menurutnya, masalah dana berhubungan dengan peningkatan prestasi akademik staf pengajar. Beliau memaparkan bahwa kekosongan dana dari luar negeri, baik berupa beasiswa ataupun proyek-proyek akademik menyebabkan peningkatan prestasi pengajar terhambat. "Maka yang saya pikirkan adalah bagaimana menciptakan dana sendiri sehingga hambatan untuk meningkatkan prestasi akademik bisa diatasi," jelasnya.

Selain masalah akademik, patut diperhatikan pula kesejahteraan dosen-dosen muda UGM. Karena merekalah yang akan mendidik kaum muda Indonesia mendatang. Ichlasul mengungkapkan bahwa dosen muda yang ada di fakultas secara resmi merupakan dosen universitas. Sehingga Ichlasul menawarkan suatu "pool" bersama untuk memeratakan kesejahteraan.

Banyak kasus terjadi dimana antara dosen muda satu dengan yang lain memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup jauh. Hal ini karena mata kuliah yang ia ajarkan diminati oleh banyak mahasiswa. Sehingga menurut beliau semua hal yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut bisa "laku".

Mahasiswa pun tak lepas dari pengamatan Prof.Dr. Ichlasul Amal. Baginya, langkah peningkatan prestasi akademik untuk mahasiswa adalah dengan mewujudkan cita-cita universitas penelitian (*Research University*). Beliau menambahkan bahwa untuk melaksanakan sebuah universitas penelitian, harus mempertimbangkan aspek dana. Tanpa dana yang memadai maka penelitian yang diajukan pun tak dapat terlaksana. Maka alternatif untuk mengusahakan dana berasal dari alumni UGM yang tersebar dimana-mana.

Dalam menjalankan suatu insitusi atau organisasi pendidikan, diperlukan suasana yang kondusif antar kelompok kepentingan yang terlibat. Fleksibilitas organisasi sangat diperlukan agar program kerja yang ditawarkan dan dilaksanakan bergerak dinamis sesuai kebutuhan masyarakat.

Prof.Dr. Ichlasul Amal memprihatinkan kondisi mahasiswa yang selama ini pasif. Mahasiswa tidak dapat berbuat banyak dalam menentukan dan mengelola organisasi mereka. Beliau melihat, jika mahasiswa tidak hanya menerima apa adanya (*taken for granted*), ia dapat lebih *accountable* dan bertanggung jawab. Dan menurutnya yang terpenting adalah rasa saling percaya.

Menjawab keberadaan UGM di tengah globalisasi, Ichlasul menyatakan bahwa UGM harus mampu mengkritisi globalisasi itu sendiri. "Kita bisa berperan menyingkirkan sampah-sampah globalisasi," tegasnya.

Tentang visi kerakyatan mendatang, beliau mengatakan, perlunya menambah kepercayaan terhadap lulusan UGM sehingga visi kerakyatan tidak menjadi penghambat. Tetapi pendorong UGM untuk melangkah ke masa depan.***

Melanie

Bekti, Monika

terjadi pada aksi boikot pemilu, di depan Fakultas Hukum, dan sehari kemudian kampus dinodai lagi oleh militer karena aksi yang menuntut pembebasan teman-teman mereka yang ditangkap.

Ketiga tragedi itu tak lepas dari permisifnya rektor atas kehadiran militer di kampus ini. Buktinya ketika aksi hari berikutnya Pembantu Rektor III Ir Bambang Kartika memberikan jaminan terhadap aksi yang ketiga, militer ternyata tak berani mengusik hingga aksi itu bubar dengan sendirinya..

"Kalau pendekatan macam yang dipakai untik menangani hal semacam itu pendekatan subversif, ya saya kira langsung selesai. Ini sangat bertentangan dengan hal yang telah saya katakan sebagai penciptaan lingkungan yang kondusif. Dulu ketika jadi dekan justru saya beri wadah mahasiswa untuk demonstrasi. Yang demo itu kalau tidak masuk akal akan diteriaki temanya sendiri," kenang Ichlasul.

Senada dengan Ichlasul, Sofyan Effendi yang dihubungi secara terpisah menjelaskan bahwa kegiatan mahasiswa yang ada di kampus lebih bernafas akademik dan di bawah tanggung jawab rektor sehingga militer tidak perlu ikut campur. Lain halnya jika kegiatan itu sudah mengarah pada perusakan, pembakaran. Itu kriminal.

"Saya mendambakan sistem pada jamannya Dema dulu, dimana orang-orang yang masuk Dema, sudah digodok di organisasi ekstra, sehingga memiliki kualifikasi bagus," jawab Sofyan ketika ditanya format organisasi mahasiswa.

Ketika menanggapi soal aksi di Bulevard, Sofyan mengatakan bahwa Bulevard menjadi dilema bagi pimpinan UGM, karena secara legal gelanggang mahasiswa itu bukan milik UGM, tetapi bisa digunakan oleh mahasiswa di Yogyakarta, jadi kalau ada penangkapan, rektor tidak bisa mengklaim itu wilayah UGM.

Ungkapan itu menyiratkan bahwa Bulevard bukan daerah bebas militer dan ini bisa menjadi preseden buruk bagi aktifitas mahasiswa mengingat Bulevard merupakan pusat dari aksi yang kerap dilakukan mahasiswa. Sedangkan kalau dicermati ternyata disekitar Bulevard berdiri bangunan-bangunan dengan papan UGM dihalaman depannya.

"Tetapi kita masih dalam proses menjadikan kawasan itu sebagai milik UGM agar jangan terus menerus di intervensi militer," tambahnya.

Ichlasul amal rupanya memiliki pandangan tersendiri mengenai kegiatan kemahasiswaan. Selama ini dia mengamati hambatan yang dialami oleh mahasiswa dalam kegiatannya adalah masa kerja yang cuma satu tahun dan itu merupakan hal yang sulit. Dari satu tahun, maka 3 bulan pertama adaptasi, 6 bulan bekerja, dan tiga bulan terkhir siap-siap turun. Sementara itu jika 2 tahun tidak memberi kesempatan yang lain karena masa kuliah yang kurang lebih empat tahun.

"Maka dalam program kerja yang akan datang, permasalahan seperti itu harus diselesaikan. Kecenderungan itu menunjukan perlunya fleksibilitas dalam struktur organisasi dan hanya bisa diwujudkan dengan dialog dalam keterbukaan dan didasari rasa saling percaya," tambahnya.

Berbeda dengan dua calon sebelumya, Prof. Dr. Ir. Suprojo agaknya tidak begitu intens dengan gerakan mahasiswa. Bahkan ketika *Balairung* memancing dengan mengambil contoh Pak Koes yang mau menemani mahasiswa demontrasi dia menjawab, "Saya tidak tahu ya."

Soeprojo sepertinya lebih tertarik pada orientasi akademik jika ia memimpin UGM nanti, salah satunya mengajak mahasiswa untuk membaca statuta dan hak-hak mereka. Ia akan mengajak diskusi hak-hak itu dan mahasiswa boleh protes mana yang belum jelas, jangan sampai bertengkar tapi kita sendiri tidak tahu hak-hak kita dan atutan-aturanya.

"Saya sering sedih melihat mahasiswa sekarang ini. Tidak dapat kuliah senang..*ngeluyur*.. Tidak praktikum senang. Padahal hak mahasiswa itu adalah hak dirinya pada waktu menghadapi globalisasi tuntutlah itu!" tegas Suprojo

Di samping itu Suprojo juga melihat kecenderungan mahasiswa dalam kehidupanya saat ini seperti dituturkanya, "Saya melihat kalau mahasiswa sekarang ini hanya kurang mendapat informasi yang mendalam. Dan saya ingin secara akademis untuk membahas persoalan itu. Dalam hal teknologi. Saudara bisa menerima eksplorasi teknologi terhadap mahsiswa indonesia, tapi mana mahasiswa Indonesia?"

Lebih jauh dikatakanya bahwa ia ingin kalau ceramah (baca; setiap kegiatan), mahasiswa itu ikut ngomong. Jangan hanya mengundang penceramah saja. Menurutnya itu adalah hak mahasiswa. Dan jika ada penangkapan mahasiswa oleh militer, Soeprojo berjanji akan membela.

"Karena itu forum akademis," tambahnya.***

Heri Trianto

Peddy, Ugo, Aris, Monica E, Bekti DA

Runtuhnya Sebuah Rezim

Ariful Hakim
mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta

Apa yang menyebabkan sebuah rezim runtuh? Jawabanya bisa saja karena rakyat sudah tidak mempercayainya lagi, sehingga timbullah *people power*. Bisa juga karena sang pemimpin meninggal dunia, sedang penggantinya tidak cakap menjalankan pemerintahan hingga negara pecah berkeping-keping, Yugoslavia contohnya. Atau karena kudeta dari lawan politik, dengan jalan damai maupun kekerasan. Keruntuhan sebuah rezim, adalah suatu keniscayaan ketika suatu pemerintahan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau menjalankan kewajibannya secara represif dan atau otoriter.

Fenomena menarik awal keruntuhan sebuah rezim adalah, adanya tekanan-tekanan dan larangan-larangan secara sistematis terhadap seorang tokoh yang dianggap bersikap oposan. Ayatollah Khomeini misalnya. Sebelum rezim Syah Reza Pahlevi jatuh, beliau mendapat tekanan dan larangan atas segala aktivitasnya, sampai diasingkan ke Paris-Perancis. Begitu juga Bennigno Aquino. Untuk membungkam kevokalan-kevokalannya, Bennigno harus tewas dalam peristiwa penembakan, sebelum rezim Ferdinand Marcos tumbang oleh amukan rakyatnya.

Hakekat larangan demi larangan terhadap tokoh yang punya nyali untuk mengoreksi pemerintahannya adalah demi kelanggengan kekuasaan sang penguasa. Kebijakan melarang adalah jalan paling mudah untuk mencegah terjadinya sebuah tragedi. Seorang ayah yang melarang putranya merokok, baginya tindakan itu merupakan sikap tanggungjawab moral demi kesehatan sang anak. Kekuasaan sang ayah terhadap si buah hati, terimplementasi dalam wujud larangan. Persoalannya menjadi lain, ketika larangan terhadap sang anak terhegemoni oleh sikap sok kuasa, meskipun tindakan sang anak baik dan benar, minimal menurut persepsi anak. Tapi oleh sang Ayah dipersepsi sebagai akan mengguncang legitimasi kekuasaannya.

Dalam skala makro, sikap semacam itu biasanya timbul sebagai warna dari budaya paternalistik. Ia biasanya dipahami sebagai bentuk hubungan sosial dalam satu kelompok sosial atau dalam masyarakat. Ciri khasnya adalah, ia tidak punya keleompok menengah yang kuat. Sebab, dalam masyarakat seperti itu, yang memainkan peranan adalah lapis teratas dan lapis terbawah. Yang atas berbicara, yang bawah mendengarkan. Yang atas berinisiatif, yang bawah submisif. Yang atas melarang, yang bawah mematuhi tanpa catatan.

Sejarah kemudian mencatat, dalam pola itu selalu ada standar ganda*(double standard)* dalam moralitas. Apa yang berlaku untuk lapis teratas*(patron)* atau diperbolehkan secara moral untuk lapis terbawah*(klien)*. Demikianlah majikan bisa menuntut apa saja kepada pembantu rumah tangga, yang sebaliknya hampir tidak menuntut sesuatu apapun kepada majikannya.

Ciri yang lain adalah hubungan yang cenderung bersifat satu arah dan minimnya interaksi yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian inisiatif berjalan dari atas ke bawah dan persetujuan selalu dari bawah ke atas. Hak selalu dari atas ke bawah, dan sebaliknya kewajiban hampir selalu dari bawah ke atas.

Rakyat dalam sebuah negara yang masih diliputi budaya paternalis, tidak lebih sebagai obyek kekuasaan. Akses mereka sebagai pemegang kedaulatan tertinggi - misal dalam sebuah negara republik- terakomodasi hanya dalam UUD, dalam realita hak-hak mereka direduksi. Dalam konstelasi politik pun, kegiatan-kegiatan rakyat yang bertujuan mencari kebenaran kebijakan politik eksekutif dianggap berpotensi menjadi pengganggu status quo., oleh karenanya mesti dibungkam. Maka, kebijakan larang-melarang pun muncul. Meski senyampang itu, kegiatan tersebut terlihat positif di mata agama., seni dan budaya. Apa lacur, politik memang selalu melihat sesuatu dengan kaca mata hitam.

Seorang negarawan yang bermain politik, hakekatnya adalah membangun lapis demi lapis benteng pertahanannya agar serangan dari lawan politiknya bisa ditepis sedemikian rupa. Manakala sikap penguasa semakin keras, terperciklah api-api dendam dalam nurani kaum oposisi, yang mengawali adanya perlawanan terhadap rezim. Sejarah bangsa-bangsa memberikan pelajaran tentang hal itu.

Kekerasan hanyalah akan melahirkan kekerasan kembali. Berbagai jalan ditempuh oleh mereka yang merasa dikecewakan atau kecewa terhadap rezim bangsanya. Ayatullah Khomeini menyelundupkan kaset-kaset pidatonya yang keras dan tajam dari tempat pengasingannya di Perancis. Revolusi Bolsyevik timbul setelah kaum komunis kasak-kusuk dalam gerakan bawah tanah untuk menumbangkan kekuasaan pemerintahan Tsar Rusia. Rezim lama pun runtuh, dan kekuasaan berpindah tangan ke penguasa baru.

> "SEBUAH REZIM, YANG MENGHARAMKAN PERBEDAAN VISI, MENUNJUKKAN BAHWA IA TIDAK MEMPUNYAI RASA PERCAYA DIRI. SIKAP CURIGA BERLEBIHAN PENGUASA --BAHKAN UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENCERDASKAN SEPERTI DISKUSI-- ADALAH AWAL DARI KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT KEPADA PENGUASA."

Indonesia, sebagai negara yang bersendikan Pancasila, sepantasnya mengambil pelajaran akan hal itu. Kekerasan demi kekerasan dan larangan demi larangan yang timbul silih berganti, merupakan tindakan yang mesti dikaji ulang. Bukankah segala persoalan yang timbul dalam pembangunan (politik) bangsa bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah? Perbedaan pendapat bukanlah hal tabu. Kebijakan larang-melarang tidaklah akan menyelesaikan masalah, bahkan dimungkinkan akan timbul kesumat, yang pada gilirannya akan menempatkan pihak-pihak yang berbeda visi dalam kutub-kutub yang berseberangan.

Sebuah rezim, yang mengharamkan perbedaan visi, menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai rasa percaya diri. Sikap curiga berlebihan pengusa -bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan seperti diskusi- adalah awal dari ketidakpercayaan rakyat kepada penguasa. Kata orang bijak; rakyat adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dan sejarah kemudian mencatat dengan tinta emas; satu per satu rezim berjatuhan oleh kekuatan rakyat, cepat atau lambat.***
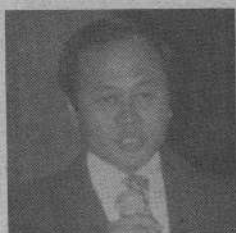
Eka Budianta
Direktur Eksekutif Dana Mitra Lingkungan

Memahami Hakikat ISO 14000

*** Tanggapan untuk rubrik lingkungan *Balairung* Edisi 26**

Menarik sekali untuk mencermati rubrik lingkungan yang diturunkan oleh *Balairung* edisi 26 dengan judul *ISO 14000: Bisnis Berwawasan Lingkungan?* Hal ini penting untuk dikritisi melihat budaya para pelaku bisnis yang ada di negara Indonesia sudah tidak lagi mempertimbangkan nasib lingkungan untuk masa depan.

Mengapa Perlu ISO 14000?

Bila ditelaah lebih jauh yang memunculkan ide dan menciptakan ISO 14000 sesungguhnnya adalah kaum pengusaha sendiri. Bukan pemerintahan manapun. Melainkan para pelaku bisnis dan masyarakat industri lainnya yang mencoba menerapkan standarisasi. *Dus,* ISO 14000 merupakan kebijakan dan ketentuan bersama dalam usaha standarisasi interbasional, tanpa intervensi ataupun pemaksaan.

Masyarakat industri selalu berkeinginan untuk mementingkan kualitas dalam bisnisnya. Kalau bisnis dan industri mereka betul-betul bersumber pada alam, tentu malah senang dengan adanya standarisasi. Jangan lupa, semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bertujuan untuk kelestarian. Dan kelestarian alam berarti berlanjutnya bisnis. Karenanya, bersinambungnya industri sesungguhnya manjamin masa depan.

Lebih jauh, penerapan ISO 14000 sebenarnya didorong oleh logika konsumen pasar global. Masyarakat dunia makin lama makin mementingkan mutu, harga, produk, dan ketepatan waktu pelayanannya. Kalau ISO 9000 adalah usaha untuk meningkatkan manajemen mutu. Maka kehadiran ISO 14000 berusaha memasukkan unsur-unsur lingkungan. Jadi kriterianya bukan hanya efisiensi, keselamatan kerja, dan mutu produksi, tapi juga kaitannya dengan lingkungan hidup. Industri perlu mempertimbangkan unsur lingkungan hidup dalam setiap kegiatannya. Maka ada *Enviromental Management System (EMS), Life Cycle Analysis (LCA)* dan seterusnya. Semuanya menyelaraskan kinerja perusahaan dengan pentingnya faktor lingkungan hidup.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, perusahaan mana dan apa saja yang perlu memperhatikan? Semua perusahan. Terutama yang berskala ekspor dan bersangkutan langsung dengan sumber daya alam. Misalnya industri perkayuan, kertas dan *pulp*, tekstil, pertambangan, dan kimia. Kesadaran lingkungan mereka harus bangkit. Pasar tidak akan beli produk mereka kalau praktiknya sembarangan. Misalnya: industri kertas dan *pulp* harus bisa menjelaskan bahwa mereka tidak mencuri bahan dari hutan lindung, tidak menyakiti hati masyarakat setempat, dan tidak mengotori sungai maupun langit dengan limbahnya.

Pemerintah, Konsumen dan Perguruan Tinggi

Yang pertama kali mesti terlibat, sesungguhhnya adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah sesungguhnya cuma bikinan masyarakat. Kalau masyarakatnya serius, peduli lingkungan, mementingkan mutu, tepat waktu, hemat energi dan seterusnya; pemerintahnya juga bagus. Jadi peranan masyarakat sebagai konsumen haruslah sangat kuat. Sebab kitalah yang menentukan. Industri jangan takut dengan pemerintah. Tapi mereka tidak bisa main-main bila menghadapi tuntutan masyarakat. Jadi sekali lagi, bahwa standarisasi internasional itu adalah tuntutan masyarakat.

Peran perguruan tinggi sangat dominan untuk mengahadapi pasar bebas sangat dominan, disamping Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga swasta. Bukan hanya pemerintah. Yang saya inginkan justru perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas sarjananya. LSM bisa lebih inspiratif dan berdaya guna. Sedangkan bisnis dan industri harus lebih peka hati nuraninnya.

Masalah yang kita hadapi di tanah air ini barangkali adalah kelirunya titik tolak berpikir. Misalnya di dalam masyarakat Jawa, ada harapan bahwa *sing mbabat alas* (orang yang menebang hutan) dianggap pahlawan.

Maka pembangunan ditafsirkan mengubah hutan dan rawa-rawa menjadi kota. Ini konsep yang salah. Pembangunan berkelanjutan justru mempertahankan bahkan meningkatkan daya dukung alam. Bukan merusaknya. Lingkungan bukan harus tunduk pada kegiatan ekonomi. Tapi sebaliknya, kegiatan ekonomi harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Bukan eksploitasi alam untuk ekonomi tapi pengendalian ekonomi untuk masa depan kehidupan dan kelestarian alam.

Saya yakin para cendekiawan Indonesia bisa memahami hal ini.***

Membaca Langkah LSM Lingkungan

*Menuju **Partai Hijau?**

Tampaknya permasalahan lingkungan pun tak lepas dari problematika politik. Tanpa adanya keterbukaan sistem politik, gerak langkah LSM Lingkungan akan tetap tersandung. Untuk terwujudnya politik pembangunan berkesinambungan yang memiliki keseimbangan visi yang tumbuh dalam masyarakat, kita perlu mulai memikirkan adanya multi partai; partai buruh, partai hijau (lingkungan), partai pertanahan, serta partai-partai lainnya yang berangkat dari isu besar dalam masyarakat.

Hampir tidak ada bidang pembangunan dimana LSM tidak berperan di dalamnya. Tak terkecuali dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup pun tak serupa. Ini mengingatkan kita pada banyaknya aktivitas hidup yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan.

"Banyak orang berpendapat persoalan lingkungan adalah masalah ekosistem semata. Padahal, permasalahan itu sarat dengan pelanggaran HAM dan perampasan akses ekonomi. Juga, bukan sekedar menyangkut tidak diakuinya eksistensi budaya tapi bahkan eksistensi adat," tutur **Muhammad Hidayat Rahz**, anggota Dewan Nasional **WALHI** (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), yang ditemui *Balairung*.

Selain WALHI, salah satu peranan di bidang lingkungan antara lain dilakukan **Lembaga Konsumen Hijau Indonesia (LKHI)** Yogyakarta. Didirikan tahun 1992 LKHI berusaha membentuk golongan konsumen hijau yang menjadi motivator terbentuknya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya terhadap lingkungan melalui pola konsumsi yang sehat. Upaya ini antara lain dilakukan melalui pendidikan dan penelitian, pelayanan pengaduan, serta advokasi.

Berbeda dengan pengertian konsumen yang digunakan oleh lembaga konsumen lain di Indonesia, LKHI mendefinisikan konsumen secara lebih luas sebagai pengguna barang, pemakai akhir produk, penerima iklan, dan pihak yang terkena regulasi.

"Dengan pengertian seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen di AS, LKHI pernah meminta PT Freeport Indonesia — yang men-iklankan proses

produksinya di *Kompas*, dan *Media Indonesia* beberapa tahun lalu— untuk memberikan keterangan berupa dokumen AMDAL-nya," kata Hidayat

Rahz. Dan terbukti, ternyata **Freeport** belum memiliki audit lingkungan.

Peran Aplikatif

Selain aspek ekonomi-politis yang menjadi bidang garap LSM Lingkungan, wilayah yang lebih bersifat praktis atau aplikatif juga tak luput dari perhatian. Salah satu LSM yang menggarap bidang ini adalah **Yayasan Dian Desa** di Yogyakarta.

Dian Desa mengambil jenis peranan lain dalam pengelolaan lingkungan. Tahun 1971 yayasan ini memulai kegiatannya dengan penyebaran teknologi tepat guna di pedesaan. "Itu dilakukan melalui pola pendampingan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan kesehatan untuk masyarakat marginal. Sampai saat ini sudah mencapai 100 desa di dalam dan luar Jawa, terang **Kris Bandono**, staf Dian Desa.

Saat ini Dian Desa yang mempunyai kantor cabang di Maumere dan Kupang telah mengembangkan program kerjanya meliputi pengembangan masyarakat, jasa konsultasi, *income generating*, dan program pendanaan sektor informal, yang memberikan kredit dengan bunga sangat rendah bagi usaha kecil.

Masih cukup banyak LSM lain yang mempunyai kepedulian dan keterlibatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program kerjanya masing-masing. Di Yogyakarta, misalnya, masih bisa disebutkan nama-nama seperti **HPS** (Hari Pangan Sedunia) yang bergerak dalam bidang produksi pangan dan pemberdayaan tani, **City Bethesda** (CB) yang mengusahakan pelayanan kesehatan primer di pedesaan, **LSTA** (Lembaga Studi Tanah Air) dengan penggiatan wisata lingkungan, **LBH** (Lembaga Bantuan Hukum) dengan divisi lingkungannya, dan lain-lain.

UULH dan LSM Lingkungan

Apakah batasan yang dipakai untuk mengidentifikasi peranan sebuah LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup?

LSM Lingkungan berdasarkan UULH lama (UU no 4 th. 1982) dapat merupakan kelompok profesi, kelompok hobi, atau kelompok minat yang menangani masalah lingkungan, mencintai alam, dan melestarikannya atau berbuat sesuatu bagi pengembangannya.

Pada UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru (UU no 23 th. 1997), istilah LSM Lingkungan diganti dengan Organisasi Lingkungan atau yang dikenal dengan sebutan OR.

Tidak setiap LSM Lingkungan dapat menyebut dirinya atau diakui pemerintah sebagai organisasi lingkungan. Agar diakui keberadaannya, lembaga tersebut mesti memenuhi beberapa syarat. Antara lain, berbadan hukum atau yayasan, menyatakan secara tegas dalam AD/ART tujuan pelestarian lingkungan, telah membuktikan secara nyata kegiatannya sesuai AD/ART, serta keberadaannya representatif dalam masyarakat.

TITIK PUJI LESTARI

Hal yang masih menjadi pertanyaan adalah siapa yang berwenang menentukan representasinya dalam masyarakat serta parameter apa yang digunakan.

UUPLH baru menyebutkan OR berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan lingkungan. Berdasarkan aturan sebelummya, pengalaman menunjukkan bahwa nyaris semua gugatan masalah lingkungan yang diajukan kalah di pengadilan atau bahkan tak diterima sebagai kasus.

"Ini antara lain karena kelemahan melekat pada aturan itu sendiri yang masih mengambang sehingga pembuktian harus dilakukan penggugat dengan prosedur yang sangat berbelit-belit," ujar Ari Suseta yang membawahi Divisi Lingkungan di LBH Yogyakarta.

"Bayangkan, bila yang menjadi korban adalah rakyat kecil, hidup mengandalkan sungai yang telah tercemar, menuntut ke pengadilan dan dibebani untuk mampu membuktikan pihak tergugat sebagai pencemar dengan prosedur ilmiah dan birokratis, betapa sangat sulit," tuturnya lebih lanjut.

Maka, aturan perundangan yang baru berusaha meminimalkan permasalahan tersebut dengan menegaskan bahwa pembuktian harus dilakukan pihak tergugat. "Juga mulai dibicarakan laboratorium rujukan untuk kasus lingkungan dan ada penambahan hukuman bagi pelanggar," kata Shalihuddin Djalal Tanjung, seraya menambahkan bahwa perubahan itu merupakan langkah maju.

"Di sisi lain, ada degradasi pemaknaan LSM, ketentuan OR mengaburkan peranan LSM sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup," lanjut Ari Suseta.

"Tak masalah dengan istilah OR, *tokh* batasan LSM sendiri di Indonesia begitu rancu. Yang perlu menjadi perhatian adalah syarat menyatakan diri bergerak dalam pengelolaan lingkungan hidup pada AD/ART-nya," tambah Hidayat Rahz.

Lebih jauh ia menyayangkan banyaknya lembaga yang memposisikan misi organisasinya tidak pada pendekatan struktural. "Pendidikan masyarakat tentang sampah, air bersih, *income generating* memang perlu dan baik. Tapi, mengingat percepatan dan sifat persoalan lingkungan yang muncul lebih politis, masih terlalu sedikit yang mau menjawab persoalan itu dengan pendekatan struktural," ujarnya.

Sementara Ari Suseta, anggota Majelis Kode Etik WALHI, menerangkan bahwa banyaknya LSM yang bergerak dalam pengelolaan lingkungan tidak berusaha mendapatkan pengakuan sebagai OR sering dikarenakan untuk menjaga keleluasaan geraknya.

"Sebab, istilah OR akan menarik

LSM untuk tunduk pada UU Keormasan, pada kontrol negara yang jauh lebih kuat. Padahal, mereka ingin independen," jelasnya.

Bila OR ingin mewujudkan haknya, misalnya mengajukan gugatan atas nama lingkungan, berdasarkan aturan dapat dilakukan hanya jika bekerja sama dengan badan atau lembaga yang lain. "Misalnya LBH, berdasarkan AD/ART tidak termasuk OR, tetapi dapat mengajukan gugatan sebagai kuasa hukum korban jika bekerja sama dengan salah satu OR."

Dilihat dari sini sesungguhnya secara prosedural struktural, LSM berada pada posisi yang lemah. "Maka, perlu penyiasatan, antara lain seperti yang dilakukan WALHI, LSTA, dengan pendekatannya melalui *Multilateral Development Bank Watch Program,"* tegas Hidayat Rahz.

Lebih jauh Hidayat Rahz menegaskan bahwa kerjasama yang dilakukan itu merupakan program pemantauan proyek-proyek yang pendanaannya dari lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, *ADB* (Bank Pembangunan Asia), atau bantuan luar negeri lainnya.

Salah satu aturan tentang proyek-proyek tersebut adalah adanya transparansi informasi, misalnya tentang bagaimana posisi masyarakat adat setempat. Kelompok-kelompok masyarakat dapat mengakses langsung ke meja manajer badan penyandang dana. Dalam kondisi tertentu —pada konferensi internasional— posisi kelompok masyarakat bisa sejajar denggn pimpinan proyek atau pejabat di departeman, bahkan pemerintah.

"Oleh karenanya, WALHI memperkuat program lobi dan jaringan internasionalnya, antara lain dengan menjadi anggota *Friends of Earth,"* tambah Hidayat Rahz.

Namun begitu ia mengakui bahwa kelemahan gerakan aktivis lingkungan di Indonesia, termasuk WALHI di dalamnya, adalah adanya eksklusivitas. "Ini karena mereka umumnya berasal dari kalangan menengah, baik menengah kota, pendidikan, maupun ekonomi," jelas Rahz.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, lanjutnya, harus diupayakan kampanye dan pendidikan masyarakat yang menyadarkan bahwa permasalahan lingkungan adalah masalah semua warga, bukan segelintir kelompok masyarakat.

Mempersiapkan Pasar Global

> "...kelemahan gerakan aktivis lingkungan di Indonesia adalah adanya eksklusifitas..."

Dalam era globalisasi permasalahan lingkungan menjadi kian pelik. "Padahal, masyarakat luar semakin kritis terhadap standarisasi sehat lingkungan. Bila kondisi di Indonesia masih seperti ini, kita akan menjadi korban," tutur Dr Shalahuddin Djalal Tandjung, pakar Biologi Lingkungan UGM. Satu contoh, sejak 1967 DDT dilarang di Amerika namun sampai sekarang Apel Washington yang berpestisida dikirim ke Indonesia dan laris manis di sini. Demikian halnya dengan kasus sampah impor dari Jerman.

BAMBANG

Dr. S. Djalal Tandjung
Indonesia akan jadi korban

Mengenai pola konsumsi masyarakat di Indonesia, Hidayat Rahz, yang juga Ketua Yayasan LKHI, menuturkan pendapatnya. "Kita belum punya UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah belum cukup memperhatikan hak masyarakat dalam posisinya sebagai konsumen, sebaliknya memberi banyak kelonggaran yang melindungi produsen," ujarnya.

> "...rakyat sering ditempatkan sebagai pemberi subsidi bagi konglomerasi..,"

Ini dapat dilihat, misalnya, dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang di Depdagri tergolong kategori barang mewah. "65% biaya digunakan untuk kemasan, selebihnya untuk ozonisasi, biaya buruh, dan pemasaran," lanjutmya. Retribusi untuk Pemda untuk penggunaan air tanah yang termahal di Jabotabek adalah Rp 40/liter — di Padang 40 sen/liter. Tapi, meskipun bisa mengembalikan kemasan, konsumen harus membayar setidaknya Rp 1000 per liter.

Sedangkan untuk irigasi petani di DIY —sebagai konsumen yang terkena regulasi Perda Iuran Penggunaan Jasa Air th. 1993—, membayar Rp 14.000 - Rp Rp 16.000 setahun. Untuk daerah tertentu saluran air dapat ditutup bila petani tak membayar. "Rakyat sering ditempatkan sebagai pemberi subsidi bagi konglomerasi," tandas Hidayat menyimpulkan.

Menanggapi hal ini, Anggito Abimanyu, yang mendalami ekonomi lingkungan, melontarkan kritiknya. "Menghadapi pasar global, regulasi pemerintah mesti punya visi yang baik. Pengusaha itu akan ikut saja, kalau disuruh jadi pencuri, ya dia akan mencuri. Untuk kepentingan jangka panjang, masyarakat tidak bisa diharapkan sadar lingkungan besok pagi, tapi pemerintah bisa," katanya

"Jangan sampai seperti Eropa atau Amerika yang kesadaran masyarakatnya terhadap lingkungan tumbuh karena pengalaman setelah kondisi alamnya hancur. Pengalaman ini mesti kita ganti fungsi motivatornya dengan pendidikan terhadap masyarakat," tambah Djalal Tanjung mengingatkan.

Ekonomi Lingkungan

Lebih jauh, Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa lingkungan hidup mempunyai aspek yang luas. "Bukan sebuah sektor yang mandiri, seperti pertanian, misalnya. Ia ada di berbagai bidang kerja," katanya.

Karena luasnya aspek yang dijangkau tadi, kata Anggito,

kemudian lahir apa yang disebut pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, yakni penerapan teknologi yang memperhitungkan dampaknya terhadap kelestarian alam dan keseluruhan proses pembangunan berbagai bidang yang berkesinambungan, memperhitungkan pengaruhnya bagi kelestarian alam dan sumber dayanya untuk generasi mendatang.

Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan lingkungan masih selalu terkalahkan demi kepentingan ekonomi. Meski Amdal termasuk mekanisme perijinan namun seringkali proyek bisa saja dilaksanakan, bahkan sebelum Amdal selesai.

"Limbah yang tak diolah dengan semestinya, juga pembakaran hutan, dan eksploitasi tambang dengan cara-cara yang destruktif terus berjalan. Dana reboisasi menjadi pinjaman modal untuk IPTN dan investasi Hutan Tanaman Industri dengan bunga nol persen. Itu beberapa contoh nyata," jelas Djalal Tanjung.

"Mestinya ada satu visi, kita mau membuat pembangunan seperti apa. Kalau visinya per sektoral hasilnya akan beda-beda. Bahkan, bisa bertentangan satu sama lain. Perindustrian akan bangun pabrik, perdagangan bangun market, dan Kementrian Lingkungan Hidup maunya tetap hutan. Di sini mesti ada politik berwawasan lingkungan atau aktivitas lingkungan yang politis," tambah Anggito.

Konsep Hukum Lingkungan

"Posisi Menteri Lingkungan Hidup sebagai menteri negara yang tidak membawahi departeman melainkan bersifat koordinatif antisipatif terhadap sifat lintas sektoral bidang lingkungan. Dengan begitu ia bisa masuk dan bekerja sama dalam wilayah kerja departemen manapun," tandas Djalal Tanjung.

Anggito Abimanyu mempunyai pandangan lain. Menurutnya, struktur kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia terlalu rumit dan kurang koordinatif. "Bapedal diketuai MLH. Di provinsi dulu ada Biro Lingkungan Hidup yang berada di bawah Gubernur, Mendagri. Sekarang menjadi Bapedalda. Tapi, dengan konstelasi birokrasi Indonesia yang seperti ini tetap saja sulit dikoordinasi," kata Anggito sembari mengingatkan bahwa sebetulnya sudah lama ada konsep pembangunan berwawasan lingkungan, sejak 1973. Tapi permasalahannya ada pada implementasi dan koordinasi.

> Mestinya ada satu visi, kita mau membuat pembangunan seperti apa. Kalau visinya per sektoral hasilnya bisa bertentangan...

Senada dengan Anggito, Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri, pakar Hukum Lingkungan UGM, berpendapat bahwa konsep Hukum Lingkungan di Indonesia sudah bagus, hanya untuk pelaksanaannya perlu disosialisasikan. Baik melalui media massa atau forum-forum lain maupun sosialisasi antarlembaga dan departemen pemerintah serta badan-badan swasta.

Anggito menambahkan pentingnya independensi badan yang menangani lingkungan. "Di beberapa negara bahkan tak ada Menteri Lingkungan Hidup, hanya semacam *Environment Protection Agency* (EPA)."

Sependapat dengan ini Djalal menyatakan bahwa badan semacam itu memang akan lebih independen. "EPA menjadi semacam lembaga tinggi negara," ujarnya.

Sepakat dengan pentingnya independensi tersebut, Ari Suseta mengemukakan bahwa wakil suara yang memperjuangkan lingkungan layaknya duduk bersama dalam parlemen.

Partai Hijau

Berpikir lebih jauh untuk masa depan diperlukan perubahan sistem yang mendukung terwujudnya politik pembangunan berkesinambungan yang memiliki keseimbangan visi yang tumbuh dalam masyarakat.

"Kita perlu mulai memikirkan adanya multi partai; partai buruh, partai HAM, partai hijau (lingkungan), partai pertanahan atau yang lainnya, yang berangkat dari isu besar dalam masyarakat," ujarnya.

"Jangan selalu memandang masa lalu, masyarakat kan berkembang, kesiapannya sekarang sudah beda sekali. Jangankan tahun 50-an dengan sekarang, di tahun yang sama, antara Jawa dengan Sulawesi saja bisa jauh berbeda," paparnya lebih lanjut.

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, secara kultural diharapkan —pada tataran *grassroot*— LSM beraksi sebagai bagian dari masyarakat yang berperan dalam aktivitas pembangunan. Ketika akan mempengaruhi kebijakan politik, LSM diharapkan terwakili dalam sistem, untuk mampu mengutarakan aspirasi yang dibawanya.

Tampaknya permasalahan lingkungan pun tak lepas dari problematika politik. Tanpa adanya keterbukan sistem politik, gerak langkah LSM Lingkungan akan tetap tersandung. Partai Hijau yang diharapkan bisa menjadi representasi masyarakat yang peduli lingkungan hanya akan menjadi sebuah utopia.***

Nur Hidayati
Hery, Tono

Judul buku : Presiden Ketiga,
Editor: Ahmad Bahar,
Kata Pengantar : Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
Penerbit : Pena Cendekia, Yogyakarta
Cetakan pertama, 1997
xiv + 270 halaman

Ilusi Godot:

Menunggu Datangnya Presiden Ketiga

Ada satu kecemasan seandainya pergantian kepemimpinan nasional tidak berjalan dengan mulus. Negara menjadi kacau dan keadaan akan lebih rumit, *unpredictable*. Apapun kemungkinannya semua hal bisa saja terjadi, namun yang jelas, cepat atau lambat bangsa ini harus memiliki sejarah baru, presiden baru.

Buku ini secara khusus berupaya mengajak pembaca untuk mendiskusikan permasalahan pergantian kepemimpinan nasional secara alamiah. Ada tigabelas tulisan yang mencoba menawarkan pemikiran-pemikiran tentang profil ideal presiden ketiga, pembatasan masa jabatan presiden, peluang perempuan tampil sebagai pemimpin, serta tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia saat memasuki *millenium* baru, abad 21.

Keinginan bangsa ini untuk mendapatkan dan memiliki presiden yang baru adalah sebuah hal yang wajar. *Pertama*, Menurut catatan Ong Hok Ham, tidak pernah ada suksesi di Indonesia yang berjalan dengan damai. Keprihatinan kita patut muncul, Orde Baru yang berkali-kali mengadakan pemilu dan membentuk MPR membuahkan hasil yang sama tiap periode, memilih Soeharto sebagai calon tunggal presiden RI. Sehingga bangsa ini belum pernah mendapatkan pengalaman pergantian presiden dengan mulus belum pernah terjadi (hal. 68). *Kedua*, tuntutan masyarakat terhadap kehidupan bernegara yang lebih transparan dan adanya kebutuhan demokratisasi. *Ketiga*, usia Pak Harto yang sudah senja. Terdapat kekhawatiran ketidakmampuan Pak Harto menyelesaikan tugas kepresidenan. Untuk ini diperlukan regenerasi tongkat kepemimpinan kepada genarasi yang lebih muda untuk tampil memimpin bangsa ini.

Isyarat tentang keinginan Pak Harto untuk mundur ternyata pernah dilontarkan sepuluh tahun silam, pada pidato pelantikan tahun 1988. "..bahwasanya di antara anak-anak saya ada yang mengatakan pelantikan kali ini (1988) merupakan pelantikan terakhir sebagai presiden buat saya, itu bisa dimaklumi. Di lihat dari segi rasio manusia memang usia saya yang sudah mencapai 67 ini, pantas saja pelantikan terakhir untuk saya..." (hal 263). Keinginan yang cukup lama disampaikan. Hal ini diulangi lagi saat berpidato dihadapan kader-kader Golkar, (intinya *lengser keprabon madhep pandhito*). Jadi jelas sejak kapan Pak Harto berminat mundur, namun rupanya bangsa ini butuh kearifan besar untuk meluluskannya.

Sayangnya menurut Amien Rais, Golkar sebagai mayoritas tunggal negeri ini belum melihat figur pemimpin nasional yang sepadan dengan prestasi Soeharto. Menjadi satu keanehan memang tatkala Golkar dalam setiap kesempatan memberi kriteria persyaratan seorang calon presiden yang layak memimpin negeri ini, dan tentu saja kriteria yang diajukan selalu saja melekat pada diri Soeharto.

Memasuki era globalisasi, bangsa ini jelas menghadapi tantangan yang berbeda, dibutuhkan iklim kenegaraan yang lebih demokratis. Ada dua faktor internal di negara kita yang mendukung kecenderungan ke arah demokrasi. *Pertama*, perpecahan di dalam dan kegagalan rezim-rezim otoritas yang menyimpang. *Kedua*, perubahan-perubahan dalam pembangunan, organisasi kesadaran dan mobilisasi masyarakat sipil. (hal. 86).

Untuk mengetahui siapakah presiden ketiga RI itu, buku ini tidak secara langsung mengarah kepada seseorang, tapi lebih mengajak pembaca untuk ikut memiliki wacana yang sama tentang Presiden Ketiga. Memilih pemimpin 202 juta rakyat Indonesia hendaknya bukan menjadi monopoli satu golongan saja, sebab satu pilihan yang salah jelas akan mempengaruhi nasib bangsa ini di masa mendatang. Di sinilah pers memiliki peran, ikut menyampaikan dan menjaga opini publik tentang seorang pemimpin yang mewakili aspirasi rakyat.

Semangat perjuangan untuk membangun bangsa bukan hanya milik satu golongan semata, saat ini dibutuhkan semangat baru dari kaum-muda untuk ikut berpartisipasi. Tentang kriteria memang dapat dibuat (paling ideal sekalipun) tapi jika bangsa ini terpaku pada seorang saja maka tidak akan ada perkembangan dan justru akan melahirkan kekecewaan-kekecewaan yang panjang.

Kenyataan yang dihadapi sekarang adalah Pak Harto sudah menyampaikan kesediaan untuk dipilih kembali menjadi presiden periode 1998-2003. Perbincangan mengenai jabatan kepresidenan kemudian menjadi hal *sakral* yang seakan tidak boleh diungkit-ungkit lagi.

Sementara jika kita melihat kenyataan, saat ini di dunia sedang terjadi reformasi di mana-mana, baik dalam bidang ekonomi ataupun politik. Hanya ada dua negara yang masih belum berubah Indonesia dan Kuba. Apakah bangsa ini akan segera mengukir sejarah baru, mendapatkan presiden ketiga-nya? Bangsa ini sangat bergantung kepada 1.000 kepala anggota dewan terhormat yang bersidang pada Sidang Umum, Maret 1998-lah yang akan memberikan jawaban.***

Much. Fatchurochman,
Mahasiswa Broadcasting, Fisipol UGM

Empat Penggal Subversi ala GARASI

ISTIMEWA

Pentas Teater Garasi Fisipol UGM
EMPAT PENGGAL KISAH CINTA
Pagi Bening (Serafin & Joaqin A Quintero), Sahabat Terbaik (James Saunders), Pernikahan Perak (John Bowen), Tempat Istirahat (David Campton).
Sutradara: Yudi Ahmad Tajudin
Auditorium Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta, 11, 12, 13 Desember 1997.

"Hendak kaubawa kemana cangkir-cangkir itu?" tanya seorang istri kepada suaminya.

"Aku akan membawanya ke belakang dan mencucinya."

"Kenapa?"

"Karena aku membencimu, sayang.."

Lalu perempuan itu tertegun. Suara biola perlahan-lahan mengalun mengakhiri adegan itu. Demukianlah pada malam itu, pada hari pernikahan perak mereka, sepasang suami istri akhirnya sadar bahwa mereka tidak benar-benar saling mencintai sepanjang pernikahan mereka.

Dan berapa banyak kisah-kisah semacam itu telah berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebuah tema tentang betapa rapuhnya hubungan laki-laki perempuan, sebuah tema yang usang dan sekaligus aktual justru karena "keabadiannya" menguntit perjalanan manusia sepanjang sejarahnya. Tema yang tampaknya "haram" dimunculkan ke ruang publik selagi kita disibukkan oleh persoalan-persoalan "besar": krisis moneter, suksesi, perubahan, utang luar negeri....Keriuhredaman yang tidak menyisakan ruang buat kita untuk mengusap sentimentalia. Sementara, kehidupan pernikahan tampaknya merupakan rahasia besar yang sama panjangnya dengan kehidupan itu sendiri.

****

Mixed Doubles, An Entertaintment on Marriage, demikianlah judul sebuah buku yang diterbitkan di Inggris tahun 60-an. Sembilan penulis muda berkumpul dan berniat untuk menulis sebelas lakon yang kemudian dihimpun dalam buku tersebut, yang kemudian dipentaskan untuk pertama kalinya di Hampstead Theatre Club pada tanggal 6 Februari 1969.

Empat Penggal Kisah Cinta sendiri mengambil tiga naskah dari buku itu yaitu *Sahabat Terbaik* (James Saunders), *Pernikahan Perak* (John Bowen) dan *Tempat Istirahat* (David Campton). Satu lagi yakni sebuah naskah lepas berjudul *Pagi Bening* karya Serafin & Joaqin A Quintero. Tiga naskah pertama diadaptasi oleh Suyatna Anirun (dan pernah dimainkan oleh Studi Teater Bandung bulan Agustus 1994), sedangkan *Pagi Bening* merupakan terjemahan Sapardi Joko Damono.

Menarik untuk dicatat, pilihan yang diambil oleh Garasi dalam rangkaian pentasnya yang berlangsung selama tiga malam (dengan tiga naskah tiap malamnya) berturut-turut kali ini. Setelah *Atau Siapa Saja* (1995) yang "serius" dan mencoba mengangkat persoalan-persoalan eksistensial manusia, *Panji Koming* (1996) yang segar, komedis dan politis, kemudian *Kapai-Kapai* (1997) yang eksploratif dan terakhir *Carousel* (1997) yang eksperimental dan mencoba mengolah kegelapan wilayah traumatis individu-individu yang teralienasi oleh teks-teks kekerasan, maka kali ini Garasi melengkapi perjalanan keseniannya dengan bermain realis.

"Teater juga *craftmanship*," demikian tulis Yudi Ahmad Tajudin dalam booklet pementasan. Pernyataan seperti itu, tampaknya makin menegaskan pilihan teater kampus yang baru berusia empat tahun ini; peningkatan kemampuan artistik. Mengolah hal mendasar dalam teater: akting dan keaktoran.

Empat Penggal Kisah Cinta itu sendiripun semula berawal dari ide untuk mewadahi latihan-latihan rutin dalam muara-muara sementara yang dibayangkan sebagai "pentas kecil". Sesuatu yang berada di luar dugaan sebab seberapapun kecilnya, ternyata tuntutan-tuntutannya tak kurang serius.

Maka kemudian di sana hadirlah Roselinawati yang bermain sebagai Norma (seorang nenek dalam *Tempat Istirahat*) dalam takaran akting yang patut dicatat, atau Nurlita Tuti dan Jamal yang selamat melewati jebakan irama yang cenderung ketat dengan dialog-dialog "sulit" dalam *Pernikahan Perak*, maupun Kusworo Bayu Aji yang sukses memainkan romantisme seorang kakek yang jenaka sekaligus menyentuh dalam *Pagi Bening*.

Dan tidakkah kesederhanaan kisah-kisah cinta itu menjadi subversi yang cukup sejuk setelah semua carut marut persoalan sosial yang menindih kita sejauh ini? Toh ia juga layak dapat tempat.***

Dirmawan Hatta

Merantau bagi orang Bawean tidak semata karena alasan ekonomi. Lebih jauh, merantau merupakan kewajiban bagi masyarakat Bawean untuk menaklukan 'dunia baru'.

SHOLAHUDDIN

Wajah daratan Bawean yang berbukit-bukit
Tantangan alam untuk dijawab?

Pulau Bawean: 'PULAU YANG SETIA MENJANDA'

Demikian **Haji Buang** namanya, perantau dari Bawean. Dulu di tanah asalnya, dikenal bekerja sebagai penangkap sapi. Beberapa tahun kemudian dengan berbekal ilmu *magic* dan *kanuragan* yang tinggi, merantaulah ia ke Singapura kira-kira akhir tahun '70-an.

Kedatangan Haji Buang saat itu bertepatan dengan terjadinya huru-hara pertarungan antara etnis Melayu dan etnis Cina. Dengan kelebihan *magic*-nya akhirnya Haji Buang berhasil mendamaikan pertarungan itu. Atas jasanya tadi, lelaki buta huruf dan sama sekali tidak mengenal nilai mata uang itu direkrut partainya mantan Perdana Menteri Singapura **Lee Kuan Yeuw**, PAP (*People Action Party*).

Keampuhan ilmu metafisikanya membuat Lee Kuan Yeuw menobatkannya menjadi dukun politiknya. Bila Lee Kuan Yeuw berniat mengadakan lawatan kenegaraan, Haji Buang-lah yang menjadi konsultan peruntungan perihal hari baik dan pintu masuk sebelah mana yang harus dimasuki PM Lee Kuan Yeuw tersebut.

Demikianlah satu kisah cerita tentang 'keberhasilan' perantau dari pulau Bawean yang tersebar luas di negara-negara jauh.

Bawean adalah pulau kecil "sendirian" dengan luas 231 hektar, terletak di Laut Jawa. 120 km sebelah utara Kabupaten Gresik Jawa Timur. Menurut catatan statistik, penduduk Bawean yang menetap di tanah asal sebesar 65.165 jiwa. Sedangkan yang berada di Malaysia ada sekitar 150 ribu jiwa, kemudian di Singapura 70.000 jiwa, sementara di negeri Kanguru Australia ada sekitar 10.000 orang dengan pusat di Darwin dan Perth.

Lantas, mulai kapan oarang-orang Bawean memulai tradisinya untuk melakukan perantauan?

"Perantauan orang Bawean ke luar negeri sudah bermula sejak berabad-abad yang lalu. Sejak masa kerajaan Majapahit yang dipimpin **Kertawijaya** (1447-1451 Masehi), menjalin hubungan dengan kerajaan Champa di negara yang sekarang bernama Kamboja. Jauh sebelum negara modern Indonesia ada," ungkap **Zulfa Usman**, seorang penulis asal Pulau Bawean kepada *Balairung*.

Alasan Merantau

Banyak sebab untuk memahami kenapa masyarakat Bawean memilih untuk merantau dari pada tinggal diam di rumah. Salah satu alasan adalah kondisi geografis pulau Bawean yang terletak di *crossroad* pulau-pulau besar nusantara, tanahnya berbukit-bukit kendatipun subur, orang Bawean sulit memilih lahan dan tidak ada sungai besar sebagai sumber irigasi.

Kondisi alam merupakan *challenge* yang harus direspon supaya mereka tidak hanya sekedar berada dan tenggelam dalam kekejaman alam yang *given* tadi. Di sini perantauan mempunyai signifikansi penting dalam

kelanjutan proses hidup yang *unpredictable*.

Perantauan adalah spekulasi yang niscaya sebagai konsekuensi logis ketidakberpihakan alam yang menantang mereka untuk menjawab sebuah *enigma* makna dari penderitaan obyektif tadi. Dan orang Bawean tidak menyerah. Mereka berlari dan membusungkan dada bahwa mereka bukan bangsa Fatalis yang menyerah pada potensi-potensi minimal mereka.

Seperti halnya cerita tentang Christhoper Colombus saat pertama kali mendarat di Benua Amerika yang orang Eropa dulu bilang sebagai "dunia baru". Ternyata dunia baru tadi menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada tanah sendiri. Berbondong-bondonglah orang Eropa menjelajah Amerika dan belahan dunia lain dengan didorong pandangan Copernicus dan Galilei bahwa *bumi itu bulat*.

Sementara tanah Eropa tidak terlalu subur untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Begitu pula yang terjadi di tanah Bawean. Karena mereka diasingkan gelombang dan jarak, bila ada informasi tentang keberhasilan saudaranya merantau di Malaysia atau Singapura, mereka pun berbondong menuju "dunia baru" tadi secara *massif*.

Hal lain yang menjadikan sebab orang Bawean merantau adalah faktor pendidikan yang kebanyakan masih kurang.

Latar belakang tersebut, menjadikan budaya merantau bagi orang Bawean merupakan ritual *fardlu 'ain* yang wajib dilakukannya. Kedewasaan seorang secara simbolis diukur dari ritual merantau tadi. Orang tua Bawean seringkali mendekap anaknya sebelum tidur seraya melanggamkan *syair kembara* yang banyak dihapal penduduk setempat.

"Ajhek nyengkap sewe' mon githak ngoker large'. Ajhek ngoker lange' mon githak cokop sango laher betin"

Maksudnya adalah : jangan menikah dahulu (menyingkap sewe'-kebaya perempuan) sebelum merantau (mengukir langit) dan jangan merantau sebelum cukup bekal lahir batin.

Pitutur seperti itu sudah menjadi konsensus yang diterima tanpa *reserve*. Dalam proses selanjutnya kemudian menjadi mitos yang harus dilestarikan keberadaannya. Meminjam analisis Mircea Elliade, filsuf Perancis yang menyatakan bahwa sebuah mitos musti dilestarikan melalui proses *inisiasi*.

Demikianlah, merantau bagi seorang pemuda ibarat "laku" yang harus dijalani untuk mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat setempat.

Masyarakat yang Majemuk

Bawean seperti kepingan-kepingan batu, kertas, perca yang membentuk lukisan mozaik lewat proses sejarah panjang hingga membentuk sebuah gambar besar yang telah menggulung batu, kertas, dan perca tadi dalam dataran eksistensi orang Bawean yang masih bergulat sampai saat ini.

Kemajemukan itu dapat dilihat saat orang Bawean menyebut "ayah" dengan berbagai varian panggilan dari bermacam suku bangsa seperti; abah, abe (Palembang atau Arab), owak, puwak, puwang (Mandar), emmak (Sulawesi), buppak (Madura), pak, ayah (Melayu), bapa, rama (Jawa), ai atau yai (Bugis). [Zulfa Usman, 1992]

Dengan beragam panggilan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Bawean hampir bisa dibilang masyarakat pedagang yang mempunyai "trah" petualang dan senantiasa bergerak.

Kebersamaan dan Tradisi

Yang menarik adalah apabila orang Bawean pergi ke luar negeri, menolak bila disebut TKI. Dengan dalih tujuan pertama merantau adalah menemui keluarganya di perantauan. Bagi mereka pergi ke Malaysia atau Singapura tidak ubahnya seperti dolan ke rumah sendiri sebab dapat dipastikan setiap orang Bawean mempunyai keluarga di sana.

Seperti halnya fakta tentang Haji Buang, orang Bawean di Singapura rata-rata bekerja tidak terlalu kasar semisal bekerja sebagai polisi, pegawai Bank, perusahaan dan pekerja kapal. Sedangkan di Malaysia kebanyakan orang Bawean bekerja kasar sebagai kuli bangunan. Gaji para pekerja di sana amat besar untuk ukuran orang Indonesia, rata-rata minimal satu juta rupiah per bulan.

Ribuan orang Bawean yang tinggal di Malaysia dan Singapura hidup secara komunal sehingga membentuk *enclave* atau diaspora tersendiri di sana. Tempat-tempat di mana mereka tinggal, dinamai *ponthuk* yang bisa dihuni berpuluh-puluh orang. Setiap *ponthuk* biasanya dihuni oleh orang-orang sesama kampung. Seperti *ponthuk daun*, *ponthuk Teluk Dalam* dan sebagainya.

Tempat tinggal mereka dibangun di atas "tanah haram", atau tanah milik pemerintah yang dibangun secara ilegal. Seringkali mereka merelakan ponthuknya digusur oleh pemerintah setempat kemudian pindah lagi mencari "tanah haram" baru.

Dalam komunitas-komunitas itu mereka gigih mempertahankan tradisi

SHOLAHUDDIN

Di dermaga Bawean
Orang sekampung mengantar saudaranya merantau

Melepas pisah keluarga yang merantau
Sedu sedan di mata mereka

ke-Bawean-nya. Mereka masih menggunakan bahasa Bawean, mengadakan selamatan dan *mauludan* sebagaimana yang mereka lakukan di negeri sendiri.

Baharuddin SH, pemuka masyarakat Bawean, kepada *Balairung* bercerita ketika berkunjung ke Singapura, "Di pusat perdagangan emas Singapura, *Gold Land Mark Hotel*, banyak Cina-cina yang fasih berbahasa Bawean untuk berkomunikasi dengan orang Bawean. Banyak orang Bawean seperti ada yang bernama Mak Endah yang tidak mau ngomong selain memakai bahasa Bawean," ujarnya.

Sifat orang Bawean yang komunalis ini seperti diakui **Emanuel Subangun** yang pernah memperdalam penelitian di Bawean adalah dengan sendirinya terjadi sebab posisi mereka yang labil di tanah rantauan mengandaikan kebutuhan untuk bersatu dalam satu ikatan berdasar kedekatan darah dan geografis asal usul.

Asimilasi

Orang Bawean sering dianggap pendatang haram oleh pribumi Singapura ataupun Malasyia, **Romli**, Pemuda asal kampung Daun, berusia 30-an yang pernah bekerja di Malasyia mengungkapkan, "Bahwa penduduk Melayu masih banyak yang memandang orang Bawean dan pendatang "haram" lainya dengan rendah karena dipandang hanya sebagai pekerja kasar dan sepertinya orang Melayu takut terdesak oleh para pendatang."

Namun secara umum orang Bawean mampu berasimilasi dengan penduduk setempat. Banyak orang Bawean yang melakukan kawin campur dengan etnis Melayu, Cina, bahkan India asalkan beragama Islam. Khusus dengan orang India Keling, sebagaian besar orang Bawean enggan, dengan alasan sederhana "terlalu hitam sih..." (Jacob Vredenbregt; Bawean dan Islam, 1990).

Dampak Merantau

Perantauan sering kali berdampak positif bagi terbukanya cakrawala pandang seseorang. Perantauan memperluas "peta kognitif" seseorang dalam menginterpretasikan realitas. Satu aksioma sejarah bersaksi, bila peradaban menutup diri tanpa membuka diri maka ia sesungghunya memendam dirinya secara perlahan-lahan.

Untuk menguatkan pendapat tersebut mungkin bisa di lihat dari berbagai peristiwa sejarah yang pernah ada, yakni; Misi Nabi Muhammad mencapai kejayaan setelah "berhijrah" dari Makkah ke Madinah. Bangsa Yahudi yang berhasil mengukir sejarah justru dari perjalanan panjangnya melakukan "eksodus" untuk menghindari pengusiran dan pemusnahan. Sedang kejayaan nusantara perlahan surut ketika pusat kekuasaan Maritim yang berjiwa dagang (baca; petualang) seperti Majapahit dan Sriwijaya terdesak ke daerah pedalaman menjadi kerajaan *Feodal Patrimonial* seperti tragedi kerarajaan Mataram di tanah Jawa.

Orang-orang Bawean di Malasyia menurut beberapa keterangan lebih bangga kepada Mahatir Muhammad ketimbang Soeharto. Menurut mereka, di Malasyia jarang terjadi sogokan, korupsi, dan proses yang berbelit-belit dalam urusan pemerintahan. "Yang memberi makan kami khan Mahatir, jadi persiden kami Mahatir" adalah ucapan yang wajar ditemui diantara mereka.

Tentunya orang Bawean banyak mendapat pelajaran ketika memperbandingkan kondisi-kondisi negara yang berbeda tadi. Namun, jika ditanya lebih lanjut mengapa gaji buruh di Malasyia lebih tinggi berlipat-lipat ketimbang di Indonesia, banyak dari mereka tidak tahu menahu masalah itu. Sebab orientasi mereka yang utama adalah masalah ekonomi, tidak sampai lebih lanjut mempelajari masalah politik, apalagi perkembangan demokrasi di negeri Jiran itu untuk diperbandingkan dengan pemerintahan rezim Soeharto di negeri asalnya, Indonesia.

Dominasi 'Janda'

Karena banyak lelaki yang merantau ke luar negeri ketimbang perempuan, maka jumlah wanita di Bawean lebih besar dari pada yang

Baharudin S. H
Pengurus Yayasan Pengembangan Pulau Bawean (YP2B)

lelaki. *Sex ratio* di Bawean mencapai 86 (Sex ratio: banyaknya laki-laki per 100 wanita). Sejak tahun 1930 Pulau Bawean oleh orang luar dijuluki "Pulau Puteri".

Julukan tersebut karena mengingat banyaknya perempuan-perempuan yang kelihatanya 'menjanda' namun sebetulnya masih setia menunggu sang suami kembali walau kadang setahun sekali belumlah pasti.

Perantauan adalah spekulasi yang niscaya sebagai konsekuensi logis ketidakberpihakan alam yang menantang mereka untuk menjawab sebuah *enigma* makna dari penderitaan obyektif

Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana kemudian mereka (baca; kaum perempuan) bisa mengatasi kebutuhan biologisnya dan tidak terjadi perselingkuhan?

"Kesetiaan dan kepercayaan pada sang suami, kontrol sosial yang kuat di masyarakat, serta peran nilai-nilai agama Islam yang menjadikan mereka bisa menjaga kehormatan sebagai wanita," ungkap Fatimah yang sudah hampir setahun ditinggal suaminya ke Malasyia ini.

Berkah Perantauan

Emmanuel Subangun menyebut Bawean sebagai "Pulau Kelahiran dan Kematian". Mereka lahir di Bawean, waktu muda merantau dan jika sudah tua kembali menikmati masa-masa lanjut di tanah kelahiran. Prinsip hidup seperti ini masih menjadi idealisme anak-anak muda Bawean sampai saat ini.

Dampak ekonomi perantauan bagi Pulau Bawean ibarat berkah. Pembangunan di pulau itu berjalan pesat. Sebagai ilustrasi menarik terdapat desa IDT bernama Sidogedung Batu, di Kecamatan Sangkapura yang tercatat sekitar antara 40 antena parabola berderet gagah merias wajah jalan-jalan kampungnya.

Di setiap rumah penduduk, hampir merata memiliki pesawat TV, Video, kompor gas, dan kendaraan bermotor. Wanita-wanita jarang ditemui tanpa menggunakan perhiasan emas hingga mencapai ratusan gram melilit tubuhnya. Perputaran uang yang begitu cepat mencapai miliaran rupiah tentu saja membawa dampak kemajuan ekonomi yang luar biasa.

Namun tidak sedikit membawa perubahan sosial budaya yang cukup signifikan. Muncul sikap pragmatis di kalangan anak muda Bawean, ukuran kesuksesan sering diukur dari berapa besar kekayaan yang dipunyai seseorang. Anak-anak muda setelah lulus SMA (SMU) tidak banyak melanjutkan kuliah namun langsung menyusul kerabatnya di Malasyia atau Singapura untuk bekerja dan mendapat banyak uang di sana.

Arus masuk barang-barang yang di bawa perantau dari luar negeri tak pelak lagi membanjiri Bawean. Barang-barang merek terkenal yang belum banyak digunakan di Jawa sudah biasa dipakai orang Bawean. Barang bawaan yang paling ironis sebab banyak menyebar secara samar di kalangan anak muda adalah kaset-kaset video BF (*Blue Film*) yang didapat dari Malasyia, Singapura, dan Pulau Batam secara mudah. Kaset-kaset tadi bukan hal yang aneh lagi bagi anak kecil usia Sekolah Dasar sekalipun. Tak ubahnya seperti menikmati kacang goreng di atas meja makan.

Hal semacam itu dibenarkan Baharuddin ,S.H. "Bahkan dulu waktu kaset macam itu belum banyak beredar di Jawa, banyak pejabat-pejabat dari Jawa bila berkunjung ke Bawean sering menanyakannya," ungkapnya serius.***

Shalahuddin Gz.

Religion of Democracy

Nur Khoiron
mahasiswa Jurusan Sosiologi
FISIPOL UGM

Modernitas ibarat si maling kundang. Kepercayaan mistis dan keyakinan-keyakinan teologis yang semula diserukan cukup lantang oleh agama-agama mulai dipinggirkan — kalau perlu dimatikan. Dan otoritas kaum agamawan-kharismatis yang mewartakan kebenaran melalui kitab wahyu yang menjanjikan berkah dan keselamatan alam mulai ditinggalkan. Maka hilanglah otoritas gereja, sebagaimana dicerminkan dalam pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa yang manandai berakhirnya segala otoritas di luar diri individu.

Sappere aude, demikian slogan yang ditakbirkan pada zaman ini, yang kemudian dikenal sebagai *aufklarung* (pencerahan). Suatu era yang didukung oleh mega-proyek modernitas.. Di sini manusia mulai dijernihkan kembali kepada diri yang otonom. Niscaya, "agama-agama konservatif" bukan lagi tempat mengadukan segala kegalauan sejarah. Maka hidup di dunia modern sebetulnya lebih menuntut kepada individu untuk menemukan penjelasan eksistensialis, teologis (wacana ketuhanan) dalam lampu terang akal filosofis (manusia berfikir), sebagaimana Rene Descartes menyampaikannya dalam ungkapan masyhur, "*Cogito ergo sum*" (saya berpikir maka saya ada). Descartes setidaknya hendak menyatakan bahwa persoalam hidup yang di dalamnya mencakup segala orientasi, cita-cita dan ambisi manusia seharusnya dibuahkan dari pemikiran subyek-otonom, bukan lagi diturunkan dari wahyu, ataupun tradisi mistis.

Untuk mengukuhkan kedaulatannya itu, modernitas menemukan ruang huni baru dalam pranata modern sebagaimana disinyalir Max Weber, yakni teknologi dan birokrasi. Dua hal ini menjadi pilar utama yang mendominasi "wilayah-wilayah dunia-kehidupan" masyarakat modern. Pranata-pranata tradisionai yang berwatak mistis-irrasional tergusur oleh sistem sosial yang rasional sekaligus impersonal.

Realitas di atas menyisakan pertanyan krusial sebagai semacam gugatan, sanggupkah ruang huni baru ini mengantarkan manusia pada emansipasi yang lebih adil, sekaligus memberi berkah bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia seutuhnya?

Tokoh mahzab Frankfurt, Habermas meragukan pertanyaan ini. Meski ia tetap berharap pada proyek modernitas, Habermas membeberkan adanya cacat-cacat modernitas yang menjadi paradoks bagi misi emansipasi modernitas itu sendiri. Karena, modernitas yang mewujud dalam ruang-ruang kehidupan yang serba birokratis (birokratisasi wilayah kehidupan) ternyata sekedar menyemai hubungan-hubungan impersonal. Dengan demikian segala tindakan manusia dalam relasi sosial sekedar dimaknai sebagai "rasionalitas tindakan-bertujuan". Inilah yang lalu dibayangkan oleh Habermas sebagai, "rasionalisasi berat sebelah" (meminjam istilah F. Budi Hardiman). Tindakan sosial yang hanya mengorientasikan efektifitas, optimasi dan efisiensi. Individu disini justru kehilangan otonominya berkait dengan posisinya yang dimaknai sekedar peran (fungsi)-nya, bukan siapa dirinya.

Birokrasi dan teknologi yang semula dibayangkan sebagai instrumen biasa untuk memudahkan kegiatan teknis manusia, tanpa disadari berubah menjadi mesin raksasa yang menguasai aspek kehidupan manusia. Menyinggung pendapat Herbert Marcuse, kekuasaan teknologi lebih jauh telah menyediakan legitimasi yang kuat bagi kekuasaan politik yang sedang meluas, yang mengabsorbsi segala bidang kebudayaan (LP3ES, 1990).

Singkatnya, paradoks modernitas melahirkan berbagai krisis seperti krisis kultural —disebabkan warga masyarakat kehilangan akar tradisinya yang melahirkan berbagai ketidakpastian, dimana individu merasa kehilangan diri maupun kolektif. Di titik ini muncul fenomena sosiologis yang disebut sebagai, retradisonalisasi. Di negara-negara maju *(advance industrialism)*, fenomena ini ditandai oleh maraknya fenomena penggalian pesona-pesona mistik yang irrasional di tengah absurditas dunia modern. Situasi yang tidak jauh berbeda tengah terjadi pula di negara kita: Munculnya Ki Gendeng Pamungkas dalam pentas politik nasional paling tidak dapat ditafsirkan sebagai fenomena kejenuhan masyarakat kita mencari jawaban logis atas berbagai persoalan.

Pencarian identitas kolektif muncul pula dalam relasi sosial yang dicirikan oleh merebaknya ikatan-ikatan kelompok primordial seperti agama, ras, etnis dll, sebagai gerakan *counter-productive* atas fenomena modernisme. Ketakutan dan sikap apriori mereka yang berlebihan terhadap modernisme, memicu reaksi perlawanan konfrontatif terhadap berbagai wacana yang diusung bersamaan dengan proyek modernitas seperti, demokratisasi, liberalisasi, kapitalisasi dan lain lain.

Di negara-negara sedang berkembang, khususnya yang mayoritas beragama Islam, muncul pula gejala yang dinamakan, confessionalisasi agama. Suatu ekspresi

keberagamaan — sebagai reaksi sepihak atas modernisme, yang menuntut pengakuan formalistis dalam kelembagaan politik —meski kadang-kadang harus diperjuangkan dengan cara yang tidak "demokratis". Fenomena ini bermuara pada keinginan kolektif untuk menegakkan bangunan "format politik alternatif" sebagai peneguh ikatan kolektif mereka, misalnya seperti di negara Iran, Pakistan, Aljazair, dll yang direpresentasikan dengan cara yang berbeda-beda. Kemunculan ICMI beberapa waktu lalu di Indonesia, sebagian pemerhati dan tokoh politik menafsirkannya secara demikian. Gus Dur misalnya mensinyalir adanya gejala sektarianisme di tubuh ICMI.

Ditinjau secara demikian maka sebenarnya agama secara sosiologis ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi ia kerap menjadi sumber pemicu bagi munculnya gerakan *counter- productive* modernisme, namun disisi lain, kekerasan (*violent*) sekaligus kekeringan modernisme justru semakin membesarkan kerinduan orang untuk kembali menengok akar tradisi mereka, yang mereka temukan dalam wacana agama agama tradisional.

Uraian sederhana ini setidaknya mengantarkan kita pada kesimpulan untuk perlunya manusia modern menemukan "kearifan tradisional" dengan menerima simbol agama tanpa harus terjebak pada ekslusifisme dan sektarianisme. Jika modernisme dalam kacamata Habermas telah kehilangan rasionalitas-komunikatifnya, maka pengungkapan simbol-simbol agama secara kaku dan formalistis berakibat pada pemunculan wajah agama tanpa spiritualitas. Atau meminjam istilah kaum budayawan, agama yang kehilangan dimensi estetisnya. Karena, Agama hanya dimaknai pada dimensi luarnya (aspek syariati) bukan pendalaman dimensi spiritualitasnya (makrifat).

Dalam Istilah yang banyak dipakai kaum sufi, estetika merupakan sarana menuju transenden yang disebut sebagai jalan kerohanian. Dengan merajut kembali ekspresi keagamaan yang lebih estetis kita berikhtiar mendekonstruksi sekaligus merevisi proyek modernitas. Karena meski semula agama dinafikkan dalam proyek modernitas –karena cara kerjanya yang irrasional, tapi pada sisi lain justru dapat mematangkan kembali modernitas yang telah mengalami cacat fundamental sebagaimana pernyataan Habermas di atas.

Oleh karenanya, dimensi estetis sebagai ekspresi spiritualitas telah menjadi kebutuhan krusial dalam proyek modernitas sebagaimana Max Weber menyebut modernitas sebagai telah kehilangan pesonanya *(disenchanment of the world)*. Pengungkapan dimensi spiritualitas juga bermakna eksistensialis yang mengandung arti akan penemuan kembali jati diri manusia yang teralienasi oleh strukturisasi dunia modern. Krisis alienasi ini ditandai oleh hegemonisasi kultur birokratik ke dalam ruang-ruang publik yang berimplikasi pada tiadanya "rasionalitas komunikatif". Manusia di konteks ini menjadi kering tanpa jiwa karena hanya dijadikan sekrup dari sistem global yang disebut kapitalisme: Sistem anomie yang menghegemoni pikiran manusia.

Seiring dengan perkembangan demokratisasi pada tingkat global, maka peran agama di masa mendatang juga dapat dilihat dari seberapa jauh ia mampu mengelaborasi wacana demokratisasi. Agama dan demokrasi diharapkan mampu menjadi wacana yang saling mengisi. Dalam proses demokratisasi, agama berperan menjadi spirit untuk mengeliminir praktek demokrasi yang dimaknai pada sisi formalitas belaka, sementara sisi substantifnya semakin menjauh. Inilah yang disebut sebagai ironi demokrasi, suatu gejala dimana kemenangan suara secara kuantitatif kelompok mayoritas atas kelompok minoritas di masyarat, diklaim sebagai parameter final kesuksesan sistem demokrasi.

Disini, demokrasi yang semula masih menjadi perbincangan politik (kaitan antara negara dan masyarakat sipil), diutamakan akan dapat dielaborasi menjadi persoalan kemanusiaan mondial. Menjadi bagian dari kebutuhan hakiki yang perlu ditegakkan secara bersama. Dengan demikian kualitas demokrasi bukan semata dilihat pada seberapa jauh konsep ini terinstitusionalisasi ke dalam lembaga-lembaga formal, melainkan pula seberapa mampu otonomi individu dapat diaktualisasikan di tengah gelombang dunia modern.

Karena, dilema modernitas –meski semula membawa pesan pembebasan yang berpusat pada otonomi individu, ternyata semakin menjauh dari cita-cita kebebasan manusia hakiki. Dalam iklim global dimana muncul kekuatan-kekuatan anomie, otonomi individu kian mengalami erosi. Melalui media massa, televisi atau mungkin pesan persuasif ideologi tertentu, otonomi individu dicampakkan. Bius media atau ideologi-ideologi tertentu ini biasanya menetukan segala tujuaan, orientasi dan obsesi-obsesi individu. Kebebasan bukan kita terima untuk mengukuhkan kedaulatan individu, melainkan menjadikannya sebagai *consumer culture*; makhluk konsumen yang keinginan hidupnya ditentukan oleh kepentingan pasar.

Maka sejauh penalaran ini, bukan mustahil, bila agama mampu menemukan kembali otoritas individu di tengah gempuran modernitas, agama pasti bisa bertahan untuk menyertai proyek modernitas sebagai gerak historis kemanusiaan yang tak bisa dibendung oleh siapapun. Wacana agama seperti ini mengingatkan kita pada kutipan hadits mashur, "Barangsiapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Allah". ***
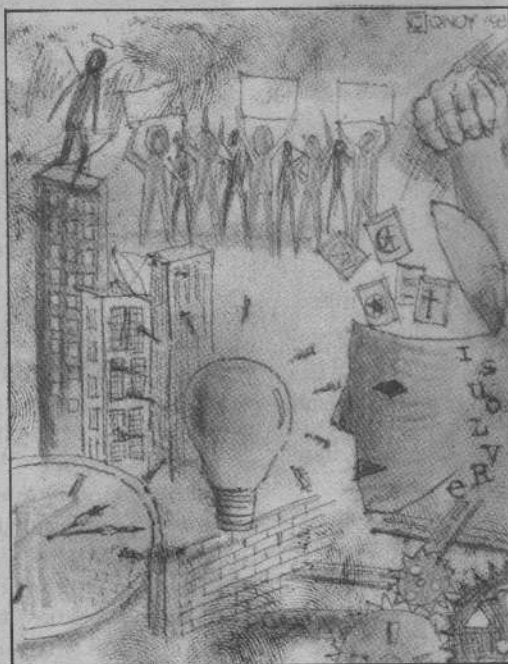
AJARAN KEMATIAN DAN GERAKAN REVOLUSIONER

A. Joko Susmana
Mantan ketua Teater Retorika Yogyakarta

Yang bernama kekuasaan penindas adalah sebuah kekuasaan yang telah merampas hidup mulia manusia. Ia juga telah memaksa manusia untuk tidak bercerita tentang hidup tetapi justru soal kematian bahkan memfilsafatkan kematian. Apalah artinya slogan **merdeka atau mati** dan **demokrasi atau mati** yang diserukan Partai Rakyat Demokratik kalau bukan sebuah cerminan dari kekuasaan kejam yang mampu memaksa manusia untuk hanya memiliki dua pilihan: **hidup atau mati**.

Namun di sini jugalah akhirnya terletak sebuah komitmen hidup tertinggi dari sebuah hidup manusia yang memberontak terhadap kekuasaan yang menindas yaitu kesadaran terhadap kematian. Kematian tidak lagi perlu ditakuti dan membuat cemas tetapi ia menjadi bagian dari kepeloporan untuk membebaskan rakyat tertindas. Misalnya di kalangan orang komunis khususnya di daerah Blitar, sebelum pemberontakan tahun 1926, banyak orang masuk partai sudah paling dulu di dalam pikiran disiapkan akan kesukaran yang berhubungan dengan **tiga B** yaitu bui (penjara), buang (interniran) dan bunuh (yaitu kemungkinan menghadapi tindakan ganas dari pemeritahan Belanda). Dan di kalangan Islam seperti HM Misbach (seorang Islam reformis yang meninggal di tanah pembuangan Manokwari) kematian dipahami sebagai bagian dari iman kepada Allah. Mereka yang rela mati dalam melawan kekuasaan yang menindas adalah pahlawan-pahlawan Islam, yang mati sahid di jalan Allah.

Diskusi kematian makin lama makin rumit ketika ia terpaksa dibungkus dengan ajaran-ajaran ontologis walaupun ia masih berada dalam dataran politik pemberontakan terhadap kekuasaan yang menindas. Di pihak lain dapat dilihat misalnya ajaran Sarekat atau Islam Abangan Mangoenatmodjo sebelum tahun 1926. Mangoenatmodjo seorang bekas lurah di daerah Klaten dan meninggal di tanah pembuangan Digul, mengajarkan bahwa:

"Tuhan Allah itu tidak ada. Kitab suci hanya berisi kebohongan belaka supaya orang gampang diperintah dan ditindas. Kematian seseorang manusia akan selesai begitu saja.Tidak ada hidup sesudah mati: nabi, wali, ratu bajingan sama saja.. Pengadilan gaib itu tidak ada. Yang mengatakan dosa dan mengadili dosa itu sesamanya manusia. Karena itu perbuatan jahat yang tidak diketahui oleh manusia lain juga tidak akan ada yang mengadili.(lihat Bratakesawa, Falsafah Sitidjenar, 1958;9)

Dengan ajaran itu Mangoenatmodjo mengajak dan mengajar rakyat:"*Jangan takut pada senjata penguasa, hukumannya, denda-denda dan bahkan kematian* sebab "*tidak ada sesuatu yang ada sebelum kelahiran dan sesudah kematian. Rakyat tidak perlu takut pada kematian karena jika saatnya tiba orang akan mati kapanpun dan di manapun.* Jadi "*tidak ada alasan lagi untuk takut pada penguasa dan polisi-polisi.Yang membunuh rakyat itu bukan pejabat atau polisi tetapi peluru-peluru*".(lihat Takashi Shiraaisi, Zaman Bergerak, Grafiti, 1993;276-277)

Ajaran Sarekat Abangan ini menurut Mangoenatmodjo didasarkan pada ajaran Falsafah Sitidjenar yang dimengerti sebagai seorang sufi yang memberontak terhadap kekuasaan Demak dan ajaran agama para
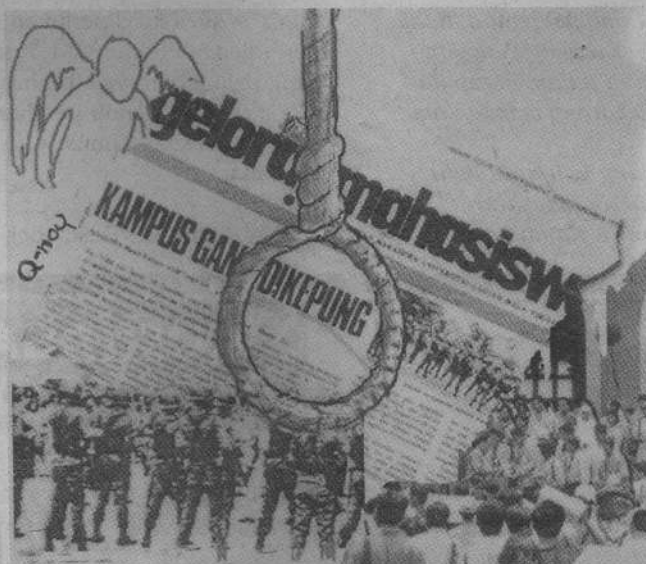
wali. Sitijenar akhirnya dihukum mati tetapi ajaran dan sikapnya terhadap kekuasaan Demak masih diteruskan oleh muridnya yang bernama Kyageng Pengging.

Di mata Kyageng Pengging dunia dipahami sebagai penderitaan dan kematian adalah **lautan rakhmat**. Tetapi dengan dunia yang menderita itu, ia tidak lari ataupun bunuh diri. Ia menerima segala tiba sambil terus mempersiapkan pemberontakan: **mengaji dan bertani.**

"Saya tidak dapat memilih. Semuanya mau. Apabila memilih Sepi/Kosong, saya tentu menemui kebahagiaan, tetapi itu termasuk menyia-nyiakan kesempatan. Seandainya memilih yang ada berapa lama orang hidup di dunia, seberapa rasanya orang mengenyam kenikmatan, kan tidak ada orang yang berusia seribu tahun? Kecuali kenikmatan dalam kematian, itulah yang dikatakan hidup buat selama-lamanya, sampai berjuta-juta tahun tidak akan mati lagi. Maka tekad saya hanya menyerah kepada Tuhan bagaimana keadaan keturunan saya kelak tidak terlalu saya risaukan"

Kyageng Pengging menolak tunduk pada Kekuasaan Demak yang juga dianggapnya sudah tidak lagi memperhatikann kehidupan santri-santri pedesaan. Sampai akhirnya Sunan Kudus datang untuk menegaskan sikapnya yang sesungguhnya terhadap Demak dan sekaligus mendapat wewenang menghukum mati Kyageng Pengging

"Kakang Pengging... Pilihlah salah satu, jika memilih di dalam akan menjadi jahil, sedangkan jika memilih di luar, itu namanya tersesat. Bila memilih atas itu mengumandang disebut Jatingarang (penjaga mata angin) jika memilih bawah itu namanya orang bingung. Orang bingung kacau balau pikirannya."

"Luar, dalam,. bawah, atas itu milikku semua, tidak boleh ditolak atau dipilih," jawab *Kyageng Pengging.*

"Kabarnya Kyageng dapat mati di dalam hidup dan hidup di dalam kematian. Nah sekarang cobalah aku ingin melihatnya."

"Oh, adikku, terserah apa saja yang kau tuduhkan kepadaku, aku menurut. Kau katakan aku santri, memang nyatanya batinku ini santri. Kamu katakan keturunan ratu, memang begitu. Kau tuduh Tuhan, memang aku ini, Tuhan. Dikatakan manusia/makhluk, memang aku adalah makhluk....Tak ada makhluk yang mati tanpa sebab. Meskipun aku dihukum oleh raja, ya terbatas hanya pada diriku, jangan melibatkan anak cucu. Mari, iriskan dan torehkan pisaumu itu ke sikuku ini." Kemudian Siku Kyageng Pengging ditoreh dengan sebilah pisau oleh Sunan Kudus sehingga meninggal dunia (lihat Wiryapanitra, Babad Tanah Jawa Blambangan-Pajang, 1993;189-190,daharaprize, Semarang)

Nampak bagaimana kematian telah menjadi tujuan kebahagiaan. Apalah artinya hidup di bawah kekuasaan yang menindas kecuali keinginan mati dan lepas dari penderitaan dunia?! Dalam kerangka pemikiran Freud, inilah yang disebut naluri kematian. Keinginan mati adalah keinginan yang sejati untuk menemu nirvana atau firdaus yang hilang tempat kedamaian abadi bertahta. Dari Freud, manusia dipahami sebagai manusia yang selalu berkehendak-mati sekaligus berkeinginan hidup membangun peradaban yang semakin baik. Tidak kejam dan tidak menindas.

Apakah keinginan mati adalah cerminan dari sebuah keberadaan dunia dan hidup manusia yang frustrasi? Barangkali benar tetapi justru dari sini jugalah Albert Camus menemukan cara hidup manusia yang bernilai.

Di bawah rejim kekuasaan yang menindas, manusia telah kehilangan eksistensinya. Untuk mendapatkan kembali eksistensi manusia yang sejati, seorang manusia tidak boleh larut atau lembek terhadap kekuasaan yang menindas. Ia harus punya pilihan hidup yang tegas. Dunia sudah menjadi *absurd*. Sebagai jalan pelepasan dari dunia *absurd* itu diperlukan **gerakan revolusioner**. Kalau perlu dengan bunuh diri. Konsekwensi berikutnya hidup yang paling berharga, bernilai dan bereksistensi adalah hidup dengan penuh pemberontakan seperti credo eksistensialisme Camus: **Aku memberontak karena itu aku ada.**

Yogyakarta, 13 Desember 1997

Krisis Legitimasi Ekonomi-Politik Orde Baru

A. Prasetyantoko
Alumnus Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UGM

Menikmati tayangan TV dan berita-berita di media massa akhir-akhir ini, lebih banyak menimbulkan "keresahan" daripada terhibur. Sederet persoalan akan terpapar di hadapan kita, tanpa pernah tahu apa akar persoalanya dan harus berbuat apa, sehingga hanya menimbulkan "kejengkelan" yang terus memuncak dari hari ke hari. Kita bisa menyaksikan bagaiman tragedi sosial tengah mengahantui masyarakat kita. Mulai dari pembantaian bayi-bayi, kelaparan di Irian yang merenggut ratusan nyawa, kebakaran hutan, jatuhnya pesawat, tawuran preman di Tanah Abang, kasus Jamsostek yang melibatkan tindak korupsi wakil rakyat (DPR), sampai kasus yang paling populer sebagai isu elitis, yakni krisis moneter yang terus mengguncang-ngguncang stabilitas makro ekonomi kita.

Berpijak pada realitas sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat kita ini, kita akan melihat bagian format ekonomi-politik Orde Baru yang telah dibangun sejak tahun 1966 lalu. Naiknya harga-harga, kelaparan dan keresahan sosial adalah satu-satu pemicu yang mengakibatkan rezim Orde Lama tumbang, sekaligus menjadi dasar legitimasi dari munculnya rezim Orde Baru. Apakah gejolak sosial yang terjadi sekarang ini, sebagaimana terjadi pada revolusi 1965, akan menimbulkan krisis legitimasi terhadap rezim Orde Baru? Pertanyaan ini tidak bigitu saja bisa dijawab, karena harusu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga menentukan sebuah perubahan sosial yang revolusioner.

Dari fenomena sosial yang dipicu oleh krisis moneter yang terjadi sejak bulan Juli lalu ini kita akan menengok bagaimana format ekonomi-politik Orde Baru dibangun dan apa implikasi logisnya yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat kecil. Sederet persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa kita ini bisa menjadai jembatan bagi kemandegan analisis yang lebih sering terjadi sewaktu kita mencoba menganalisis sewaktu kita mencoba menganalisis "sistem ekonomi-politik Orde Baru".

Rezim Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru muncul dalam panggung politik nasional sebagai koreksi terhadap sistem politik yang berlangsung selama Orde Lama. Sejak muncul pada tahun 1966, proyek birokrasi yang terbesar adalah mengatasi kekisruhan politik, agar tercapai cita-cita pembangunan bangsa, menuju masyarakat makmur-sejahtera. Maka prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta ukuran-ukuran ekonomi yang lain. Modal digunakan sebagai instrumen utama untuk menopang proyek pembangunan tersebut dengan memperluas akses sebesar mungkin aliran pinjaman asing melalui lembaga-lembaga ekonomi dunia dan forum internasional yang lain.

Situasi ini tentu saja mendapat respon yang positif dari negara-negara maju yang telah mencanangkan program "pembangunanisme" di negara-negara sedang berkembang. Dua lembaga ekonomi dunia yang menjadi tumpuan harapan kita waktu itu adalah Bank Dunia dan IMF. Keduanya didirikan dengan tujuan untuk membantu mengelola pembangunan negara-negara berkembang, baik dalam wujud bantuan proyek maupun bidang moneter. Pendirian kedua lembaga ini tidak lepas dari strategi besar kapitalisme dunia yang diwakili oleh AS sebagai satu-satunya pemenang dalam perang dunia II. Strategi pembangunanisme yang dicanangkan oleh pemerintahan **Harry S. Truman** diaktualisasikan dalam format ekonomi politik dunia yang digunakan untuk mengndalikan percaturan dunia sampai sekarang. Kenyataan yang tidak bisa dihindari

sewaktu melakukan analisis terhadap sistem ekonomi politik Orde Baru adalah mempertimbangkan peranan faktor asing yang masuk melalui bantuan luar negeri.

Selain untuk mendapatkan bantuan asing strategi lain yang digunakan untuk mensukseskan pembangunan adalah dengan menstabilisasi kehidupan politik melalui serangkaian rekayasa di bidang sosial politik. Terobsesinya pembangunan pada wilayah ekonomi membuat program keterlibatan masyarakat dalam mekanisme politik dikorbankan sampai pada titik terendah. Negara memegang kendali atas sumber-sumber potensi bangsa dan dinamika masyarakat melalui sistem korporatisme. Program stabilisasi kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari peranan militer yang sangat dominan posisinya, serta menjadi andalan dalam mengatasi persoalan stabilitas nasional. Kuatnya dominasi militer pada masa awal pembangunan sangat didukung oleh kemampuan negara dalam membiayai militer dari hasil penjualan minyak yang mengalami *booming* di tahun 1970-an dan 1980-an. Selain karena kuatnya peranan militer, *bonanza* ekonomi yang dihasilkan dari penjualan minyak memungkinkan negara membiayai pembangunan ekonomi domestik dengan hasil yang dramatis.

Strategi pembangunanisme yang masuk dalam sebuah rejim yang kuat (didukung oleh aparatus militer dan lembaga-lembaga hegemoni yang lain) menghasilkan sebuah tatanan/sistem ekonomi-politik yang menempatkan negara dan lembaga birokrasi pada posisi yang tak terbantahkan. Sementara itu, relasi-relasi sosial yang hidup di dalam masyarakat dibiarkan dan terus direkayasa agar tidak menggumpal dan menjadi satu kesatuan sehingga akan menyaingi kekuatan negara. Negara melalui pembangunan yang didukung dua kekuatan utama (militer dan modal) membangun sebuah tatanan/sistem ekonomi-politik yang hasilnya bisa kita lihat sekarang ini.

Pola pemerintahan Orde Baru

Berbagai studi dilakukan untuk menggambarkan bagaimana interaksi antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), yang dalam perkembangannya menunjukkan kompleksitas pola interaksi yang semakin rumit dan khas. Pola interaksi inilah yang kemudian dijelaskan lewat model yang memiliki basis dan kerangka teori yang beraneka ragam.

Pemerintah Orde Baru sering dipahami sebagai manifestasi kepentingan negara yang mengesampingkan interaksi harmonis antara negara dan masyarakat. Hal terpenting adalah terakomodasinya kepentingan negara dalam setiap pola kebijakan dan strategi pembangunan yang terkadang mengorbankan kepentingan masyarakat.

Pendekatan yang memberikan perhatian terhadap posisi negara di hadapan masyarakat adalah konsep patrimonialism dan *bureaucratic polity*. Model patrimonial menggambarkan hubungan *patron-client*, yang sangat mengandalkan jaringan pribadi. Model lain yang banyak dipakai untuk menjelaskan fenomena ekonomi-politik Orde Baru adalah model *bureaucratic-authoritarianism*. Model ini dipahami sebagai model represif-militeristis yang digunakan untuk mendukung ideologi stabilitas nasional dengan dalih kelangsungan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi lewat adopsi sistem industrialisasi tidak bisa terlepas dari *platform* politik yang stabil. Seluruh kekuatan negara "diabdikan" untuk kepentingan stabilitas politik agar tatanan pembangunan ekonomi tidak terganggu. Di bawah rejim yang otoriter, sistem korporatisme semakin menempatkan negara dalam posisi yang semakin kuat, serta mampu melakukan fungsi kontrol dan melakukan intervensi terhadap seluruh organisasi dan asosiasi yang ada dalam masyarakat.

Menurut pendekatan strukturalis negara ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari jaringan ketergantungan dengan modal asing. Negara memiliki alat pengontrol terhadap modal dan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat, dan melalui jaringan internasional birokrasi mampu melakukan rekayasa sistem untuk menjamin keamanan modal asing.

Dari beberapa pendekatan ini dapat disimpulkan beberapa karakter dasar sistem ekonomi politik Orde Baru yang dibangun sejak berdirinya rejim ini pada tahun 1966. Negara dalam hal ini rejim Orde Baru tetaplah sebuah kekuatan yang maha besar di hadapan masyarakat, sehinggga tidak ada lagi kekuatan yang mampu mengahalangi pemaksaan kepentingan negara dalam praktek penyelenggaraan negara. Format politik yang dibangun adalah korporatis, sehingga dimungkinkan adanya kontrol yang terus menerus dari negara terhadap seluruh kekuatan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi-politik Orde Baru, gejala yang paling nampak adalah jaringan *patron-client* yang sengaja dibangun untuk menjamin berlangsungnya kemapanan politik dan kuatnya negara. Sebenarnya pengusaha ditempatkan dalam posisi

yang lemah, karena mesin bisnis akan berjalan jika mendapatkan restu dari pihak birokrasi. Pemerintah menjadi pelayan jasa yang menjual asetnya ini untuk kepentingan kedua belah pihak. Munculnya lisensi, konsesi, kontrak kerja, subsidi dan fasilitas lainnya dapat dipahami dalam kerangka hubungan patron-client ini. Ekonomi dan bisnis menjadi sapi perah untuk memuaskan obsesi politik untuk memantapkan ideologinya, sehingga beban yang harus ditanggung oleh bidang ekonomi sangat berat.

Momentum booming harga minyak di pasar dunia dan strategi substitusi impor dapat disebut sebagai wahana tumbuh dan berkembangnya perilaku rent-seeking yang semakin membabi buta dari waktu ke waktu. Booming minyak menyediakan modal yang berlimpah bagi negara untuk membiayai pembangunan yang dibagi-bagikan secara tidak merata. Sementara dalam strategi substitusi impor pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan proteksi dengan alasan sebagai industri bayi yang perlu dilindungi (*infant industry argument*).

Demikianlah format ekonomi-politik Orde Baru dibangun atas dasar pola ketergantungan yang kronis, serta menempatkan pengusaha dalam derivasi kepentingan kekuasaan. Perilaku bisnis tidak seutuhnya mengikuti hukum pasar karena dibebani dengan muatan yang sarat dengan kepentingan politik. Kekuatan pasar menjadi sangat relatif dihadapan kekuatan politik yang sedemikian besarnya. Negara memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan *status-quo* dengan melakukan komersialisasi birokrasi dan mempertahankan sistem kapitalisme sebagai sumber penghidupan negara.

Pertama-tama pemerintah Orde Baru memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem kapitalisme untuk jangka waktu yang panjang. Birokrasi negara selalu menempatkan pengusaha dan pribadi-pribadi sebagai bagian dari kapitalisme tersebut, tetapi negara bukan semata-mata sebagai alat dari pengusaha, justru negaralah yang memperalat pengusaha demi kelangsungan sistem kapitalisme yang menguntungkannya.

Penutup

Jika kita berbicara mengenai persoalan yang hadir akhir-akhir ini (*the current issues*), sebenarnya kita tak bisa meninggalkan background historis yang berakar dari sebuah format sistem ekonomi-politik Orde Baru yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Maka dalam kaitannya dengan persoalan krisis moneter misalnya, persoalannya tidak akan pernah selesai hanya dengan meminta bantuan IMF. Persoalan yang jauh lebih penting adalah melakukan transisi, transformasi terhadap sistem ekonomi-politik Orde Baru yang sudah terlanjur busuk ini.

Ditengah krisis ekonomi ini momentum Natal, Tahun Baru dan Lebaran akan sangat rentan menimbulkan gejolak sosial yang sulit dikendalikan. Kenyataan ini bisa menjadi stadium awal dari sebuah krisis politik dan krisis ekonomi, yang jika hadir bersamaan, dari pengalaman sejarah, sangat memungkinkan terjadinya gerakan *people power* (revolusi). Meskipun hal tersebut masih tergantung dari beberapa faktor lain, dianataranya sejauhmana perpecahan elite dan militer akan mematangkan situasi, sampai seberapa jauh krisis akan berlanjut, dan sejauhmana kemampuan negara akan mampu memberikan solusi konkrit.

Kenyataan yang membedakan situasi sekarang ini dengan kondisi tahun 1965 adalah keberhasilan pembangunan yang bisa "dijual" sebagai legitimasi rejim Orde Baru untuk mempertahankan *status quo*-nya. Namun munculnya gejolak akhir-akhir ini tetap menggoyahkan legitimasi ekonomi-politik Orde Baru. Krisis ini dapat menjadi momentum untuk mendorong gerakan perubahan, baik dari dalam dan terutama dari luar sistem.•••
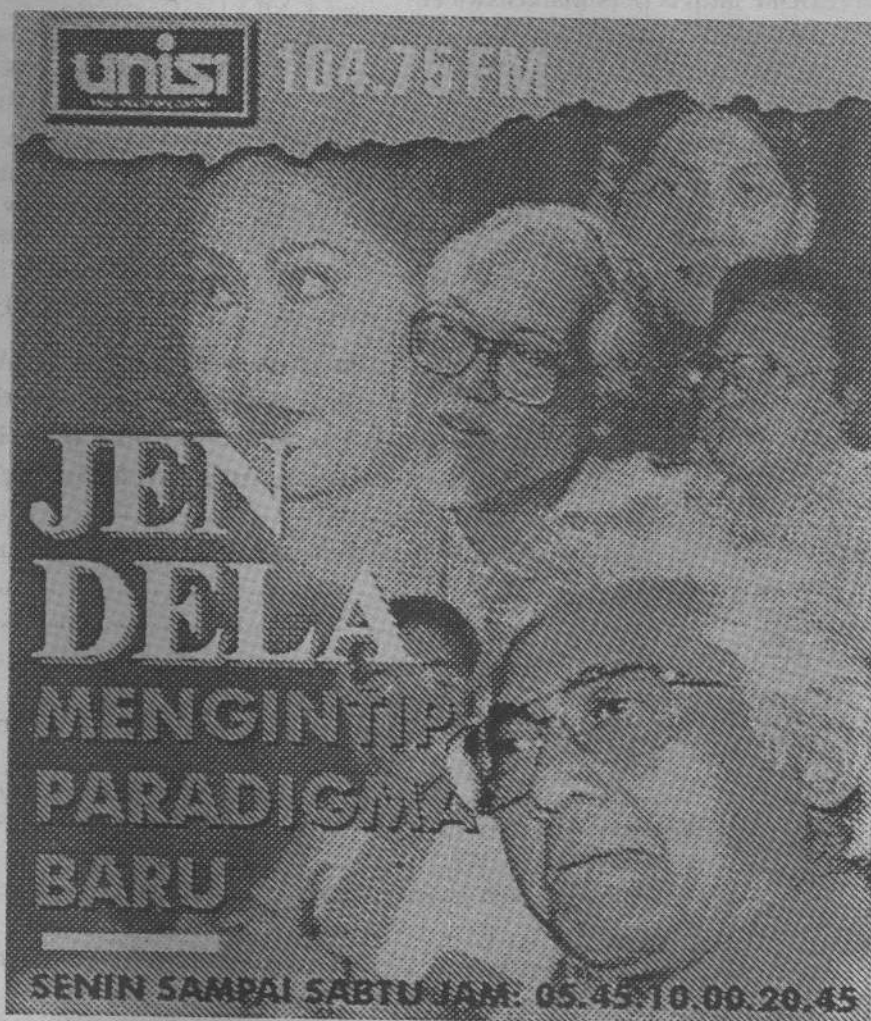
Membangun Bangsa Cerdas dengan *Balairung*

Majalah *Balairung* merupakan majalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terbit setiap tiga bulan yang sepenuhnya dikelola berdasar visi dan idealisme ilmiah. Terbit perdana pada tahun 1986, dan hingga kini telah terbit sampai edisi 26. *Balairung* sendiri telah memperoleh ijin terbit, SK MENPEN RI No. 1039/ DIRJEN PPG /STT/1986. Serta SK Rektor No. UGM/82/7789/UM/01/37. Serta ISSN: 0215-076 X.

Setiap kali terbit oplah tiap edisi berkisar 3.500-5.000 eksemplar. Distribusinya meliputi perpustakaan umum dan setiap Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Indonesia, semua alumni UGM, aktivis pers mahasiswa se-Indonesia, dan seluruh toko buku yang ada di kota-kota besar pulau Jawa.

Sebagai komitmen terhadap masalah bangsa, maka rubrikasi yang ada dalam *Balairung* pun cukup beragam. Dari permasalahan nasional mulai politik, ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga sosial budaya.

Dalam mengemban misi sejarah tersebut, *Balairung* sempat meraih beberapa prestasi antara lain juara I Lomba Penerbitan Kampus yang diselenggarakan Ditjen Dikti tahun 1995, pemenang harapan I Lomba pers alternatif yang digelar oleh ISAI (*Institut Studi Arus dan Informasi*) Jakarta pada tahun 1996, dan juara II pada lomba yang sama di tahun 1997. Kini *Balairung* dipercaya menjadi barometer pers mahasiswa di Indonesia.

Tradisi kritis seperti itu akan selalu diciptakan untuk mencoba menggulirkan alternatif pemikiran bagi dunia ilmiah di Indonesia. Anda adalah orang yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan tradisi ilmiah-kritis tersebut. Anda alumni UGM?

Karenanya kami mengajak Anda untuk bersama-sama menciptakannya dengan membantu dana penerbitan lewat iklan produk dan jasa Anda ataupun donatur abadi dengan mentransfer ke Rekening Tabungan ***Tabanas Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah,)***, atau via wesel ke alamat: **Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171.**

Anda alumnus/alumni UGM?
Ingin menjadi pelanggan abadi Balairung?
Kirimkan Rp. 100.000,00 ke bag sirkulasi.
"Setiap edisi terbaru akan kami kirim ke alamat Anda."

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dalam rangka membantu melancarkan penerbitan rutin majalah *Balairung*, dengan ini saya:

Nama : ....

Jabatan : ....

Alamat : ....

Bersedia menjadi donatur **majalah *Balairung***. Untuk itu saya memberikan bantuan sebesar **Rp.**______________ (..)
melalui via wesel / transfer Tabanas Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta, No. Rek. 029-33-08-3367-4 (atas nama Sholihah,) atau via wesel ke alamat: **Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 901703, Fax. (0274) 566171.**

Untuk tiap kali penerbitan **majalah *Balairung***, saya bersedia memberikan bantuan untuk : (lingkari)

a. 3 kali penerbitan **b. 5 kali penerbitan** **c. .... kali penerbitan**

Atas perhatian dan komitmen, misi serta visi yang telah kita emban selaku almamater **Universitas Gadjah Mada**, maka seluruh awak **majalah *Balairung* UGM** mengucapkan terima kasih.

Prof. Dr. Loekman Soetrisno;

"Masyarakat Indonesia Lupa Akan Demokrasi..."

Di usianya yang telah lebih dari 60 tahun, suaranya tetap keras dan menggelegar. Apalagi jika bicara tentang neraca keadilan yang selalu tidak berpihak kepada nasib rakyat kecil. Ketika ditanya tentang krisis yang melanda saat ini, dengan keras dia mengatakan "..Yang berdosa yang atas, yang menikmati utang luar negeri itu adalah orang besar, ketika krisis yang menderita orang kecil."

Prof. Dr. Loekman Soetrisno di sela-sela kesibukannya sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) dan anggota Dewan Riset Nasional (DRN), berperawakan tinggi besar ini masih menyempatkan diri menjadi pembicara di berbagai forum.

Di kantornya, Bulaksumur G-7 tamu yang datang menemuinya seperti tak pernah berhenti mengalir. Barangkali dua reporter *Balairung*, **Irfan Muktiono** dan **Mashudi** beruntung

bisa menahan pembicaraan selama dua jam. Berikut petikan wawancaranya:

Jika melihat fenomena-fenomena terakhir yang terjadi pada masyarakat kita, masalah apa yang kiranya perlu lebih diperhatikan?

Rasa keadilan itu, atau keadilan sosial itu sendiri. Alangkah sedihnya, kita melihat bagaimana orang yang tidak salah seperti Iwik (tertuduh pembunuh wartawan Bernas, Udin-red.) yang juga orang kecil, direkonstruksi demikian rupa sehingga dia diharuskan menjadi julukan pembunuh. Inilah kenapa polisi tidak pernah berani merekayasa orang yang lain. Kemudian kasus seorang guru yang dibunuh ternyata dinyatakan bunuh diri. Jadi berkait perlakuan di muka hukum dalam artian luas.

Itu sudah memasuki aspek apa saja?

Memasuki semua aspek. Misalnya kasus dana Jamsostek, seorang anggota DPR yang mungkin memiliki delapan kali gaji saya, atau lima kali lah paling sedikit, masih mau menerima uang suap. Lalu bersedia menyidangkan undang-undang tenaga kerja itu, meski itu adalah kewajiban dia. Sama seperti saya harus menguji mahasiswa, itu kewajiban saya. Tetapi menurut saya kalau dapat honor, tentunya honor yang ditetapkan pemerintah. Bukan kalau saya tidak diberi honor dari menguji lalu saya tidak menguji. Lalu dikatakan uang motivasi. Saya kadang-kadang *nggak* ngerti.

IRFAN

Sebagai orang Indonesia kita bicara mengenai demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Tapi untuk seperti ini, uang yang datang dari buruh itu kan berarti yang kecil ini memelihara yang besar. Itu *tidak* benar. Apalagi untuk DPR yang seharusnya membela rakyat kecil, malah makan uang rakyat kecil. Oleh karena itu, menurut saya sudah adil kalau anggota DPR menerima cincin kenangan hanya 13 karat yang seharusnya 24 karat. Jadi masalah pertama yang harus diperhatikan adalah demokrasi kita. Berkait dengan itu, tadi baru saja ada orang bicara pada saya mengenai masalah otonomi (sebelum wawancara ini Prof. Loekman baru saja berdiskusi dengan Dr. A.S. Hikam dari LIPI-red.). Menurut saya otonomi tidak bisa jalan karena hanya dilakukan seperempat kali. Karena otonomi adalah demokrasi, maka otonomi tanpa demokrasi ya *nonsens* dan otonomi tidak ada keadilan sosial *nonsens* juga. Nilai-nilai dasar seperti ini yang ingin saya kembangkan di dalam pikiran mahasiswa.

otonomi adalah demokrasi, maka otonomi tanpa demokrasi ya *nonsens* dan otonomi tidak ada keadilan sosial *nonsens* juga.

Bagaimana Anda melihat fenomena, banyaknya orang yang diharapkan mampu mempercepat laju demokratisasi?

Moga-moga saja. Di Thailand memang bisa mencetuskan demokrasi. Tetapi masyarakat Indonesia sudah lupa terhadap demokrasi, sejak demokrasi terpimpin berakhir sampai sekarang. Kita sudah lupa itu nikmatnya demokrasi, baiknya demokrasi, dan kekurangannya. Kita diajari terus menerus seolah-olah kita itu beragam. Sejak kecil sudah diharuskan ada P4, ada macam-macam, PKK. Tetapi korupsi terus jalan, orang seperti polisi yang merekayasa Iwik itu kan bisa dianggap menyeleweng dari sila keberapa itu, dari Pancasila. *Social justice* ya?

Kalau Anda melihat IMF sendiri datang ke Indonesia sebagai penolong atau ...

Lho dia tidak datang, dia sendiri tidak suka datang. Indonesia macet, minta tolong sama dia, ya dia datang. Kalau IMF (*International Monetary Fund*) tidak ada ya mati sudah. Tidak punya uang, uangnya habis.

Pendapat Anda tentang kedatangan IMF telah mengitervensi terlalu jauh?

Itu juga yang salah siapa sih? *Wong* IMF itu diundang kok. Kalau dia tidak diundang ya tidak datang. Tapi kalau tidak diundang, Indonesia *jebol*. Nah ini juga kelemahan bangsamu, tidak berani menghadapi realita. Digambarkan seolah-olah keadaan ekonomi Indonesia itu bagus, fundamentalnya kuat, dan sebagainya. Ternyata tidak, *ngapusi* sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa Anda percaya seperti itu. Kalau menurut saya, IMF itu diminta datang kok, ya terserah, kalau nasihat saya dipakai ya silahkan. Tidak ya silahkan. Tapi Anda tidak boleh pinjam uang dari saya.

Sebagian pejabat kita yang mungkin membuat kita malu adalah malah mengatakan bahwa kita memang layak dibantu...

Itulah konsep-konsep yang dibolak-balikkan. Konsep baku setiap orang Indonesia adalah hidup sederhana tanpa hutang. Hutang itu paling dijauhi orang Indonesia. Oleh karena itu ada pepatah besar pasak daripada tiang. Macam-macamlah, yang intinya adalah pembangunan itu harus sederhana, sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak perlu ketat tapi selamat, begitu. Tetapi sekarang orang mengatakan hutang *ndak* apa-apa. Utang itu perlu *dimanage* dengan

baik. Tetapi ternyata orang Indonesia itu tidak bisa me*manage* utang itu dengan baik, dipakai investasinya yang macam-macamlah, ada properti, dan akhirnya jatuh juga. Jadi kembali pada IMF, tidak bisa kita menyalahkan IMF. Sebab dia diminta datang. Malah sebetulnya kita malu. Kita punya pakar-pakar ekonomi sekian banyaknya, tapi *ndak* bisa menyelamatkan. Kita punya siapa lah... pakar-pakar itu, dan *ndak* bisa nyelamatkan. Jadi ada faktor X yang kita sendiri tak tahu. Apa sebenarnya yang terjadi, yang menyebabkan kita mengalami krisis moneter seperti ini. Bahkan mengalami krisis moneter tidak perlu mengundang IMF kan. Nah Indonesia tidak mau melihat realita bahwa kita memang membuat kesalahan yang besar dalam membangun Indonesia. Nah orang yang berani berbicara terus terang adalah Mar'ie (menteri keuangan). Sekarang dia bilang, sekarang jalan dari pembangunan kita benar, bagaimana kita mengatakan fundamental ekonomi kita kuat kalau jumlah bank sekian banyak, itu bagus-bagus saja, tapi ternyata bank-bank itu hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan pribadi sendiri dari pemilik bank sendiri. Banyak yang seperti itu.

Apakah kegagalan ekonomi ini disebabkan kesalahan strategi yang diterapkan Orde Baru?

Iya. Kita perlu merevaluasi tadi. Oleh karena itu IMF minta kita meninjau kembali. Apakah sudah benar kita harus mempunyai proyek kapal terbang, kita harus mempunyai mobnas (mobil nasional). Tetapi apakah orang Irian akan menikmati juga, belum tentu khan?

Dari krisis moneter, masalah mobil nasional pemerintah semakin terfokuskan untuk menangani masalah-masalah makro, posisi rakyat kecil sendiri bagaimana?

Ya itu., yang berdosa yang atas, yang menikmati utang luar negeri itu adalah orang besar, ketika krisis terjadi yang menderita orang kecil.

Model pemberdayaan rakyat semakin dilupakan?

Iya. Makin dipersulit.

Apakah metode yang paling efektif diterapkan?

Demokrasi.

Dalam dataran praktis?

Ya harus ada partai politik yang benar-benar kita tidak perlu ada *floating mass* lagi, yang lebih penting juga adalah pemberdayaan DPRD. DPRD itu harus betul-betul berfungsi, oleh karena itu sekarang kita bicara mengenai Trias Politika. Pemberdayaan hanya bisa dilakukan menurut hemat saya melalui Trias Politika, secara politik. Kalau legislatif, yudikatif itu mempunyai kemandirian. Nah sekarang mau apa', lihat saja kasus Iwik kembali. Kita tidak bisa berdaya rakyat kecil karena baik legislatif, yudikatif dalam artian di sini, tidak berdaya. Nah untunglah jaksanya *environment* Yogya, untunglah jaksanya ini betul-betul saya respek. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa mandiri sebagai yudikatif. Mungkin dia dapat tekanan yang macam-macam, saya tidak tahu. Kita lihat, tapi bahwa Trias Politika itu menjamin perlindungan terhadap rakyat kecil, orang kecil itu cukup besar. Sekarang kalau kita rakyat kecil pergi ke DPR, ditangkap itu. Karena DPR tidak lagi bagian dari rakyat, padahal DPR adalah bagian dari rakyat, atau wakil kita dari rakyat. Tapi begitu sudah dipilih jadi wakil, lupa *dong* sama kita. Wong ketemu sama dia saja sulitnya bukan kepalang. Ada yang sedang rapat *kek*, ada yang sedang gini. Inilah yang menyebabkan saya juga...*ehm* apa itu memfokuskan karya-karya saya untuk rakyat kecil. Paling sedikit melalui tulisan-tulisan saya, saya bisa memberikan pencerahan kepada bangsaku.

IRFAN

Masalah dwifungsi ABRI, Bapak sendiri bagaimana melibat dwifungsi ABRI di Indonesia?

Menurut saya, kalau memang benar dikatakan bahwa sejarah ABRI itu berbeda, dwifungsinya juga harus berbeda. Saya kira dwi fungsi tahun 70-an dengan sekarang harus berbeda. ABRI tidak perlu lagi terlalu banyak mencampuri urusan non ABRI. ABRI tidak bisa terus menerus menginginkan jabatan-jabatan. Tidak! Dwi fungsi bukan untuk jabatan-jabatan. Dwi fungsi berupa masukan-masukan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Saya kira kita perlu berpikir seperti itu. Tidak bisa kita lalu begini terus. Ada ide baru, *ndak* usah! Lalu membuat cerminan seolah-olah bahwa *decision* making itu ditentukan oleh ABRI. *Ndak* boleh, *ndak* boleh seperti itu. Kalau saya selalu dengan sederhana mengatakan bahwa dwifungsi itu seperti Kopral Jono, nyanyian kopral Jono, yang selalu menghormati orang tua, membimbing rakyatnya.
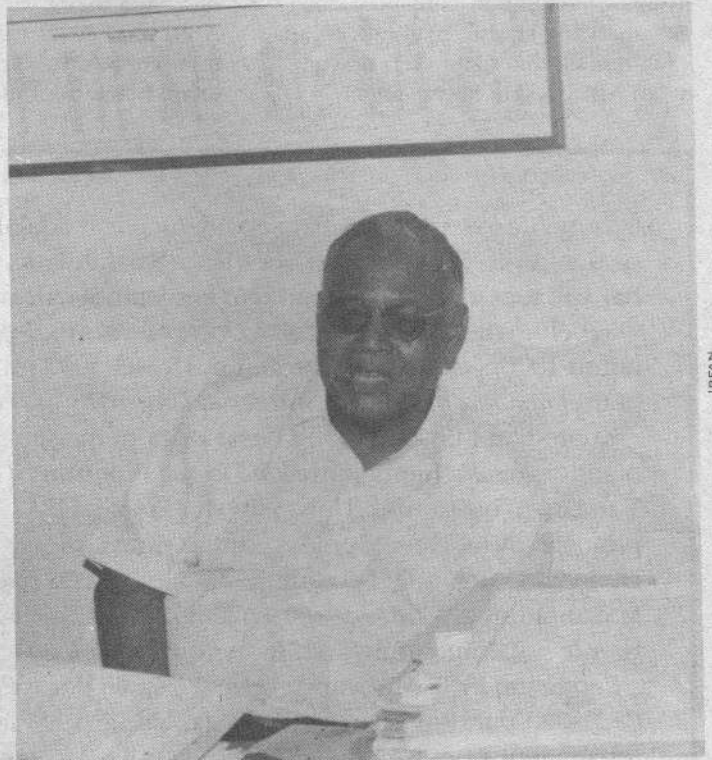
Bagaimana dengan adanya program ABRI manunggal dengan rakyat, ABRI masuk desa?

Apa iya? Nyatanya kalau manunggal ya jangan digebuki dong rakyat itu. *Lha* ini, Indonesia juga hidup di dalam slogan. Kemarin saya di Bengkulu,... *eh* bersih pangkal sehat, ternyata

kotornya bukan kepalang, WC-nya tidak dibersihin. Hanya ngomong saja orang Indonesia. NATO(*Not action talk only*) mulai hal kecil sampai atas. Itu harus berubah, karena jika tetap demikian kita akan kalah bersaing. Orang Singapura tidak ada itu, orang Melayu Malaysia tidak ada itu. Umpamanya tiap kota bersih dan nyaman, *eh* rampok banyak. Tidak, jika apa yang terbaik bagi rakyat, apa yang terbaik dirasakan oleh rakyat, itulah ABRI. Kalau rakyat minta pandai dianggap *minteri*. Jadi dilematis kan rakyat? Akhirnya dia jadi bangsa yang *inersianya* cukup besar.

Masih soal dwi fungsi, kemarin Prof. Juwono Sudarsono(dosen FISIP UI-red) mengatakan bahwa sipil belum siap untuk naik menjadi presiden?

Ya kapan siapnya *wong* tidak diberi kesempatan. Buktinya Amien Rais bisa. Apa dikira yang bisa mimpin ABRI *thok*. *Ndak* tuh. Saya bisa kok mimpin. Pak Soedirman adalah guru, tetapi beliau bisa menghancurkan divisi perang, satu divisi Belanda kocar-kacir di Ambarawa. *Ehm*... ini masalah kesempatan. Apa dikira Pak Emil Salim tidak bisa memimpin Indonesia. Oh bisa, kasihlah kesempatan. Bagaimana mungkin Juwono bisa mengatakan demikian. Nah ini juga, orang yang kadang-kadang kadar intelektualnya kita ini tidak terlalu dalam. Ada *interest-interest* tertentu kan? Lha ini, apakah ABRI bangga bahwa segala sesuatunya ditentukan dia. Lalu ini kan politik elit. *Ndak to*? *Ndak* begitu Dwifungsi.

Apakah bisa diartikan sudah melenceng demikian jauh?

Oh ya. Sarannya Nasution juga tidak jelas, dia tidak mau bicara terus terang bahwa itu melenceng. Melencengnya di mana, harusnya gimana. Tetapi jelas saya melihat ini tidak benar kalau begini terus.

Belakangan ini muncul perwira-perwira muda ABRI yang diyakini mampu memberikan angin perubahan di tubuh ABRI. Menurut Anda bagaimana?

Ndak! Mereka *ndak* akan berubah.

Masalahnya?

Ya memang mereka ndak mau berubah. Itu kan sebuah kesempatan. Paling-paling berubah di dalam *surfaces*-nya apa di dalam permukaannya saja.

Kira-kira apa sih yang ditakutkan, kalau militer masih memegang kepemimpinana nasional?

Lha kowe takut *ndak? Kowe gelem digebuki apa*? (Kamu takut nggak?Apa kamu mau dipukuli?-red.)

Mungkin hanya beberapa oknum saja?

Nggak dong! Berbeda! Seorang sipil yang memimpin itu biasanya lebih manusiawi, tidak lalu melihat semuanya dalam *black and white*. Meskipun sekarang banyak saya lihat karena sistemnya sekarang banyak orang sipil seperti militer. Berbeda. Ada dong perbedaannya. Jauh sangat berbeda. Dalam displinnya yang mati, *right or wrong is my boss*. Nggak bisa dong.

Figur intelektual seperti apakah, figur pemimpin macam apakah yang Anda harapkan?

Oh ya saya mengharapkan figur yang paling tidak seperti Hatta, kalau anda mau lihat seperti Emil Salim-lah. Orang yang betul-betul tulus, mampu memfasilitasi semua untuk berkembang menjadi kekuatan nasional, yang mempunyai visi untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita *ndak* punya. Kita mengatakan mandiri. Mandiri *for what*? Apa yang dimaksud mandiri?.

Jadi kriteria intelektualitas memang sangat dominan bagi bangsa Indone-

> *Long life learning*, belajar sepanjang hayat adalah salah satu prinsip yang terus dijalani Prof. Dr. Loekman Soetrisno. Sejarah latar pendidikannya bisa bercerita banyak tentang kedisiplinan dan keuletannya dalam menuntut ilmu.
>
> Sebelum mendapatkan gelar *Doctorandus in English Literature* UGM pada tahun 1970, putra kelahiran Blora, 15 Mei 1937 ini sempat menyelesaikan program *Diploma in English Studies di University of Leeds*, England tahun 1962.
>
> Kemudian minatnya yang besar pada permasalahan sosial humaniora mendorongnya mengikuti *Non Degree Program in Basic Humanities Courses*, di The East West Centre, University of Hawaii, USA. Setelah itu tahun 1975, Diploma in Rural Development Studies diperolehnya dari *Institute of Social Studies*, Den Haag, Belanda. Setahun kemudian, masih pada institusi yang sama gelar MSS diraihnya. Tahun 1980 menjadi puncak studinya, setelah Cornell University, USA menganugerahinya Ph.D *in Rural Sociology*.
>
> Pengganti Prof. Mubyarto sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) sejak tahun 1994 ini, akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar pada Fakultas Sastra UGM. Saat pengukuhannya, 27 April 1994, dia menyampaikan pidatonya tentang Hubungan Negara dan Rakyat di Indonesia pada Abad ke-21.

demokrasi, ya dikasih.

Banyak program-program yang dilaksanakan ABRI untuk rakyat, Bapak melihatnya sebagai apa?

Ya sebagai slogan, pembela *status quo* saja.

Bukankah dari dulu bangsa kita memang selalu dibesarkan oleh slogan?

Apa? dibesarkan? Diperkecil! Diperkecil kita! Kok dibesarkan? Tidak. Tetap dianggap anak kita. Bayangkan, orang kok dikatakan, sekarang rakyat tuh sudah kritis, sudah pinter. Lho, sejak semula rakyat tuh kritis, sejak semula rakyat tuh pandai. Kan selalu dikatakan begitu? Apakah kritis dan pandai itu sesuatu yang harus dianggap jelek? Kan tidak. Justru itulah tujuan pembangunan, membuat rakyat pandai, membuat rakyat kritis. Tetapi kalau kritis, kalau

sia?

Oh ya. Intelektual kita dibentuk menjadi Asmen (asisten menteri-red) saja mau. Semua orang Indonesia, ya ada beberapa yang tidak, tapi pada umumnya dosen-dosen juga tidak puas menjadi dosen, apalagi yang dapat BHP itu. Semua ingin ke Jakarta untuk menjadi pemimpin. Nah kadar intelektualnya di kalangan mahasiswa juga begitu. Untuk belajar bahasa Inggris saja sulitnya bukan kepalang, suruh membaca bahasa Inggris dari S-1 sampai S-3 saja sulitnya bukan main. Bagaimana dia mau merebut pasar, belum lagi intelektualitasnya. Kadang-kadang saya jera, *nggak* mau diundang mahasiswa. Katanya oh di situ ada seratus ribu atau tigaratus ribu untuk honorarium pembicara, *ndak* pernah dikasih saya. Bukan karena saya harus dibayar, tidak. Tetapi kalau memang ada seperti itu, mestinya dia harus membayar, karena dia memasukkan itu, dan memperoleh *budgetnya*. Lalu untuk yang pembicara seorang seratus ribu kalau pembicaranya lima, lima ratus ribu siapa yang makan? *Nih* kita juga perlu sebelum mempunyai intelektual sekaliber Bung Hatta, atau Soekarno, Mohammad Roem, seperti Kasimo orang Masyumi yang saya kagumi, Singodimejo atau siapa itu. Berani memegang prinsip, kita tidak. Satu contoh, siap itu menjadi ketua DPRD, dari PDI. Bagaimana mungkin dia mau menjatuhkan Megawati, sekarang menjatuhkan Soerjadi hanya ingin mendapatkan jabatan wakil ketua DPR. Nggak ada tuh jaman *Londo*, jamannya Soekarno, nggak ada pergerakan yang semacam itu. Karena itu tadi profesionalismenya tidak ada. Karena di dalam politik juga dibesarkan karena *komporan* pemerintah khan?

Lebih banyak ke masalah penyadaran yang sifatnya lebih kekal?

Oh ya, memang tugas universitas seperti itu. Apa sih universitas itu? Sebuah universitas adalah komunitas dari orang-orang bebas yang ingin mencari kebenaran yang kekal. Meskipun tidak mungkin dicari, tapi karena kekal, kebenaran yang kekal itu pemberian Tuhan. Tapi upaya kita untuk memahami fenomena? Umpamanya apakah mahasiswa itu bisa tertarik pada *El Nino*. Mungkin dengar itu aja belum pernah. Apakah mahasiswa Indonesia tertarik pada perjalanan *space* luar angkasa, ya tidak. Mahasiswa Indonesia hanya terbatas, karena kita terlalu banyak diberikan indoktrinasi. Tidak diberikan kebebasan untuk istilahnya merantau di dunia ilmu. Susah! Menjadi pengajar di universitas saat ini susah. Ya susahnya untuk membuat, merubah sikap bangsa, sikap mahasiswa menjadi sikap yang tradisional terbelakang. Saya katakan ada tradisional yang maju, tapi ini tradisional yang terbelakang.

Bukankah menghasilkan orang-orang seperti itu, lebih banyak kembali pada kesadaran diri sendiri?

Oh *ndak*, sistem juga! Saya masih menikmati pendidikan yang normal.

Sebuah universitas adalah komunitas dari orang-orang bebas yang ingin mencari kebenaran yang kekal.

Saya tidak pernah mulai dari SD, SMP, SMA, sampai universitas mengikuti pendidikan atau subjek yang bersifat indoktrinasi. Tidak ada. Ketika saya belajar di SMA guru saya bukanlah doktorandus. Saya masih ingat benar-benar saya punya guru Etnografi yang namanya Pak Yo. Itu orang Cina. Dia hanya lulusan D1 geografi. Tapi dia bisa menjelaskan sampai sekarang *nyantel*. Kemarin ada mahasiswa dari UNTAN (Universitas Tanjungpura, Pontianak-red) yang mau mengambil penelitian mengenai suku Mentawai, di sana. Saya ditanya, "Lho kok Bapak masih ingat?" Oh iya, SMA itu. Ketika saya masih di SMA saya harus masih belajar membaca sembilan buku novel Inggris dan novel Indonesia untuk diuji lisan. Normal pada waktu itu. Kerja keras itu normal untuk anak-anak. Sekarang mana ada anak SMA? *Nah* bukan salah dia. Sistemnya berubah. Yang masih ingat, apa itu sekolah diajari musik. Jadi perkembangan antara kejiwaan dan otak berimbang.

Termasuk itu juga berbeda dengan sekarang?

Oh ya! Berbeda dengan sekarang. Kita dulu di universitas dalam asrama mahasiswa. Teman saya ada yang CGMI, ada yang HMI, ada yang macam-macam. Kita berdebat tentang teori sehingga si CGMI mempertahankan Marxisme-nya, kita yang non PKI mempertahankan keagamaan. Tapi habis berdiskusi kita makan sate bersama-sama. Bukan masalah. Sekarang coba, berkelahi! Nah berbeda. Oleh karena itu saya mendambakan kehidupan demokrasi kita seperti itu. Kau boleh berbeda pendapat, berbeda pikiran, tetapi tetap merah putih. Anda bisa hijau, bisa kuning, bisa merah, tetapi tetap merah putih. Sekarang tidak. Kalau sudah kuning ya sudah, yang Golkar tidak mau mengakui PDI, yang PDI juga tidak mau mengakui PPP yang hijau. Kalau yang keluar HMI menang jadi ketua Senat, semua HMI. *Ndak* ada jaman dulu kayak gitu.

Apakah bisa disebutkan bahwa sistem pendidikan ini memang salah?

Iya! Kita tidak pernah mempunyai menteri pendidikan yang baik. Sayang Daoed Yoesoef bagus, tapi waktunya terlalu cepat buat dia. Tapi kita tidak pernah mempunyai menteri pendidikan yang benar-benar memahami pendidikan itu. Apa sih itu pendidikan? Yang ada sekarang adalah menteri pengajaran. Padahal pendidikan itu lain. Sedangkan di Taman Siswa sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Padahal dulu diajar menganjurkan kebebasan kejiwaan dari murid itu.

Seni menjadi kurikulum?

Lha iya!

Sistem pendidikan sendiri akan menemukan bentuk yang ideal?

Ya begini, sistem pendidikan yang ideal adalah sistem pendidikan yang membuat anak-anak itu maju dan kreatif.

Banyak yang tidak beres. Saya merasa bahwa rezim Orde Baru itu benar-benar fungsional, itu sejak Pelita

I sampai Pelita III. Sudah itu tidak.

Maksudnya menjelang...?

Artinya masih, masih relatif lebih baik. Bisa ada demokrasi, udah itu *enggak*. Meskipun katanya orang miskin cukup menurun, ya, *income* tapi apa kemiskinan yang lain cukup menonjol. Diantaranya juga pendangkalan atau kemiskinan intelektual.

Kalau begitu, bisakah Orde Baru disebut gagal?

Ya, saya tidak mengatakan demikian. Tetapi jelas ada kekurangan. Banyak!

Misalnya kalau dibilang Orde Baru gagal, apakah kita harus mengganti Orde Baru?

Lha iya to, kalau perlu! Orde Baru diganti khan tidak apa-apa? Yang tidak perlu diganti kan semangatnya to. Sekarang kan semangatnya memudar. Yang baru mana sih sekarang? Wong kadang-kadang keadaan poltik hampir sama dengan keadaan Orde Lama. Bung Karno juga banyak sering *nangkepin* orang dan sebagainya. Sama saja. Dulu optimis saya, sampai kita akan mengalami satu negara baru yang lebih demokratis, lebih tidak *parokial*. Sekarang kembali lagi *khan?* Masalah parokial, masalah Islam, Kristen, masih sama, malah tambah rumit sekarang. Apakah itu gagal atau tidak terserah Anda. Bayangkan kalau kita hanya mencapai pertumbuhan 3%.

Pelita I, II, III kita kan bertumpu pada pertanian. Mungkin Pelita V dan VI?

Lha sampai sekarangpun masih bertumpu pada pertanian.

Tapi implementasinya sejauh mana?

Yang menjadi masalah bahwa pertanian makin lama makin terpuruk, karena memang tidak diperhatikan.

Dan pencanangan pemerintah kelibatannya semakin mengarah ke industri-industri yang...

Industri yang mana sih Indonesia?

Mungkin seperti yang dimaui Habibie, proyek IPTN?

Apa itu industrialisasi ?

Atau proyek mobil nasional?

Tidak, bukan industri itu! Itu bisnis. Industrialisasi adalah juga berarti perubahan di dalam nilai-nilai politik, nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai kebudayaan. Kalau yang tadi itu membangun pabrik industri. Bukan industrialisasi membangun pabrik, pabrik ini, pabrik itu. Kan kita punya pabrik tapi masyarakatnya tatap agraris. Yang ironis justru adalah seperti sekarang ini, seperti CN-235 ditukar dengan ketan. Ini, kalau saya melihat pameran-pameran apa itu, traktornya dipamerkan bukan *made in* fakultas teknik, tapi buatan Nagoya. Bukan kita belum mengalami suatu industrialisasi, kita baru tahap membangun pabrik. Kalu kita memang sudah industrial, maka Engkau sudah harus menguasai bahasa Inggris, menguasai teknologi. Sudah berpikir sangat rasional. Tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain, tidak membedakan.suku yang satu dengan suku yang lain, nah itu baru proporsional. Sudah ada demokrasi.

Kalau kita menginginkan industrialisasi, katakan yang paling cepat diwujudkan itu agraris?

Tidak ada proses industrialisasi paling cepat. Tidak! Segala hal merupakan satu proses yang panjang. Nah ada cara cepat seperti yang dilakukan Rusia. Tapi dia tidak lama, 70 tahun habis. Karena dia tidak memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk berdemokrasi dan sebagainya. *Prime industrial* memang bisa mempercepat *growth*. Tapi *growth* yang bagaimana, industrialisasi yang bagaimana? kalau indutrialisasi itu tidak menyebabkan timbulnya masyarakat yang egaliter, ya *remuk* seperti demikian terjadi di Rusia. Nggak seperti Indonesia sekarang terpuruk juga gitu.

Bukankah yang diterapkan hi-tech *industrialisasi?*

Mekanisasi industrialisasi itu tidak membuat pabrik *tok*. Itu satu proses perubahan sosial. Sekarang kita baca bingung, ada yang bilang kapitalisme itu Barat, itu jelek. Liberalisme itu jelek. Jadi mereka tidak tahu liberalisme itu apa. Nah kalau saya lebih senang liberalisme *ketimbang* kapitalisme seperti Indonesia ini. Rakyat kecil *megap-megap*. Mau bicara *nggak* boleh. Mau apa itu. Baru *seneng-senengnya* dengan bank *eh*, BHS(Bank Harapan Sentosa, salah satu bank swasta yang dilikuidasi saat krisis moneter 1997-red)-nya hilang. Polisi ditanya kok nggak ditangkap itu? Ah itu bukan urusan saya. Saya lebih senang demokrasi liberal yang polisi bekerja atas kemauan rakyat. Liberalisme itu mengembangkan kemerdekaan individual, yang perlu tidak dikembangkan adalah individualisme. Tetapi perkembangan ini perlu. Industrialisasi itu tidak, saya tidak bangga itu punya IPTN, enggak. Itu bukan mengakar ke rakyat. *Nah* akhirnya karyawannya juga demonstrasi *to.*? Saya kan lebih bangga kalau kita punya industri yang masyarakat bisa rasional berpikir. Itu perlu dan akan berkembang sendiri.***

Irfan Muktiono, Mashudi

Didikan keras dan disiplin sang ayah sejak kecil berperan besar pada karakternya sekarang. Sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara dia tak sempat dimanjakan layaknya anak bungsu umumnya. Pernah suatu ketika dia hanya diberi makan nasi putih dan air putih selama tiga hari, gara-gara menghilangkan buku ilmu tumbuh-tumbuhan milik ayahnya.

Dengan dukungan penuh dari istri, Ny. Tuti Indarsih kedisiplinan itu diterapkannya pada keluarganya sekarang. Maka tak heran dua putrinya, Nini Loekman,S.H. dan dr. Kadirah Lupitasari bisa melewati masa studinya dengan lancar.

Sang istri diakuinya berperan besar dalam kesuksesan kariernya sebagai akademisi hingga sekarang. Cornell University AS, tempatnya menyelesaikan disertasi, memberi gelar istrinya Ph.T atau *Put Husband, Through*. Semacam tradisi pemberian gelar tidak resmi kepada istri dari mahasiswa pasca sarjana universitas tersebut atas kesetiaan dan pengorbanannya dalam membantu sang suami dalam pencapaian studi.

KOLOM

KETIKA MAHASISWA TINGGAL MENJADI MITOS

Titok Hariyanto
Ketua Presidium Dewan
Mahasiswa UGM

Ada seorang kawan yang akhir-akhir ini sangat antusias mengajak saya berdiskusi, membicarakan berbagai macam isu yang berserakan di media massa. Mulai dari kesediaan Amien Rais dicalonkan menjadi presiden, keinginan Soeharto *lengser dari keprabon* (eh, ternyata nggak jadi), soal krisis moneter yang tak kunjung usai, sampai pada kerakusan para pemilik modal yang dengan tanpa dosa telah memanfaatkan keganasan api untuk memberangus sebagian besar hutan di belahan Indonesia Bagian Timur.

Tidak biasanya dia begitu antusias membicarakan persoalan-persoalan "besar" semacam itu. selama ini saya mengenal dia hanya sebagai mahasiswa "biasa-biasa" saja. Aktivitasnya hanya kuliah, belajar, dan nonton televisi. Itulah pekerjaan rutin yang selalu dia lakukan selama tiga tahun menjadi mahasiswa.

YOGYA 10 DESEMBER 97. ANDY SENO AJI

Dan ketika saya bertanya kenapa dia menjadi begitu antusias dengan semua itu, dia menjawab: "Gimana *sih*, sebentar lagi kan Sidang Umum MPR."

Rupanya, persoalan-persoalan yang sedemikian *akut* yang terjadi di negeri ini telah membuat risau kawan tadi. Tetapi kenapa dia begitu risau hanya ketika mendekati Sidang Umum MPR? Padahal kalau dirunut satu persatu, persoalan-persolan "besar" tidak hanya terjadi ketika mendekati Sidang Umum. Penindasan, pemberangusan, penggusuran sudah terjadi dan berlangsung terus sejak pemerintah Orde Baru menancapkan pembangunan sebagai prioritas utamanya.

Ternyata diam-diam, kawan tersebut telah dibuat takut oleh analisa-analisa politik yang berkembang di media massa. Menurutnya, Sidang Umum mendatang adalah Sidang Umum yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan bernegara dalam tatanan masyarakat global. Karenanya, Sidang Umum esok oleh pemerintah akan digunakan sebagai momentum transisi menuju demokratisasi.

Namun kawaan tadi tidak percaya bahwa militer mempunyai kemauan untuk menyerahkan kekuasaan politiknya kepada sipil. Sehingga kalau transisi demokrasi terjadi dan pemimpin nasional dipegang oleh sipil, justru akan sangat mungkin terjadi kudeta militer. Karena dwi fungsi yang selama ini sudah berjalan dan benar-benar membawa keuntungan bagi militer, mau tidak mau harus dihapuskan sebagai satu-satunya jalan menjauhkan militer dari urusan-urusan politik yang *notabene* adalah urusan sipil. Dengan demikian, militer yang selama ini memegang kekuasaan politik secara otomotis akan kehilangan kekuasaanya.

Hal yang membuat kawan tadi lebih takut adalah apabila muncul pemerintahan *junta militer* sesudah Sidang Umum 1998. Ia bisa membayangkan betapa tidak bebasnya berpendapat, betapa sengsaranya masyarakat ketika suara yang berakar dari pikiran kritis akan dihadapi dengan moncong senapan. "Oh... betapa ngerinya bila hal itu terjadi," katanya dengan perasaan miris.

Untuk menenangkan semua ketakutannya, saya mengajak dia untuk sedikit optimis dengan melihat kondisi obyektif yang ada pada masyarakat. Saya mencoba meyakinkannya, bahwa saat ini sudah muncul perlawanan-

perlawanan yang dilakukan oleh rakyat untuk menolak setiap aturan yang mengekang dan merugikan masyarakat. Dan itu menunjukkan sesungguhnya secara kuantitas maupun kualitas, rakyat sudah mulai sadar bahwa penderitaan yang selama ini terjadi adalah akibat dari terlalu besarnya intervensi kekuasaan terhadap kehidupan mereka. Sehingga, hal yang mesti dilakukan adalah bagaimana menyusun strategi gerakan massa untuk melakukan sebuah perlawanan.

"Maka mulai sekarang mahasiswa harus beraliansi dengan sopir angkot, buruh pabrik, bahkan ibu-ibu rumah tangga, serta masyarakat tertindas lainnya untuk melakukan perubahan. Dan janganlah terlalu percaya dengan mahasiswa, sebab mahasiswa sekarang hanya mitos belaka," saranku padanya.

Namun ditengah gejolak perlawanan yang sudah demikian massif dan radikal, sebagian besar mahasiswa justru asyik bergelut dengan dirinya sendiri. Mahasiswa masih berkutat dengan prestasi-prestasi yang diukur dengan menggunakan angka-angka. Ironisnya, sebagian besar mahasiswa masih percaya bahwa mereka adalah agen perubahan. Meski dalam hal ini ada kontradiksi ketika mereka ditanya bagaimana perubahan tersebut dilakukan. Karena menurut mereka, perubahan hanya dapat mereka lakukan ketika terjadi *mobilisasi vertikal* atas dirinya. Bukan ketika mereka menjadi mahasiswa.

Jargon yang mengatakan hanya mahasiswalah yang bisa melakukan perubahan, biarlah tetap menjadi mitos yang menggantung di atas langit. Sejarah telah mencatat bahwa mahasiswa tak akan bisa melakukan perubahan apabila tidak beraliansi dengan sektor masyarakat yang lain. Dan saat ini rakyat sudah mulai melakukan perlawanan dari hal yang paling kecil sampai pada wilayah yang selama ini dianggap rawan.

Sekarang tinggal kesiapan kita. Kesiapan mahasiswa untuk memimpin perlawanan itu sehingga perlawanan tidak menjadi anarkhis dan merusak tatanan yang lain.

Nah, ketika semua sektor rakyat dapat beraliansi dan melakukan desakan kepada penguasa, kemungkinan terjadinya pemerintah *junta militer* dapat diminimalkan. Karena hanya dengan kekuatan massa lah rakyat bisa melakukan bergaining dengan penguasa, selain melakukan *counter hegemoni* melalui media-media yang ada.

> "Maka mulai sekarang mahasiswa harus beraliansi dengan sopir angkot, buruh pabrik, bahkan ibu-ibu rumah tangga, serta masyarakat tertindas lainnya untuk melakukan perubahan.

Dus, persoalan sebenarnya tidak berada pada kesadaran dan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap pembusukan sosial politik yang terjadi. Tetapi lebih pada kemauan untuk berbuat sesuatu demi kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, modal pertama dan paling utama adalah keberanian serta militansi yang berawal dari kesadaran permanen untuk mewujudkan kondisi sosial politik yang ideal.

Selain itu, bukankah prasyarat lain seperti perpecahan di elit kekuasaan, krisis ekonomi, monopoli, korupsi, dan kolusi sudah cukup sebagai modal untuk membangkitkan keberanian dalam mewujudkan impian tersebut?

Kawanku terdiam..***

Indonesia Raja

Nuswantoro
Mahasiswa tingkat akhir
Fak. Filsafat UGM,
wartawan lepas Majalah SINAR

...
S'lamatlah Ra'jatnja
S'lamatlah Putranja
Pulaunja, Lautnja, semwanja
Madjulah Negrinja, madjulah Pandunja
Untuk Indonesia Raja...

(WR Supratman)

Di bawah naungan cemara, di pinggir jalan kembar, di sebuah universitas yang telah ratusan kali mahasiswanya menggelar demonstrasi, ratusan kali pula mahasiswanya dipukul dan ditangkapi, seorang mahasiswa memandang nanar kearah sekumpulan orang berseragam. Dua buah truk berwarna kelam parkir di kejauhan. Sementara ribuan mahasiswa tampak berteriak-teriak. Ada yang orasi sambil menggenggam *mike mega-phone*, sebagian membawa poster dan menyanyi. Ada juga salah seorang yang membentangkan bendera merah putih berlari kesana kemari seperti bocah yang mengejar capung. Senyumnya mengembang.

AFIANTI DIAN IRFANTI

Setiap kali mahasiswa itu menyaksikan kejadian serupa di depan matanya, setiap kali pula ia merasa hatinya diuji. Seperti seorang kekasih yang ditagih cinta. Perasaan menggelora selalu muncul; perasaan seorang patriot. Perasaan yang sama ia rasakan juga dulu ketika ia turut menyanyikan lagu kebangsaan di upacara bendera di sekolah dasar. *Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku*...Ia lalu mengerti, mengapa kakeknya memilih mati *syahid* di medan perang. Negara menghormatinya dengan menanam tulang belulangnya di makam pahlawan.

Ia juga teringat guru SD-nya yang bersemangat mengajak seluruh kelas menyanyi lagu-lagu nasional untuk mengisi waktu kosong sebelum pulang sekolah. Meski perut mulai keroncongan lagu-lagu itu dihabiskan dengan penuh semangat. *Tanah airku Indonesia, negeri elok amat kucinta*..Apa yang ia tahu sekarang adalah ia tak terlalu yakin apakah ia masih pemilik sah tanah air ini. Karena menurut sebuah olok-olok, tanah negeri ini diangkut untuk orang-orang kulit putih, sementara airnya dikapalkan ke negeri tetangga.

Andai guru SD-nya itu tahu jiwa dan isi kepalanya kali ini. Mungkin bangga karena ia bertambah cerdas atau malah bersedih dan menyesal sebab ia mulai berani mengambil sikap. Ia kerap bertanya mengapa kenyataan sering menampilkan hal lain; tidak seperti yang bisa dibaca di buku pelajaran moral dan sejarah. Meski ia selalu belajar untuk tetap berpikiran positif, toh itu mengandaikan pula ia harus mengerti apa itu bersikap apatis, pesimis, skeptis.

Seperti pesan tulisan *Seandainya Aku Seorang Belanda* karya Ki Hadjar Dewantara, 'Perasaan terlibat adalah sah,' protesnya entah kepada siapa. *Lagian*, guru-gurunya pula yang mengajarkan kepadanya untuk berempati kepada sesama, membela kebenaran, dan keadilan.

Batman, pahlawan dari *Gotham City*, adalah cerita komik yang amat digemarinya. Bukankah ia mengajarkan hal yang sama? *Hero* itu mengajarkan kepadanya bagaimana menumpas biang kejahatan. Tak perlu tepuk tangan apalagi pujian. Karenanya begitu penjahat berhasil ditekuk, secepatnya Batman menghilang. Tapi lagi-lagi kenyataan bercerita berbeda. Banyak orang justru gila penghargaan. Atau benarkah penghargaan sengaja dibuat untuk badut yang suka mendengar tepuk tangan?

Dalam sebuah catatan kuliahnya, pada Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia, 15 Februari 1975, presiden Soeharto menyebut masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialistis religius. Diterangkan bahwa masyarakat semacam itu pertama, tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme, karenanya harus bersama-sama dihapuskan. Kedua, menghayati hidupnya dengan berkewajiban takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, kasih sayang sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat.

Betapa indahnya...Kalimatnya begitu bening. Sejak itu ia mengagumi Soeharto. Menurutnya itu kata-kata keramat. Siapapun yang tidak sejalan atau berani melanggar bisa *kuwalat*, secara sosial maupun transendental. Tidak sekedar subversif. Tak peduli rakyat kecil apalagi para pejabat.

Di jalan kembar itu para mahasiswa masih berteriak-teriak, massa pun makin banyak. Orang-orang berseragam itu mulai sibuk merapatkan barisan. Setiap mereka membuat gerakan, gejolak hatinya makin membara. Tiba-tiba seseorang yang berada di kerumunan menyanyikan lagu Indonesa Raya. Syairnya yang klasik mewakili semangat patriot romantik. Ia menatap kearah sumber suara dengan perasaan penuh.

Tidak cuma sekali ia melihat demonstrasi, tapi kini mungkin pertama kali ia masuk dalam kerumunan massa. Ia masih menimbang, meski keputusan telah ada di depan mata. Ada diantara harapan-harapan yang diucapkan, sumpah serapah yang diteriakkan. Ada diantara syair lagu yang dinyanyikan dan goresan cat di poster yang masih basah. Ia hanya memerlukan sedikit lagi keyakinan.

'Sudah terlalu lama,' keluhnya. Ia kini siap menagih janji tersembunyi, dari pidato indah yang pernah diucapkan.***

Wayang Kontemporer:

Antara Tarikan Pak

Wayang kontemporer berkembang dengan pembaruan-pembaruan. Dalang dihadapkan pada posisi dilematis. Antara mempertahankan pakem dan mengikuti selera pasar. Inovasi yang mereka lakukan pun tak lepas dari kritikan.

Semua produk kebudayaan tidak abadi sifatnya karena merupakan hasil pikiran manusia. Ia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pola pikir manusia. Jadi, perubahan itu bergantung pada manusianya atau kultur yang mengkonstruksi daya pikirnya.

Demikian halnya dengan wayang, salah satu produk kebudayaan manusia (Indonesia). Wayang yang mempunyai peran sebagai media transendensi hubungan manusia dengan alam di satu kutub dan sebagai produk budaya yang terbentuk dari kultur alamiah manusia di kutub lain, terus mengalami perkembangan. Dan tidak hanya sampai di sini, ia akan terus berubah dari masa ke masa.

Seperti diungkapkan Garin Nugroho kepada *Balairung* bahwa mengikuti perkembangan zamannya wayang harus pula mampu menjawab tantangan masanya.

"Sudah seharusnya memang wayang punya peran baru, selalu ada dialog baru. Wayang harus terus memperbarui dirinya, mencangkok cara-cara baru. Seperti Sunan Kalijaga yang mencangkok cara-cara Hindu dan Islam," ungkapnya lebih lanjut.

Menurut Bambang Murtiyoso, dilihat dari historisitasnya sejak masuk ke Indonesia wayang telah mengalami perubahan-perubahan dari bentuk aslinya. "Misalnya, dari bentuk yang semula realis dan sederhana berubah sampai seperti yang ada sekarang dengan pakem-pakem baru," jelasnya.

Ungkapan dosen STSI Surakarta itu tidak jauh berbeda dengan perspektif Ki Manteb Sudharsono. Bahkan, Ki Manteb mempunyai penilaian yang lebih tajam lagi. Menurutnya, yang terjadi pada wayang sekarang ini bukan lagi sebuah perkembangan melainkan sebuah perubahan total. Ini antara lain terjadi dalam struktur urutan adegan, yang dulu ditampilkan di pentas sekarang muncul di kelir.

Mengapa hal itu bisa terjadi?

Menurut Ki Manteb karena jaman memang menuntut adanya perubahan semacam itu. "Tuntutan jaman sekarang ini kan serba cepat, padat, singkat tapi berisi. Di situ perubahan tadi terjadi. Maka tidak perlu diherankan kalau orang sudah bisa menebak walaupun wayang belum ngomong," jelas Ki Manteb.

Lain lagi dengan Damardjati, menurutnya esensi wayang tidak akan pernah berubah. "Yang bergeser hanya kadar tontonannya, namun tuntunannya sebagai bayang-bayang kehidupan yang merupakan pencerahan bagi manusia tidak akan pernah berubah," ulasnya.

Jebakan Ekonomi

Ditilik dari motivasi para dalang, muncul perbedaan menonjol di antara mereka. Beberapa dalang, terutama dalang muda, bersikeras menjaga agar wayang terus eksis di masyarakat. Mereka kemudian melakukan sebuah manuver yang dianggap oleh kalangan dalang sebagai sebuah tindakan yang terlalu berani. Jika tidak, justru akan menjadi bumerang.

Dalang kemudian terjebak dalam *marketable* -tidaknya sebuah pementasan. Walaupun tidak bisa dipungkiri ini mempengaruhi kelangsungan wayang itu sendiri. Tetapi bukan berarti kemudian mengesampingkan kualitas pementasan. Lalu wayang tidak ubahnya sebagai produk ekonomi.

Sementara pementasan wayang dengan tiga dalang menurut A. Seno Sastroamidjojo, seorang pengamat wayang, semua itu bukan hanya tidak menambah mutunya, "Manfaatnya orang lebih banyak dapat uang,

em dan Selera Pasar

menarik penonton, tapi tidak membimbing penonton berintrospeksi," paparnya.

Dari wayang, *Frame of reference* kehidupan yang menyangkut etika lambat laun terkesan dirampingkan. Perubahan yang terjadi pada wayang sebagai produk budaya tidak hanya tersemesta pada bentuk dan struktur cerita saja tetapi menyangkut perubahan fungsinya sebagai transformasi nilai.

Mengapa fungsi dan peran wayang bisa berubah? "Perubahan tersebut disebabkan pengaruh sistem nilai di masyarakat kita sendiri yang juga terus mengalami perubahan sebagai akibat pembangunan materiil. Di mana masyarakat memiliki kecenderungan terhadap masalah moral dan agama, sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting," ungkap Bambang Murtiyoso.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat yang semakin modern turut mempengaruhi bentuk kesenian yang kian terdistorsi

REPRO KOMPAS

Perubahan Fungsi Ganda

Awalnya, selain sebagai produk budaya, wayang merupakan alat media dakwah, wahana penyampaian ajaran agama dan tuntunan hidup.

"Transfer nilai oleh para Wali, dan fungsi ini kemudian berkembang menjadi sebuah kebudayaan dan juga hiburan," tambah Ki Cermo Gupito, Mpu Dalang dari Karaton Yogyakarta.

Tetapi Ki Cermo juga menyayangkan perubahan fungsi wayang belakangan ini. "Sekarang banyak dalang yang kurang memperhatikan segi pendidikan dan penerangan. Pertunjukan wayang hanya sebatas hiburan saja dan untuk mencari uang," kritik Ki Cermo.

Menanggapi perubahan yang terjadi Ki Manteb Soedarsono sepakat dengan Ki Cermo Gupito. "Memang sudah terjadi perubahan total. Semuanya berubah dan nantinya penonton wayang juga akan berubah. Dan jika memang perubahan itu yang dikehendaki, perubahan itu harus jelas dan dalang harus mempunyai bekal yang cukup," kata Ki Manteb tanpa merinci bekal apa yang dimaksudkan.

Berkaitan dengan perubahan fungsi wayang tadi, Garin Nugroho tidak menganggapnya sebagai hal yang merisaukan."Sebagai sarana transfer nilai, wayang hanya salah satu sisi media penyampaian pesan. Padahal, sekarang ini masyarakat sudah menuju masyarakat multi media."

Sejarah Pembaruan

Gejala perkembangan wayang mulai muncul saat almarhum Ki Narto Sabdo pada tahun 70-an mulai melakukan

pembaruan di dalam pementasannya dengan memasukkan unsur-unsur lain di luar pakem yang lazim.

Ia, memperbarui penggarapan gending pengiring pentas serta menyelipkan musik-musik di luar unsur gamelan. Selain itu dipadukannya beberapa gaya pakeliran (pewayangan) menjadi satu komposisi. Muncullah apa yang kemudian disebut wayang model Banjaran.

Perubahan itu, tidak hanya mendapat dukungan dalang-dalang muda, lebih dari itu, masyarakat meresponnya secara positif. Perubahan ala Ki Narto dinilai sebagai upaya menembus kebekuan kreativitas akibat interpretasi yang keliru terhadap pakem oleh dalang senior.

Dan gayung pun bersambut. Pada tahun 1982 Humardani, dosen ASKI Surakarta, muncul dengan konsep pakeliran padatnya. Perkembangannya kemudian, sempat muncul pakeliran layar lebar dengan memadukan teknik film dan teater meski akhirnya tidak bertahan lama.

Perguliran konsep perkembangan wayang tidak berhenti sampai disini, Ki Manteb Soedarsono muncul dengan terobosan barunya melalui gaya pola sabetan (cara memainkan wayang) yang dimainkan secara dinamis dan akrobatis termasuk di dalamnya memasukkan unsur-unsur instrumen musik modern dalam *sound* ajian (pakem pakeliran) dan jalan cerita (pakem lakon). Perubahan ini kemudian melekatkan julukan Dalang Setan padanya.

"Pembaruan itu dimaksudkan sebagai suatu panduan untuk menjaga kualitas seni pertunjukan dan kelestarian wayang itu sendiri," dalih Ki Manteb.

"Ini karena wayang tidak terlepas dari pakem dasarnya sekalipun perubahan-perubahan terus dilakukan. Pakem itulah yang mendasari keindahan rasa dan menjadi gaya tersendiri," jelas Ki Manteb sambil mengatakan bahwa awalnya pakem itu muncul di lingkungan kraton hingga kemudian dikenal ada pakem gaya Kraton Yogyakarta dan pakem gaya Kraton Solo yang dijadikan parameter oleh para dalang sekarang ini.

Carut-marut kemunculan dalang-dalang mudalah yang menimbulkan reaksi pro dan kontra. Dulunya untuk menjadi seorang dalang yang mumpuni (baik), seseorang dituntut untuk memahami kesusasteraan dan mampu menghidupkan jalan cerita.

"Syarat-syarat tersebut dirasakan sudah cukup sehingga tidak perlu memasukkan unsur-unsur lain di luar pakem, apalagi jika itu terkesan dipaksakan. Dalang yang mau belajar dan paham tentang kesusasteraan dengan sendirinya mengerti tentang aturan-aturan yang ada dan akan menjalankan fungsinya sebaik mungkin," jelas Ki Cermo.

Ki Manteb Sudarsono
Sudah terjadi perubahan total

Sedang menurut Ki Manteb untuk menjadi seorang dalang yang baik ia harus tanggap terhadap situasi dan rajin membaca untuk menambah wawasan. Tetapi banyak dalang yang sudah laris dan akhirnya malas belajar karena merasa sudah cukup mampu. Ini mengakibatkan dalang-dalang itu menjadi tidak berkembang meskipun mereka memiliki potensi yang bagus.

"Padahal dalang itu seharusnya konsisten untuk memberikan tuntunan dan juga tontonan masyarakat. Mereka hanya mengacu pada selera pasar yang kadang sudah tidak apresiatif, etis, dan estetis lagi," tambah Bambang Murtiyoso.

Lebih jauh, menurut dosen yang selalu mengikuti perkembangan wayang ini, seyogyanya dalam pertunjukan wayang keseimbangan antara unsur *devosional* dan estetikanya dengan unsur *entertaint*-nya harus dijaga agar tidak membosankan. Tetapi pertunjukan wayang sekarang cenderung mengarah ke bentuk hiburan biasa. Nilai-nilai adiluhung yang terkandung di dalamnya seolah-olah hanya bayang-bayang. Oleh pecinta wayang sejati ini dianggap sebagai suatu pelecehan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi karena merusak nilai keasliannya.

Tampaknya pertunjukan wayang telah menjadi suatu bisnis pertunjukan dengan unsur hiburan yang lebih menonjol dibanding misi yang disampaikan.

Namun dengan kreativitas yang dimiliki mereka berhasil memodifikasi wayang menjadi suatu bentuk pertunjukan menarik dan digemari. "Wayang yang selama beberapa kurun waktu belakangan ini tenggelam gaungnya kini muncul kembali dan anggapan bahwa wayang adalah pertunjukan eksklusif dan penontonnya hanya terbatas pada orang-orang tua, kini sudah lebur karena wayang sudah mulai digemari oleh kalangan muda," ujar Murtiyoso.

Kontroversi Perubahan

Joko "Edan" Hadiwijoyo, dalang wayang kontemporer berpendapat, suatu seni, apapun wujudnya tidak bisa dibingkai oleh pakem. Sebab, seni tumbuh dari pemikiran individualis dan hasilnya adalah suatu karya sebagai kreativitas.

Seorang dalang, menurut Joko, yang mengundang kontroversi banyak pihak itu, harus bergerak maju dan kreatif, bagaimana penilaian akhir, penontonlah yang menilai. Satu hal terpenting yang harus diubah, menurutnya, adalah anggapan feodal bahwa seorang dalang adalah pujangga yang harus dihormati secara berlebihan (IJTIHAD, ed.4/Agustus 97).

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dekonstruksi bentuk, jelas terlihat antara lain muncul wayang dua kelir (layar) dengan dua dalang atau lebih, ditambah dengan penyanyi (bukan sinden) dan pelawak. Serta keberanian memadu unsur-unsur seni dalam wayang dengan unsur lain di luar konteks. Dari sini, kritikan pun kerap kali datang. Karena verbalistik dalam dialog-dialognya amat berbeda dengan wayang yang penuh pemaknaan simbolik. Ini dianggap sebagai sebuah ketidaksopanan.

Namun bagi Joko, bahasa verbal sesungguhnya lebih komunikatif dibanding bahasa simbolik yang ternyata sama sekali tidak ekspresif dalam pengungkapan cerita.

"Mungkin ini bisa dijadikan alasan mengapa wayang kontemporer lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan wayang klasik yang menggunakan bahasa Kawi (Jawa Kuno) karena interpretasinya lebih sulit," kata dalang muda itu.

Hal lain yang menjadi alasan mengapa wayang perlu pembaruan adalah simbol-simbol yang ada dalam wayang mengandung falsafah hidup yang butuh perenungan dan pemikiran mendalam.

"Dan ternyata, hanya segelintir orang yang memahami nilai-nilai dan filosofi wayang secara utuh. Karena penonton tidak lagi berpikir rumit sebagaimana dituntut wayang klasik. Artinya, memang sulit mengajak mereka menyaksikan wayang dengan perenungan mendalam," jelas Ki Manteb.

Kendala pemaknaan ini memicu semangat para dalang untuk berkreasi, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan keinginan penonton (baca: selera pasar).

Tidak Tahan Lama

Keterkaitan dalang dan wayang diibaratkan sebagai sutradara dan aktornya. Dalang, mengendalikan sepenuhnya pergelaran wayang. Bagaimana bentuk dan wujud sebuah wayang sepenuhnya tergantung pada sang dalang.

Meskipun ada tuntutan untuk memenuhi selera pasar tetapi banyak yang menilai bahwa seorang dalang seharusnya tetap memegang kontrol dan mampu mengarahkan penonton. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan pemegang otoritas ekonomi dan kekuasaan.

Debut wayang kontemporer dinilai oleh beberapa kalangan hanya sebuah *trend* yang tidak akan bertahan lama. Kehadirannya tidak akan menggusur eksistensi wayang tradisional (purwa) yang dianggap sebagai dasar pewayangan yang sempurna. Bukan hanya kalangan pedalangan yang mengakui ini tetapi juga para peneliti Barat.

Bukan tidak mungkin masyarakat kemudian kembali mencari bentuk asli wayang yang masih membawa nilai-nilai. "Pada akhirnya hanya karya seni yang memiliki nilai etika dan estetika lebih saja yang akan bertahan atau diterima masyarakat," tandas Bambang Murtiyoso.

Bingkai Pembaruan

Wayang yang bersumber dari tradisi lisan, sedikit banyak memiliki kemungkinan mengalami penyimpangan. Sebagai contoh adalah *Lakon Carangan* yang hanya sebatas menekankan pada penyusunan dan modifikasi lakon-lakon baru.

Lakon carangan bersumber dari lakon baku yang muncul karena adanya *sanggit*, yaitu kebebasan setiap dalang untuk menambah jumlah wayang dan menginterpretasi lakon atau cerita sesuai dengan kreativitas dalang.

Pembawanya terikat tradisi yang ada, terkadang tradisi itu ketat dan terlampau konservatif tetapi di lain pihak pembawa juga memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri.

Dengan demikian pakem memiliki sisi positif bila dipandang sebagai acuan para dalang. Tapi, tidak tertutup kemungkinan dalang mengembangkan pakelirannya. "Jadi, pakem jangan diartikan sebagai peraturan yang normatif yang tidak dapat diubah," jelas Manteb.

Bambang Murtiyoso
kesenian terdistorsi teknologi

Pembaruan semacam inilah yang ideal, tidak luput dari tuntutan jaman dan tetap memuat nilai-nilai adiluhung yang terkandung di dalamnya. Yakni pembaharuan sebagai hasil generalisasi pemikiran dalang dan ahli yang berkompeten. Dengan kemampuan mengkombinasi tuntunan dan tontonan yang seimbang. Mereka mampu menerjemahkan keinginan masyarakat, yang umumnya lebih menuntut hiburan, ke dalam pakeliran dengan tetap setia pada bingkai artistik dan idiom pedalangan. Inilah yang dilakukan Ki Narto Sabdo dan Ki Manteb Soedharsono. Akar tradisi yang sangat kuat dipadu dengan "kenakalan" kreatif.

Berbeda dengan kebanyakan dalang muda, keberanian mereka dianggap bersifat destruktif sebab asal mengubah demi pembaruan tanpa mempertimbangkan etika dan estetika wayang. Mereka dinilai menerjemahkan kreativitas hanya dari sisi kebaruan saja tanpa mengingat fungsi wayang sebagai transformasi nilai dan budaya.

Tak Pernah Mati

Wayang yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, diyakini tidak akan pernah mati karena keberadaannya bersumber dari akar tradisi kebudayaan yang kuat. Terbukti hingga kini wayang masih menjadi *mass behavior*.

Upaya yang dilakukan dalang-dalang muda dengan kreasi-kreasi barunya otomatis membawa perubahan dan penyimpangan pakem. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya pewayangan ini, karena masyarakat sebagai penonton, merupakan bagian dari sebuah pementasan yang akan memberikan penilaian. Di tengah kondisi yang dianggap memprihatinkan ini, masih ada dalang yang mempertahankan kelestarian wayang tradisional.

Dengan demikian apapun bentuk perubahan itu wayang akan tetap eksis. Meskipun mungkin dengan peran dan bentuk yang baru. Sebab, tidak ada bentuk kesenian yang mati. Karena nantinya seiring berjalannya waktu akan muncul lagi bentuk-bentuk inovasi yang kemudian mengambil peran-peran baru untuk mengukuhkan eksistensinya.***

Dyah, Imam
nggirma

Primagama Besar Karena Profesional

ISTIMEWA

Adalah **Purdi E. Chandra**, dengan modal pas-pasan, hasil patungannya dengan Herman Legowo --sekarang dosen Fakultas Ekonomi UGM-- mendirikan Primagama pada 1982. Primagama yang pada awalnya berlokasi di jalan Kapten Tandean, saat ini sudah punya *outlet* sebanyak 135 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kiat khusus apa yang dimiliki Purdi untuk membawa Primagama menjadi besar? "Semua itu tak lepas dari pola manajemen yang ditangani secara profesional. Karyawan saya bekerja dengan kreatif. Malah mereka lebih pintar dari saya. Dan satu hal, walaupun saya dirut sekaligus pemilik, saya juga digaji seperti yang lainnya," ungkapnya ketika ditemui *Balairung* di kantor Primagama, jalan Diponegoro Yogyakarta.

Selain punya hobi bermain golf, bapak satu putera ini cukup gemar membaca buku. Menurut pengakuannya, hobinya membaca itulah yang sangat berpengaruh pada perkembangan bisnisnya.

Saat ini, bisnis yang dirintisnya telah berekspansi ke bidang properti, percetakan, penerbitan, bisnis kontraktor, rumah makan, sampai rencananya membuka dealer mobil.

"Saya ingin menciptakan lapangan kerja baru, agar dapat mengurangi pengangguran. Selain itu saya ingin mensejahterakan pegawai. Misalnya, memberikan fasilitas kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji, mulai tingkat bawah hingga manajer," akunya.

Iya *deh*, pak. Semoga sukses dengan misi mulia itu.***

Uki Hernuning dan Yuki Susanti

TIMBUL/DOK BALAIRUNG

Berlibur di Tanah Air Sendiri
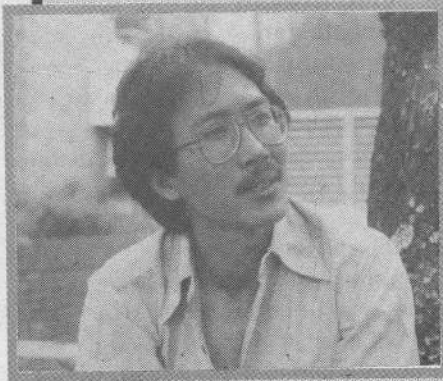
"Kondisi pasca Soeharto akan jadi PR besar buat kita," demikian kata **Ariel Heryanto** ketika ditemui *Balairung* usai diskusi *Kasus Udin pasca Iwik Bebas* di Lembaga Penelitian Realino Yogyakarta, pertengahan Desember 1997 lalu. "Kalau kita tidak tangkas membenahi apa yang harus dibenahi, tidak membuat persiapan alternatif, maka kelompok militer dan pengusaha akan siap menerkam," katanya menambahkan.

Menurut pengakuannya, diskusi itu secara tidak sengaja ia hadiri. Doktor lulusan Australia yang "membuang diri" ke Singapura ini mengaku sedang berlibur ke Indonesia. "Saya mau sowan orang tua di Jawa Timur. Yaa... sekalian jumpa kawan-kawan," katanya. Selain mengajar, mengisi "asal-usul" di harian Kompas menjadi kesibukan lain *lecturer* yang selalu membawa kamera ini.

Mengapa terdampar di Yogya? Menurutnya, Yogya merupakan kota yang menarik. "Yogya adalah kota kecil yang punya tradisi sejarah aktivisme dan kota intelektual sejak jaman kemerdekaan. Itulah pula sebabnya mengapa di Yogya "perlawanan" masyarakat terhadap kesewenangan penguasa cukup konsisten. Kasus Udin adalah salah satu contohnya. "Di Jakarta banyak saya jumpai orang apatis. Sementara di Yogya, saya kira kondisinya lebih baik. Lihat saja ketika orang terlibat kesibukan lain, di sini orang masih konsisten untuk terus menghidupkan kasus Udin," katanya.***

Asep & Bustom

Bahagia, berseri-seri, terharu, entah kata apalagi yang pantas untuk menggambarkan perasaan **Prof.Dr. T.Jacob, M.S.M.D.**, malam itu (19/12/1997). Ucapan selamat dari rekan-rekan sejawat, wartawan dan undangan lainnya yang datang bergantian, dibalasnya dengan ramah dan akrab. Malam itu memang menjadi miliknya. Ya, malam itu ia mendapat anugerah "Hamengkubuwono IX Award" dari pihak kraton Yogya.

Tak sedikitpun nampak kelelahan di wajahnya walaupun usianya sudah mendekati 70 tahun. Hal itu sempat diamati *Balairung* ketika menemuinya usai acara.

Orasinya yang bertajuk *Kehidupan Pasca Kematian: Perspektif Antropologis* dibacakannya di pagelaran kraton Yogyakarta. Ketika ditanya latar belakang penulisan orasinya, ia berujar, "Lahir dan hidup sudah banyak dibicarakan, tapi ujungnya (kematian-red) terabaikan dan kurang banyak 'disentuh'. Mungkin orang takut."

Berbicara tentang kematian kadang mengasyikkan,

Pak Wid dan prinsip *need of achievement*

Majalah Manajemen

Alumnus Psikologi UGM ini mengaku tertarik di bidang pariwisata berkat hoby UGM *study tour* yang menjadi kegiatan utama saat liburan setelah ujian semester.

Beliau adalah **Drs. Widodo Sunaryo** orang nomor satu di PT. Pembangunan Jaya Ancol Jakarta, yang ditemui *Balairung* disela kesibukan kantornya. Menurut Pak Wid, begitu nama panggilanya, kesuksesan adalah suatu proses dimana perencanaan dan perjuangan merupakan unsur dasarnya. "Orang yang ingin sukses harus punya kebutuhan untuk berprestasi tinggi yang mendorong orang untuk bekerja lebih baik," tutur alumnus yang menganut prinsip *need of achievement* ini.

Menurutnya, di masa-masa kuliah yang terpenting adalah mempelajari banyak hal dan gemar membaca buku. Salah satu kiat suksesnya dalam meniti karier adalah kesabaran dan bertahan sampai akhir . "Dalam meniti karier perlu adanya kesabaran tanpa melalaikan perencanaan panjang dalam diri pribadi sendiri, jadi harus punya *staying power* yang tinggi," ungkap direktur yang selalu membuka pintu kantornya ini.

Berkait dengan pariwisata sendiri Pak Wid mengatakan bahwa pariwisata akan menjadi komoditi yang berpotensi jika digarap, terutama pelaku pariwisata itu sendiri.***

F.Ika Yuniarti

Mahasiswapun punya kemungkinan mengalami *burn out*

Kegagalan untuk mencapai cita-cita tinggi dalam suatu kulminasi tertentu ternyata dapat mengakibatkan seseorang mengalami kelelahan emosional yang mendalam, down secara emosi, merasa capek, tak tertolong, dan tak punya harapan. Berbeda dengan depresi, biasanya kecenderungan ini hanya dialami oleh mereka yang punya motivasi berprestasi tinggi (need achievement) dalam dunia perusahaan. Dalam psikologi industri kondisi tersebut lebih dikenal dengan istilah *burn out*..

Tetapi mengapa justru cenderung dialami oleh orang yang punya motivasi berprestsi tinggi?

. Hal inilah yang coba diteliti oleh **Winda Widiastuti**, mahasiswi fak psikologi angk 94 dalam sekripsinya.

"Mahasiswapun bisa mengalami hal serupa, bila mahasiswa tersebut punya motivasi berprestsi tinggi sekali tapi *njeglek* di tengah jalan." Solusinya? "Kemungkinan itu bisa ditekan, salah satunya bila mahasiswa tersebut punya kecerdasan emosional tinggi. Artinya secara psikologis dia punya kemampuan untuk mempersiapkan keadaan terburuk." tuturnya.

Winda yang pada 25 April' 98 nanti menginjak usia ke 21, bisa dibilang termasuk mahasiswa prematur. Dalam usia 17 th dia sudah menjadi mahasiswi dan dalam usia 20 th telah siap menyelesaikan sekripsinya.

Baginya usia yang lebih muda dibanding teman sebayanya tidak menghalangi untuk beraktifitas di kampus. Hal ini dibuktikan ketika menjabat Ka. Bid Humas Ekstern Senat Mahasiswa UGM 96-97. Di dalamnya berbagai macam aktifitas telah dijalani, bahkan dia sempat membacakan statemen di hadapan Rektor UGM, saat senat mahasiswa UGM mengadakan aksi mahasiswa menetang militer masuk kampus. Terakhir Winda terlibat dalam merintis kerjasama antara Senat Mhs.UGM dan Senat Mhs. Univ. Esburgh, Austria dan Ia bertindak sebagai wakil senat untuk mengadakan studi banding dan penandatangan MOU di Austria.

Winda tidak memungkiri kesibukan aktifitasnya memang mempengaruhi prestasi akademiknya. Soal ini ia menjelaskan, "Masak sih hanya karena kegiatan prestasi kita menurun? Kan pinter-pinter kita aja memanage waktu." Buktinya ia mampu mempertahankan IPK di atas 3. " IPK saya 3,2 mas..ya lumayan lah" tuturnya mengakhiri wawancara.***

gandhi

Yang Ditakutkan Cara Matinya

EDUARDO ADMIRAL

tapi juga mengerikan. Banyaknya manusia modern takut dengan kematian. Menurutnya, bukan kematian yang ditakutkan, tapi cara matinya.

Tentang peran agama dan hidup setelah mati, menurutnya, agama membuat orang tidak takut mati. "Di sana kita mendapat penilaian terhadap hidup kita di dunia ini, lebih buruk atau lebih banyak baiknya. Jadi ini untuk mendidik, mengajari dan mengatur manusia agar waktu di dunia tahu diri, memegang aturan dan menghormati orang lain,". Boleh juga ceramah bapak kita satu ini. Sekali lagi, selamat *deh* Pak.***

Bustom dan Katam

MALAIKAT MAUT

Alkisah malaikat akan mencabut nyawa seorang raja yang sudah tua renta. Ketika sang raja sedang tidur akan diambilnya nyawa sang raja tetapi tidak diketemukan di tubuhnya, akhirnya raja terbangun sambil mengumpat, "Enak aja ambil nyawa orang tanpa bilang, ngomong dong. Tuh nyawa gua ada di Bank Dunia sebagai jaminan utang."

Malaikatpun pergi ke Bank Dunia tetapi nyawa sang raja tidak diberikan sebelum utang-utang dilunasi. Malaikatpun putus asa dan kembali menghadap Tuhan. Dengan termenung sejenak Tuhanpun berfirman, "Beri dia kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, biar dapat melunasi hutang luar negerinya yang setinggi gunung itu." ***

Kelik S

WARNA KULIT

Syahdan, ada seorang mahasiswa aktifis di berbagai kegiatan mahasiswa yang nyambi menjadi intel mahasiswa di kampusnya.

Tiba-tiba ia mendapat kelainan pada kulit tubuhnya. Kulitnya yang mula-mula putih bersih semakin lama berubah menjadi kemerahan dan kemudian menghitam kelam. Pergilah ia ke seorang dukun. "Bagaimana cara memutihkan warna kulit saya ini, mbah?" tanyanya.

Tanpa memandang sedikitpun mbah Dukun berkata, "Kurangi kebiasaan minum darah teman-temanmu." ***

Kelik Supriyanto

PUTRI RAJA

Alkisah ada seorang raja yang sudah jemu menjadi raja, ia lalu membuat sayembara, "Siapa saja yang dapat mengalahkanku dalam bermain dadu akan kukawinkan dengan putri sulungku dan menggantikan kedudukanku menjadi raja."

Sudah banyak para jawara yang mencoba, tetapi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan raja. Rajapun bersabda, "Karena tidak ada yang dapat mengalahkan kepandaianku dalam bermain dadu maka aku terpaksa tetap menjadi raja dan putri sulungku terpaksa kuperistri sendiri." ***

K Supriyanto

GAJAH

Suatu hari di Thailand ada seekor gajah yang mogok dan menghalangi jalan dimana delegasi para pemimpin negara-negara ASEAN menuju tempat konferensi.

Sudah banyak pawang gajah yang mencoba menghalau gajah tersebut termasuk beberapa delegasi konferensi, tetapi gajah tersebut tetap tidak beranjak dari tempatnya.

Tiba-tiba datang delegasi Indonesia dari ormas keagamaan. Mendekatlah ia dan berbisiklah di telinga gajah tersebut. Tanpa diduga gajah tersebut lari tunggang-langgang.

Delegasi lainnya keheranan dan ingin tahu. Dengan tersenyum ia membuka rahasia apa yang dibisikkan ke telinga gajah tersebut, "Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, kamu akan saya bawa ke Indonesia untuk ikut penataran P4." ***

Agoeng Widyatmoko

MISTERI SEBUAH POHON

Seorang kakek bercerita kepada cucunya tentang sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah kuburan desa. "Pohon ini dulu kakek tanam sebagai peringatan adanya penyakit aneh yang hampir menghabiskan seluruh laki-laki di desa ini, *cu*."

"Penyakit macam apa itu *kek*"

"Kebanyakan orang menyebutnya sebagai *comunist phobia*"

"Memangnya sekarang ada yang aneh dengan pohon ini, *kek*?", tanya cucunya.

Jawab sang kakek dengan keheranan, "Saya tidak menyangka pohon ini sekarang bisa menjadi *Single Majority* di negeri ini." ***

Kelik Supriyanto

SINGGASANA RAJA TIDAK KUAT

Di jaman *sepur lempung*, berkumpullah para raja kerajaan yang tergabung dalam *Paguyuban Kerajaan Pingin Kaya*. Para raja tengah mempresentasikan tentang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Raja dari kerajaan *"paling kuat"*, dan kerajaan *"agak kuat"* lainnya dengan berdiri serta berapi-api menyampaikan pidatonya. Giliran raja kerajaan *"tidak kuat"*, ternyata dia menyampaikan pidatonya tanpa mau beranjak dari tempat duduknya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan di benak raja *"paling kuat"*. Ketika istirahat bertanyalah dia kepada raja tidak kuat,

"Kenapa tadi waktu pidato Anda tidak berdiri?"

Dengan serius raja *"tidak kuat"* menjawab,

"Kalau saya berdiri, gimana jika kursi saya diduduki orang ?... ***

Hery

TERPERCAYA KOKOH dan BERSAHABAT

Dengan dukungan masyarakat dan kepercayaan nasabah, kami hadir di 548 kantor cabang di Indonesia dan 6 kantor cabang di Mancanegara, demi untuk menjalankan amanah pembangunan dan nasabah.

Dekat, dan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat melalui jaringan kantor cabang yang menjangkau sampai ke mancanegara adalah kerinduan kami.

Dukungan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat dan nasabah untuk menjalankan amanah pembangunan telah menguatkan tekad dan keyakinan kami untuk senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi yang pertama dalam kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistem manajemen dan operasi dan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia...bagi masyarakat dan bagi Anda nasabah kami.

BANK BNI

Terpercaya, Kokoh dan Bersahabat

Kantor Besar :
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, PO. Box 2955 JKT Jakarta 10220, Tel. (021) 251 1946 (70 saluran) Telex 65511 KBBNI IA, Fax. 251 1214
Alamat Kawat : KANTORBESAR

CIPTA KALYANA